Kemurnian dan ketinggian kadar protein tepung terigu BOGASARI meningkatkan rasa dan mutu makanan yang dibuatnya

BOGASARI tepung terigu murni berkwalitas utama, terbuat dari biji-biji gandum pilihan:
Proses produksi dengan cara mutakhir menjadikan tepung BOGASARI halus, lembut dan tetap berkadar protein tinggi. 1001 variasi makanan dengan bahan dasar tepung terigu BOGASARI, nikmat dan bergizi tinggi. BOGASARI tersedia dalam 3 jenis brand dengan kadar protein yang berlainan disesuaikan dengan kebutuhan.

Protein 13% - 13,5%
- BOGASARI kwalitet utama cap "CAKRA KEMBAR" khusus untuk membuat ROTI dan MIE istimewa.

Protein 10% - 12%
- BOGASARI kwalitet utama cap "SEGITIGA BIRU" istimewa untuk membuat kue DONAT dan BAKPAO.

Protein 8% - 9%
- BOGASARI kwalitet utama cap "KUNCI" utama untuk membuat kue BISKUIT dan kue TART.

BS FLOUR MILLS

BOGASARI tepung terigu murni berprotein tinggi

mimbar ulama

PELITA TIGA
DAN HARAPAN

ULAMA DAN DESA

ISSN 0125 – 9415

TAHUN III

28

MIMBAR ULAMA
Majalah Majelis Ulama Indonesia

Diterbitkan oleh : Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia

Penasihat : H.Alamsjah Ratu Perwiranegara

Pemimpin Umum : Prof. Dr. Hamka

Wakil Pemimpin Umum : K.H. Syukri Gazali

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : K.H. Hasan Basri

Wakil I / Tata Usaha : H. Amiruddin Siregar

Anggota Redaksi : H. Ismael Hassan S.H.
: Drs.H.Husein Segaff M.A
: Drs. Mastuhu M.Ed.
: Drs. Marwan Saridjo
: Drs. H.M. Atho Mudzhar.

Harga Eceran : Rp. 375,–

Bank : BNI 1946 Cab. Kebayoran Baru
: Rek. No. 4107

Alamat Redaksi : Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia Mesjid Al-Azhar
Kebayoran Baru Telepon 777246/776452
Jakarta Selatan.

Surat Tanda terdaftar : 046/SK/Ditjen PPG/STT/1976
: Tanggal 12 Maret 1976

Surat izin Cetak : Skep/012-PK/1c-Kh/1976

Pencetak : Percetakan "Cemara Indah"
Jakarta.

Mimbar Ulama diterbitkan dengan maksud sebagai media-komunikasi antara Ulama Indonesia dengan umara dan ummat/masyarakat luas dalam rangka menunjang Pembangunan Nasional dan kemajuan da'wah di Indonesia. Redaksi menerima sumbangan karangan berupa pembahasan ilmiah, tulisan-tulisan populer, tentang agama Islam dan pengetahuan umum lainnya. Juga menerima laporan-laporan tentang kegiatan Majelis Ulama dan Da'wah dari daerah-daerah di seluruh Nusantara.

Redaksi berhak mengadakan perobahan atas sesuatu karangan, sejauh tidak merobah isinya. Setiap karangan yang dimuat dalam Majalah ini mendapat imbalan yang sepantasnya. Tulisan yang dimuat dalam Mimbar Ulama tidak selamanya sejalan dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia.

Para penulis yang mengirimkan karangannya hendaknya menyertakan riwayat hidup sing-

mimbar ulama

TAHUN III — Rabiul Akhir 1398 / Maret 1979

Pengantar Redaksi

3 Presiden Suharto
Muhammad SAW sebagai Suri Tauladan Dalam Pembangunan

6 Menteri Agama, H. Alamsyah Ratuperwiranegara
Makna Maulid Nabi Muhammad SAW

9 Prof. H. Osman Raliby
Muhammad SAW dan Pembangunan

14 DH. Husein Kartasasmita
Prospek Ekonomi Dalam Pelita III Secara Umum

20 H. Sudirman
Pembangunan Masyarakat Desa sebagai Unsur Ketahanan Nasional

27 KH. E.Z. Muttaqien
Desa Dan Ketahanan Nasional

36 H. Amiruddin Siregar
Ummat Islam dan Pembangunan

41 Ir. M. Saleh Widodo
Kembali Ke Desa

46 M. Dawam Rahardjo
Pendidikan Dan Kesempatan Kerja di Pedesaan

51 Drs. M. Zamroni
Pembinaan Dan Pengembangan Generasi Muda Indonesia Dalam 5 Tahun Mendatang

57 Berita Organisasi

61 Jeddah Selayang Pandang

64 Forum Dialog

66 Ir. A.M. Luthfi
Teknologi Tanpa Jiwa Tidaklah Manusiawi

73 Drs. Muchlish Nuruddin
Pemahaman Ajaran-Ajaran Islam

77 K. Purwana
Kami Kembali Sebagai Muhajirin

PENGANTAR REDAKSI

Bulan Rabi'ul awal 1399 H baru saja meninggalkan kita. Sebagaimana biasanya, Maulid Nabi Besar Muhammad SAW itu telah diperingati dan dirayakan mulai dari Istana Negara sampai kedesa-desa. Sebagai suatu hari besar Islam yang berthemakan : mencontohkan tauladani prikehidupan Nabi Muhammad SAW, kiranya peringatan dan perayaan-perayaan yang berlangsung dan diisi dengan serba-serbi acara dakwah, telah menyumbang pembinaan mental religious kepada bangsa Indonesia. Kiranya amanat Presiden, pidato Menteri Agama Alamsyah, serta ceramah maulid yang bernas dari Prof.H. Osman Raliby akan cukup meninggalkan kesan yang berarti dalam hati dan jiwa setiap orang mukmin.

1 April 1979 mempunyai arti sejarah bagi pembangunan Indonesia. Ianya telah dijadikan tanggal permulaan dari setiap Pelita. Pelita I telah lama kita tinggalkan, dan telah memberi dasar bagi pembangunan oleh Orde Baru, setelah Orde Lama tumbang. Pelita II yang akan segera berakhir tanggal 31 Maret 1979 telah dapat memperlihatkan hasil yang cukup memberi keyakinan bahwa bangsa Indonesia memang sedang membangun terutama dibidang pra-sarana. Pelita III akan lebih memberi-arti khusus kepada tujuan pembangunan bangsa Indonesia ialah : masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Keadilan adalah tuntutan hak azasi setiap orang, dan kemakmuran menjadi idaman. Delapan jalur pemerataan dibidang pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pelita III sungguh menggugah harapan setiap warga negara, tua maupun muda. Yang tua akan lega melihat hasil perjuangan mereka memerdekakan bangsa Indonesia, sedangkan yang muda melihat titik terang masa depan.

Dengan bismillah, tentunya kita menyambut pelaksanaan Repelita III itu pada tanggal 1 April 1979 yang akan datang. Bahkan Penataran P—4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sedang giat dilaksanakan, Rapat Gubernur, Bupati, Walikota Madya seluruh Indonesia telah berlangsung dimana Presiden Soeharto telah memberikan 6 landasan untuk mensukseskan Pelita III.

Himbauan tentunya berbunyi : marilah seluruh rakyat Indonesia mensukseskan Pelita III demi kemakmuran bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia 81 % bermukim di pedesaan. Mereka umumnya merupakan petani kecil, bahkan ada yang hanya berstatus buruh tani. Maka tepatlah kiranya kalau masalah pedesaan ini menjadi pemikiran yang lebih mendalam dan sungguh-sungguh. Forum Ilmiyah tentang pembangunan Masyarakat Desa dan Pedesaan telah dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Kiranya menarik juga untuk mengikuti sebahagian fikiran-fikiran yang telah dilontarkan dalam forum ilmiyah tersebut.

Apabila Mimbar Ulama no. 28 ini sampai ditangan pembaca, kiranya ada baiknya merenung-renungkan tentang masalah-masalah pembaharuan pendidikan yang sedang dicanangkan oleh Menteri P dan K, Daud Yusuf. Masalah pendidikan inilah yang akan menjadi fokus Mimbar Ulama No. 29. Selamat membaca. (AMSIR).

NABI MUHAMMAD SURI TAULADAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena pada malam ini kita kaum muslimin berkesempatan lagi memperingati suatu peristiwa sejarah yang besar, yakni maulid Nabi Besar Muhammad SAW, yang lahir 14 abad yang lampau. Peristiwa ini mempunyai arti yang sangat penting, bukan saja bagi kehidupan beragama kita, melainkan juga bagi hidup kebersamaan kita sebagai umat dan sebagai bangsa.

Kesempatan seperti ini hendaknya dapat kita gunakan untuk mawas diri, menanyakan kepada diri kita masing-masing seberapa jauh kita telah berusaha untuk melaksanakan ketauladanan Nabi Besar kita itu, ketauladanan bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebab, bagi kita adalah jelas bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah tokoh dalam dunia mitologi atau legenda. Beliau adalah tokoh sejarah. Beliau lahir, hidup dan wafat sebagai manusia seperti kita. Beliau adalah tokoh yang berhasil dalam memimpin umatnya. Namun keberhasilan itu tidak datang begitu saja. Keberhasilan itu harus ditebus dengan pengorbanan dan penderitaan, lahir dan batin.

Karena itu perikehidupan Nabi Muhammad SAW benar-benar merupakan suatu uswatan hasanah, suatu teladan utama bagi kita. Karena itu sebagai kaum muslimin, kita harus berusaha memahami dan menghayati dorongan batiniah dan landasan moralitas yang menyemangati dan mewarnai kehidupan, pergaulan dan perjuangan beliau, sebagai Nabi, sebagai pemimpin masyarakat dan negara, dan juga sebagai manusia.

Sesungguhnyalah, kehidupan Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ilham bagi kita kaum muslimin, yang harus menjawab berbagai tantangan dan tuntutan perkembangan umat manusia. Beliau adalah seorang pejuang yang penuh ke-

*) Sambutan Presiden Suharto pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tgl. 8 Pebruari 1979 di Istana Negara.

yakinan dan teguh pendirian, seorang pemimpin yang penuh tanggung jawab, terbuka dan rendah hati. Dan dalam puncak keberhasilannya, beliau tidak tergoda untuk melepaskan kesederhanaan hidup dan menggantikannya dengan gaya hidup yang berlebih-lebihan. Walaupun beliau seorang Rasul Tuhan akan tetapi beliau tidak menempatkan diri di atas para umat pengikut beliau.

Selaku Rasul Tuhan yang harus mendakwahkan ajaran-ajaran agama, beliau tidak hanya mementingkan aspek-aspek moral dan kerokhanian melainkan juga mementingkan aspek-aspek sosial dan kemasyarakatan. Sebab memang pokok risalah beliau seperti ditegaskan oleh Tuhan sendiri adalah bersifat "rakmatan lil'alamin". Beliau datang adalah untuk menumbuhkan hubungan dan suasana hidup kekebersamaan manusia yang didasari oleh rasa kasih sayang.

Sejalan dengan itu Nabi sendiri mengajarkan bahwa umat manusia pada hakekatnya merupakan "suatu keluarga ilahi". Beliau mengajarkan bahwa seluruh umat manusia adalah keluarga ilahi dan orang yang paling dicintai oleh Tuhan ialah mereka yang paling baik terhadap sesama keluarga ilahi.

Saya rasa kesadaran bahwa kita pada hekekatnya adalah satu keluarga, perlu dihayati, lebih-lebih bagi kita yang hidup sebagai satu bangsa dalam satu negara yang mengandung berbagai kemajemukan. Dan sebagai bangsa Indonesia kita harus merasa bangga. Justru para pendahulu kita, para pemimpin pergerakan kemerdekaan, dengan sadar telah mengungkapkan bahwa cita kekeluargaan itulah yang harus menyemangati kehidupan bangsa kita, menyemangati sikap hidup kita masing-masing, baik dalam bermasyarakat maupun dalam bernegara. Dan memang cita kekeluargaan itulah yang menjiwai dan mewarnai kebudayaan bangsa kita.

Cita kekeluargaan menuntut kita untuk mengembangkan sikap lebih mementingkan kesejahteraan bersama daripada kesenangan sendiri, lebih mendahulukan penunaian kewajiban sosial daripada penuntutan hak pribadi, dan lebih mengutamakan memadu pendapat dengan musyawarah dan mufakat daripada mengadu pendapat atas dasar sikap merasa benar sendiri dan ingin menang sendiri. Cita kekeluargaan juga menuntut kita untuk menumbuhkan semangat dan suasana kerukunan dan keutuhan, sikap "tepa selira", tenggang rasa dan kesetiakawanan di antara sesama bangsa dan warganegara.

Sengaja masalah ini saya kemukakan dalam upacara peringatan peristiwa keagamaan ini, sebab saya rasa cita kekeluargaan itupun harus kita resapi dan hayati bersama dalam mengembangkan kehidupan agama di Tanah Air kita. Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskan bahwa salah satu sasaran utama pembangunan dalam bidang kehidupan agama adalah pembinaan kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, di antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan antara semua umat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

Di samping ajaran masing-masing agama—yang saya rasa tak satupun menganjurkan permusuhan— maka Pancasila jelas merupakan landasan bagi kita untuk membina kerukunan hidup bersama. Pancasilah yang menjadi kerangka budaya kita bersama sehingga peningkatan usaha-usaha memasyarakatkan ajaran-ajaran

agama dapat terjamin keleluasaannya, sepanjang tidak dilakukan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan dan kecemasan bagi golongan agama yang lain, yang pada gilirannya akan memperlemah kesatuan dan kebutuhan bangsa.

Oleh karena itu saya harapkan agar usaha mengembangkan dan meningkatkan kehidupan agama, masing-masing golongan agama dapat mengendalikan diri untuk tidak menimbulkan kecurigaan dan kecemasan satu sama lian, dapat menempatkan kepentingan golongan di bawah kepentingan bersama yang lebih besar demi kepentingan umat beragama sendiri.

Dalam hubungan ini, sungguh terasa betapa pentingnya usaha yang sekarang sedang kita lakukan, untuk memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, EKAPRASETIA PANCAKARSA.

Apabila kita semua dapat menghayati EKAPRASETIA PANCAKARSA itu, maka kita akan selalu berusaha mengendalikan diri dalam segala tindakan agar kita dapat memenuhi kewajiban kita sebagai makhluk sosial. Sesungguhnyalah, kemampuan mengendalikan diri dan kepentingan pribadi itu benar-benar merupakan landasan moralitas kita dalam membangun masyarakat. Sebab tanpa dilandasai oleh kemampuan mengendalikan diri dan kepentingan pribadi, norma-norma sosial yang mengikat kita sebagai warga masyarakat akan mudah diabaikan. Begitu pula ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat kita sebagai warganegara akan mudah dilanggar. Dengan demikian akibat ketidak mampuan kita mengendalikan diri dan kepentingan pribadi mau tidak mau akan merugikan masyarakat, akan merugikan bangsa dan negara kita.

Bagi kita umat beragama, masalah mengendalikan diri dan mengendalikan kepentingan pribadi ini bukanlah pelajaran baru. Kepercayaan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa serta keyakinan kita akan adanya hidup setelah mati akan membuat kita berusaha menghindari tindakan-tindakan yang merugikan atau menyakitkan orang lain, apalagi merugikan dan mengganggu masyarakat banyak. Bahkan kita berusaha agar kehidupan kita justru bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa kita.

Oleh karena itu, dengan pangkal tolak kemampuan mengendalikan diri dan kepentingan pribadi itu, kita yakin cita-cita kita untuk mewujudkan Masyarakat Pancasila, ialah masyarakat yang berazaskan kekeluargaan dengan dilandasi oleh ketakwaan dan kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, akan dapat terlaksana dan benar-benar dapat memberikan kebahagiaan lahir batin kepada kita semua.

Adalah kewajiban kita semua, terutama para pemuka agama untuk mengerahkan dan mengarahkan umat beragama agar benar-benar merupakan kekuatan pembangunan dalam usaha kita mewujudkan Masyarakat Pancasila. Dan khusus kepada kaum muslimin saya serukan marilah kita teladani kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan kaum muslimin saja melainkan juga untuk kepentingan umat-umat lain, kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb..

MAKNA
MAULID NABI

Oleh Menteri Agama R.I.
H. Alamsjah Ratu Perwiranegara

Sewajarnyalah apabila kita bersyukur bahwa peringatan keagamaan seperti peringatan Maulid telah membudaya di kalangan masyarakat Islam baik yang berada di kota maupun di desa, bahkan juga di kalangan pemerintah di kantor-kantor dan seterusnya.

Tentu saja dalam kita memperingati Maulid ini, berbagai cara yang dapat dilakukan orang. Namun kesemuanya itu bertujuan untuk dapat menghayati kembali dari kehidupan Rasulullah dan sekaligus berusaha untuk dapat mengambil semangat Maulid ini untuk dapat diterapkan dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan sebagai umat beragama, umat Islam.

Maka adalah kewajiban kita sebagai umat Muhammad untuk membangun dirinya, keluarganya, masyarakatnya dan negaranya sebagai yang dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah.

Arti pembangunan disini tidak lain melakukan "hijrah" dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Kita berusaha agar kita dapat meninggalkan generasi yang lebih dari generasi yang sekarang dan memperbaiki keadaan kepada keadaan yang lebih yang merupakan tuntutan kehidupan baik rohaniyah maupun jasmaniyah.

Pembangunan nasional itu sendiri bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Dari rumusan ini jelas betapa besar dan pentingnya peranan agama dalam membangun masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, rohani dan jasmani, sejahtera di dunia dan di akhirat. Pembangunan kita menuju cita-cita terciptanya "masyarakat Pancasila" Masyarakat yang kita bangun melalui pembangunan nasional adalah yang berkeseimbangan antara pembangunan yang bersifat materiil dan yang bersifat spirituil, keagamaan.

*) Artikel ini diangkat dari sambutan Menteri Agama pada Peringatan Maulid Nabi tanggal 8 Pebruari 1979 di Istana Negara.

Untuk kesinambungan pembangunan nasional diperlukan mantapnya kehidupan umat beragama, terutama mantapnya **trilogi kerukunan**, yaitu **kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama** dan **kerukunan antara umat beragama dan Pemerintah**. Trilogi kerukunan di atas merupakan unsur penting dalam menciptakan mantapnya stabilitas nasional dan ketahanan nasional.

Dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW marilah kita menelaah kembali dan berusaha untuk mengikuti jejak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang telah diuraikan oleh Prof. Osman Raliby beberapa saat yang lalu mudah-mudahan akan memberi bekas dalam kehidupan kita bersama sebagai umat beragama.

Nabi Muhammad SAW selama hidupnya telah menunjukkan kehidupan dan akhlaq yang tinggi dan mulia. Rendah hati dengan segala kehormatan dan kemulyaan yang ada padanya. Menyantuni kawan dan lawan dengan kekuasaan yang ada pada tangannya. Beribadah dengan penuh cinta mengharap keridoan Allah dengan limpahan karunia Allah yang dikhususkan kepadanya.

Rasulullah adalah manusia biasa yang merasakan lapar dan dahaga, tetapi luar biasa karena risalah yang dibawa dan diamanatkan kepadanya sebagai utusan Allah yang bersifat benar dan lurus, pemegang amanat dan pembawa risalah dengan sebaik-baiknya.

Dalam sejarah Nabi yang dapat kita dengar atau kita baca, di Mekah berhasil membina orang orang Islam yang yakin atas kebenaran ajaran agama. Karena keyakinan agama yang dipeluknya, mereka bersedia menderita bersama Rasulullah, tidak kecil hati menghadapi tantangan dari kaum Kuraisy, tidak gentar karena ancaman dan kejaran yang mengancam keselamatan hidup mereka. Demikian pula Rasulullah di Madinah, telah berhasil membina satu masyarakat yang disebut "Umat Islam" yang menghilangkan tajamnya perbedaan suku dan turunan, mensejajarkan antara yang kaya dengan yang miskin. Demikian pula perlakuan yang adil terhadap mereka yang bukan Islam, membina kehidupan dan kerukunan sesama penduduk Madinah, walaupun berbeda agama. Rasulullah mengajarkan untuk melindungi yang lemah dan menghormati dan bersikap adil terhadap mereka yang berbeda agama.

Kita yang hidup setelah 14 abad dari masa Rasulullah, menyatakan rasa syukur dan seharusnya untuk mengambil hikmat dari kehidupannya dan menganbil suri tauladan yang baik dari sikap dan langkah Rasulullah. Dengan demikian kita berusaha untuk melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Nabi sebagai warisan kepada umatnya kecuali dua yaitu Hadith dan Al Qur'an. Manakala keduanya menjadi pedoman dan pegangan umat maka berbahagialah mereka untuk kehidupan di dunia dan di akhirat.

Sebagai bangsa yang sedang membangun dan sebagai umat beragama yang baik, maka adalah menjadi kewajiban bersama untuk memantapkan Pancasila dan mengamalkan Ketetapan-Ketetapan MPR terutama ikut serta memasyarkatkan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dalam kehidupan bangsa dan negara.

Dalam kesempatan ini saya menghimbau umat beragama terutama umat Islam untuk menjadi pemeluk agama yang baik dan sekaligus menjadi Pancasilais yang mantap.

Marilah kita dalam memperingati Maulid Nabi ini membulatkan tekad untuk

memantapkan Pancasila sekaligus menjadi pemeluk agama yang baik. Agama dan Pancasila saling mengkokohkan satu dengan yang lain dalam mensukseskan pembangunan bangsa, negara dan agama.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan taufiqNya kepada kita sekalian dan kita selalu dalam rido–Nya.

Kirim Berita
Dengan Telegram
Lebih Murah
Gunakanlah Telepon
Untuk Semua
Keperluan Anda

HUBUNGI KANTOR TELEPON - TELEGRAP SETEMPAT

perum telekomunikasi

Muhammad saw Dan Pembangunan

Oleh Prof. H. Osman Raliby

PERAYAAN MAULUD NABI telah melembaga di seluruh dunia Islam yang luasnya terbentang dari Marokko sampai ke Merauke. Malah sesudah Perang Dunia ke II selesai, perayaan Maulud ini telah menjadi kebiasaan pula di kota-kota besar di Eropah dan Amerika Serikat, malah sampai-sampai ke negeri-negeri Amerika Latin sekalipun.

Apa sesungguhnya yang menyebabkan segala itu. Sebabnya bukanlahkarena disana kini telah tumbuh dan berkembang masyarakat-masyarakat Islam, tetapi sebab yang utama ialah karena Islam yang selama ini merupakan satu agama yang disalah-pahami (a misunderstood religion) dibagian-bagian tertentu dari dunia, kini telah menjadi semakin jelas dan terang disana, sehingga dengan sendirinya menjadi semakin dipahami, semakin jelas dan semakin disukai. Maka dengan sendirnya Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya ummat Islam menjadilah semakin dikenal dan menonjol pula.

Baru-baru ini pada menjelang akhir tahun yang lalu surat-kabar "International Herald Tribune" yang terbit di Paris, tertanggal 23–24 Desember 1978, secara sangat menyolok sekali dalam dua halaman penuh, telah mengumumkan secara berurut 100 nama dari orang-orang yang paling berpengaruh di dunia sekarang ini. Dan sebagai nomor pertama dan utama yang terletak paling atas dalam urutan itu adalah nama MUHAMMAD SAW.

Urutan itu bukanlah bikin-bikinan orang biasa, tetapi merupakan hasil satu penelitian dari seorang sarjana sejarah merangkap ahli mathematika dan hukum yang bernama Michael Hart. Malah sejarah singkat dari seratus orang sangat berpengaruh dan besar itu kini telah diterbitkan pula sebagai satu buku dengan judul: "The Hundred A Rangking of the Mos Influential Person in History".

Kita mengharapkan semoga buku tersebut dapat memberikan bimbingan atau petunjuk-petunjuk baru kepada ummat manusia di luar kawasan hidup Islam dalam mengenal agama Islam dan Rasulnya Muhammad SAW.

Maka kini marilah kita disini berusaha pula sekedar untuk mengenal MUHAMMAD SAW dari suatu segi lain yang selama ini kurang sekali dikemukakan orang, yaitu segi Pembangunan. Sedikit sekali orang mengetahui, bahwa Muhammad sebenarnya adalah pula pembawa pembangunan bagi ummat manusia. Ini

*) Artikel ini diangkat dari ceramah pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tgl. 8 Pebruari 1979 di Istana Negara

sudah terjadi sejak dalam tahun tahun pertama dari kerasulannya dan demikian lah seterusnya hingga sampai wafatnya dan seterusnya dipertumbuh dan perkembangkan oleh para Khalifahnya nan empat itu.

Sebagaimana kita ketahui keadaan dunia internasional sebagaimana dikenal dewasa itu menjelang kerasulan Muhammad adalah sangat buruk dan penuh dengan kerusakan, yang dalam istilah Islam disebut fasad.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الروم ٤١)

"Telah kelihatan kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia (sendiri), sehingga Tuhan memperasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, semoga mereka kembali ke jalan yang benar. (Ar–Rum XXX : 41).

Dan kerusakan-kerusakan atau al fasad itu adalah sangat menonjol dalam enam bidang kehidupan manusia, yaitu bidang-bidang :

I. Keimanan pada Allah, Tuhan Yang Maha Esa;
II. Martabat manusia;
III. Kehidupan mental;
IV. Kehidupan material;
V. Kehidupan keluarga; dan
VI. Kehidupan masyarakat.

I. Keimanan pada Allah.

Dalam bidang keimanan pada Allah Tuhan Yang Maha Esa kerusakannya sudah sedemikian rupa sehingga praktis ummat manusia dewasa itu umumnya sudah tidak beriman lagi pada Tuhan Yang Maha Esa. Agama Allah yang tadinya benar telah diselewengkan. Polytheisme dalam aneka macam bentuk muncul dimana-mana, disamping penyembahan api, pohon kayu, sungai dan bagian-bagian lain dari alam.

Malah ada negeri dewasa itu yang rajanya yang turun temurun itu disembah sebagai tuhan, sebab mereka dikatakan sebagai keturunan Tuhan dan berdarah ke-Tuhanan. Rakyat bersembah sujud sungguh-sungguh kepada mereka dan menuju serta memuji mereka. Apa yang dinamakan hak-hak Ketuhanan (Divine Rights) mereka diakui, dan pemerintah mesti dari keturunan mereka, walaupun masih bayi sekalipun.

Demikianlah keadaan di dunai internasional sebagaimana dikenal dewasa itu di zaman Muhammad SAW.

Di semenanjung Arabia sendiri orang menyembah al–lata, al–Uzza, Manata, Hubal, dan lain-lain berhala lagi. Malah ada yang menyembah jin, malaikat, bintang-kemintang, dan lain-lain sebagainya. Umumnya semua sarjana sependapat bahwa abad ke VI dan ke VII itu adalah zaman yang paling gelap dalam sejarah manusia.

Maka MUHAMMAD SAW datang dan membawa perobahan dalam hidup keimanan ini. Ia membangun kembali iman ummat manusia yang telah rusak dan hancur itu. Liwat wahyu-wahyu Ilahi yang diterimanya ia kembali memperkenal-

kan Allah kepada manusia sebagaimana Allah sendiri telah memperkenalkan diri-Nya kepadanya dengan senyata-nyatanya.

Pembangunan Iman yang dilakukan Muhammad SAW sungguh-sungguh merupakan inti dari segala bentuk pembangunan dewasa itu. Malah sampai sekarangpun juga, sebab jika Iman pada Allah telah tiada, ataupun ada tetapi salah, maka manusia akan mudah sekali menjurus kearah aneka macam kefasadan, kemaksiatan dan kemunkaran tanpa disadarinya.

Iman yang dibangun oleh Muhammad SAW telah membikin manusia begitu taat dan patuh kepada Allah (taqwallah) sehingga aneka macam perbuatan terlarang melenyap dari kehidupan perorangan manusia dan masyarakat. Dan memang demikianlah halnya kalau orang sudah mengenal Allah dan menyadari bahwa manusia di sekeliling memang dapat ditipu, tetapi Allah Yang Maha melihat dan Maha tahu tidaklah sekali-kali dapat ditipu atau dikicuh manusia.

II. Martabat manusia

Di tengah-tengah kesibukan pembangunan Iman itu, Muhammad SAW membangun pula martabat manusia, yang dalam istilah Islam disebut **karamah wa fadhhilatul insan** (the dignity of man and of the human person).

Dewasa itu martabat manusia telah sangat merosot, sesuai dengan merosotnya akhlak. Jiwa manusia hampir-hampir tak ada nilainya lagi. Perbudakan merajalela. Di kerajaan Romawi budak budak (slaves) ternyata lebih banyak jumlahnya dari penduduk sipil biasa. Dan kalau sudah dinamakan budak, maka nasib mereka sudah tidak terkirakan lagi buruknya; dibunuhpun oleh tuannya tidak menjadi persoalan besar sama sekali. Demikianlah halnya dihampir semua kerajaan dewasa itu.

Di kemaharajaan Romawi kaum wanita dijadikan sexual object dikemah-kemah hiburan malam yang bertebaran disana dimana-mana (Vide : Prof.DUFOUR: Geschiedenis der Sexuele Zeden bij alle Volken in alle Tijden : 1912).

Dimana-mana dimasa itu terjadi kerja paksa terhadap budak budak atau hamba sahaya. Di semenanjung Arabia sendiri anak perempuan ditanam hidup-hidup sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku dewasa itu. Di negeri lain orang hidup berkasta-kasta, dan yang paling tidak bermartabat adalah kasta terbawah, sedang wanita disana diwajibkan membakar dirinya dalam api yang sedang membakar suaminya yang telah meninggal itu.

Maka Muhammad SAW datang dan pembawa perbaikan dan pembangunan pada martabat manusia, yang dengan tegas-tegas dinamakannya **karamah** wa fadhilatul insan. Ia mengajak ummat manusia supaya berlaku sopan dan santun terhadap sesama manusia dan supaya memberi penghargaan serta penghormatan terhadap martabat manusia. Maka segala yang membawa kepada merendahkan martabat manusia dilarangnya. Malah diajarkannya, bahwa hidup atau kehidupan itu (life) adalah karunia Allah kepada manusia dan tiada seorangpun berhak untuk melenyapkan hak untuk hidup (right to live) itu tanpa kehendak Allah. Tetapi walaupun hidup itu adalah suci (life is sacred), namun Islam membolehkan manusia itu dibunuh kalau memang menurut hukum, misalnya karena telah membunuh

orang lain, merampok harta dan menakut-nakuti orang yang berada dalam keamanan, maka dalam hal seperti itu wajiblah orang itu dihukum berat, antara lain dengan membunuhnya pula. Tentang ini ada ketentuan-ketentuannya dalam Islam.

Martabat manusia itu seterusnya dipelihara oleh Islam dengan melarangnya minum minuman yang memabukkan, berzina, menari-nari tanpa busana, main nudisme, Nacktkultur, perdagangan manusia, dan lain sebagainya.

Manusia itu sejak dilahirkan adalah merdeka, bukan milik siapapun. Makanya dalam hal ini UMAR BIN KHATTAB pernah mengucapkan satu kalimat termasyur kepada gubernurnya di Mesir : "Sejak kapan kamu memperbudak manusia manusia padahal mereka telah dilahirkan dalam keadaan merdeka oleh ibunya".

III. Kehidupan Mental

Di seluruh dunia internasional dewasa itu rakyat tidak boleh berpikir dan menyampaikan pendapatnya. Pihak atasan saja yang berpikir untuk mereka, baik ia raja atau pendeta. Maka Muhammad SAW datang dan membawa pembangunan dalam kehidupan mental ini. Setiap manusia dituntut supaya menggunakan akal pikirannya. Ia dianjurkan supaya memperhatikan keadaan alam semesta, bumi dengan segala yang terdapat diatasnya, matahari dan bulan, dan malah asal mula kejadian manusia. Kemudian ia dituding dengan perkataan-perkataan : Afa-la ta qilun? La alla-kum ta'qilun ! Afa-la tatafakkarun ! La'alla-kum tatafakkarun ! dan lain-lain sebagainya.

Malah sampai-sampai dalam beragama Muhammad dengan tegas-tegas menyatakan : Tidak ada paksaan dalam agama, sebab sudah nyata yang benar dari yang salah. Apakah engkau memaksa-maksa manusia sehingga mereka mau menjadi mukminin? Demikian Islam menyindir manusia yang memaksa-maksa orang supaya masuk agamanya.

Malah Muhammad telah datang untuk juga membebaskan manusia dari khurafat, takhayul dan taklid buta.

Pembangunan kehidupan mental ini luas sekali di dalam Islam sehingga mengingat waktu kita hanya mengemukakan beberapa ketentuan saja, dan semua ketentuan dalam Islam adalah didasarkan pada Al Qur'an dan As-Sunnah.

IV. Kehidupan material

Pembangunan kehidupan materialpun sangat dipentingkan oleh Islam. Dewasa itu terdapat kekacauan kehidupan kebendaan dihampir seluruh kerajaan di dunia ini. Disatu pihak kemewahan berlebih-lebihan dari kaum feodal, dilain pihak kemiskinan yang keterlaluan dari rakyat jelata. Rakyat diperhamba dalam hidup kebendaan oleh kaum atasan. Maka tujuan hidup rakyat satu-satunya waktu itu menjadilah seolah-olah mencari atau memburu harta-benda dengan cara apa saja dan bagaimana saja. Tidak ada hala-haram dalam memperoleh harta benda. Tujuan menghalalkan cara. Siapa yang kuat dia mendapat, sedang yang lemah apa yang telah didapatnya dirampas dan rampok orang pula lagi.

Tidak ketentuan mana yang aku punya dan mana yang kamu punya, what is mine what is dine. Begitu di kemaharajaan Romawi, begitu di semenanjung Arabia, dan begitu pula di kerajaan Sasaniyah, di India dan di Tiongkok dewasa itu.

Maka Muhammad datang dan membawa pembangunan serta pembaruan dalam hal kehidupan material ini. Ditetapkan oleh Islam, bahwa harta itu adalah se-

luruhnya kepunyaan Allah dan manusia hanya memiliki hak pemanfaatan belaka (haqqul intifa). Maka penggunaan hak manfaat dari harta-harta Allah itu seyogianya janganlah sampai membikin manusia itu lupa daratan sehingga seluruh hidup nya menjadi materialistis dan iapun akhirnya menjadi pecinta dunia yang tiada taranya. Pemilikan kepunyaan Allah itu haruslah senantiasa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang bertalian dengan hak pemilikan serta menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan Allah.

Islam tidak menghambat manusia dalam mencari harta-benda betapapun banyaknya asal saja tidak liwat cara-cara yang haram. Malah kita seolah-olah disuruh: jadilah kaya sekaya-kayanya. Sebab Islam dalam hal kehidupan kebendaan ini tidak takut kepada orang-orang kaya, karena mereka toh telah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat harta untuk apa yang dinamakan kaum tak berpunya.

Dalam hal pemilikan harta-benda ini, Islam memberikan dua macam jalan, yaitu :

1). dengan jalan berusaha dan bekerja, tanpa penipuan dan penganiayaan, karena ini membahayakan individu dan masyarakat, malah negarapun juga.
2). dengan jalan pemberian hibah, hadiah, wasiat, atau pembagian pusaka (warisan). Ini adalah jalan yang tidak ada usaha dan karyanya.

V. Kehidupan keluarga

Pun kehidupan keluarga sangat diperhatikan oleh Islam sehingga karenanya telah sejak semula Muhammad SAW membawa peraturan dan hukum nikah, talak, rujuk, dan lain-lain sebaginya. Pembangunan kehidupan keluarga ini telah dilakukan oleh Nabi terutama sekali karena dewasa itu cara-cara pembangunan keluarga telah rusak. Tidak menentu lagi siapa yang boleh dikawini dan siapa tidak. Malah tidak jarang terjadi dewasa itu orang yang kawin dengan anaknya sendiri yang kini terkenal dengan sebutan incestum.

Dalam hal pembangunan keluarga ini saya kira kita semua sudah mengetahui bagaimana Islam menetapkannya.

VI. Kehidupan masyarakat

Akhirnya sampailah kita pada pembangunan masyarakat. Juga masyarakat harus dibangun dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan menggunakan prinsip musyawarah dan muwafaqah dan menjaga kedaulatan rakyat itu dengan sebaik-baiknya. Maka melihat kepada pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Rasulullah semasa hayatnya dan kemudian diteruskan oleh para pengikutnya, terutama para Khalifah Empat yang terkenal itu, jelaslah kelihatan bahwa pembangunan kita sekarang ini lebih kurang adalah sama dalam sasarannya, walaupun berlainan dalam formulasinya. Di negara kita Republik Indonesia yang kita cintai dan berlandaskan Pancasila ini, dan UUD '45, Presiden kita telah berulang kali menegaskan bahwa pembangunan kita sekarang ini bukanlah pembangunan material belaka, tetapi adalah juga pembangunan manusia seutuhnya. Dan manusia itu adalah satu kesatuan jiwa dan raga. Ini berarti bahwa bersama dengan pembangunan material itu Pemerintah kita juga akan melakukan pembangunan yang bersifat mental-spiritual, yaitu pembangunan Iman, pembangunan Martabat Manusia dan pembangunan kehidupan mental, disamping pembangunan-pembangunan lainnya.***

PROSPEK EKONOMI Dalam PELITA III

(Secara Umum)

Oleh DR. H. Husein Kartasasmita

MESKIPUN jalan untuk mencapai tujuan "**Masyarakat yang adil dan makmur**", berdasarkan Pancasila, nampaknya masih jauh dan penuh dengan berbagai macam rintangan, namun tujuan baik itu sendiri, hendaknya jangan sampai terlepas dari **pandangan, akal sehat**, dan **pegangan idieel** mapun **rieel Rakyat dan Pemerintah Indonesia**, yang dapat kiranya menjadi kabur, karena terlalu kompleknya persoalan-persoalan praktis dan taktis yang harus dipecahkan, dan terlalu banyaknya pilihan yang harus dihadapi negara dan bangsa dalam perjalanan yang timbul secara mendadak, maupun karena berbagai effek pokok, maupun sampingan yang tak terduga. **"Janganlah hendaknya tidak terlihat lagi sama sekali tamannya, karena beraneka ragam bunga-bunga dan tumbuh-tumbuhan di dalamnya"**.

Pembangunan **ekonomi dan moneter** negara Indonesia, sebagai suatu bagian dari masyarakat dunia bebas, memang tidak terlepas dan tidak akan terlepas dari pengaruh negatif, maupun positip konjunktur Internasional, apalagi dengan terus meningkatnya pergaulan dan lalu lintas antar negara dan manusianya yang dirangsang dengan pesat majunya teknologi dalam bidang telekomunikasi, dan lain-lain sebagainya.

Tetapi secara idieel, pergaulan antar negara, **tidak** dengan sendirinya mengharuskan negara-negara yang **kuat ekonominya** maupun **persenjataannya**, bahkan secara idieel, adalah menjadi suatu panggilan suci dari negara kuat dan mampu serta manusianya, untuk mengamalkan segala kemajuan dan kekayaannya itu, guna usaha mewujudkan dunia yang makmur dan adil secara merata.

Tetapi dalam kehidupan internasional yang berlaku, kita sering melihat dan menyaksikan kenyataan yang **tidak selalu** sejalan dengan panggilan suci tersebut di atas, dan perobahan/tindakan/sikap ekonomi di satu negara, sering pula bertentangan dengan kepentingan negara lain, dan lain sebagainya.

Dengan tidak usah mengurangi perhatian kita pada perkembangan ekonomi dunia internasional di satu pihak, dan dengan menyadari kenyataan yang berlaku, maka dalam masyarakat Indonesia sendiri, hendaknya **hidup secara nasional**, sema-

ngat ekonomi pembangunan yang berpangkal pada pemikiran **"Terciptanya pembangunan ekonomi oleh-dari-dan untuk-Bangsa Indonesia**, sehingga **dapat melahirkan rasa percaya pada diri sendiri dan rasa harga diri nasional yang wajar, tetapi mendalam** dengan tidak usah mengganggu hubungan baik antar negara dan bangsa.

Menurut hemat kami, semangat nasional ini dapat dijadikan salah satu faktor pendorong effektif yang lebih hidup dan rasa bangga membangun, dalam melaksanakan Pelita-Pelita selanjutnya, karena dapat memberikan harapan dan kesadaran pada rakyat secara langsung **untuk apa** dan **untuk siapa** kita ini **membangun**, dan **masyarakat tidak menjadi kecil hati** atas effek sampingan yang bersifat sementara, dimana secara phisik terlihat bahwa usaha-usaha besar, sedang, maupun kecil, khususnya dalam bidang ekonomi, **belum ditangani sepenuhnya oleh manusia Indonesia sendiri**. Sebagian besar, bangsa Indonesia masih saja tergolong pada golongan konsumen, sebagai suatu golongan sasaran dalam dunia usaha yang **liberal** dan **ekspansionis. Orientasi pembangunan** yang hanya menuju pada pemenuhan kebutuhan rakyat banyak sebagai **obyek/sasaran**, tetapi kurang berorientasi dalam pemenuhan kebutuhannya itu sendiri, menurut hemat kami, **tidaklah lengkap** dan **kurang selaras** dengan **cita-cita bangsa Indonesia** dan **tuntutan jaman dilihat dari sudut nasional**, maupun **internasional**, maupun dari **sudut religius** maupun **kerakyatan,** Oleh karena itu, maka suatu bangsa yang cerdas dan ingin maju secara cerdas dewasa, harus mampu melihat dan melaksanakan suatu program nasional itu, secara suatu keseluruhan dan tidak secara berkeping-keping, yang terlepas satu dari lainnya, betapapun tingginya nilai kepingan itu !

Pelita III yang kita masuki, adalah lanjutan dari Pelita-Pelita sebelumnya. Dalam Repelita I dan II sasaran, menurut keterangan terutama ditujukan pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bidang pertanian tidak nampak pesat majunya, sedang bidang pertambangan, khususnya perminyakan menanjak dan menonjol sekali untung yang diperoleh dari kenaikan harga minyak dan akibat konjunktur tinggi dari bahan-bahan export traditional yaitu : karet, kopi, kayu dan lain lain, khususnya dalam Pelita II, sedang Pelita III, menurut themanya sasaran akan lebih ditujukan pada **Perataan/Pemerataan, yang memang sudah dari semula diharapkan masyarakat luas**, bukan saja oleh bangsa Indonesia, tetapi demi keamanan dan stabilitas, juga diharapkan oleh dunia internasional, disamping motif, busines yaitu diantaranya, guna pelemparan hasil-hasil produksi (over produksi) dari negara negara industri.

Bayangan, betapa besar negara Indonesia untuk pemasaran barang-barang hasil industri luar negeri, apabila dengan besarnya jumlah penduduknya, juga ditunjang oleh kemampuan daya belinya, yang lebih besar dan meluas secara merata. Kita, sebagai Bangsa yang berakal, hendaknya dapat melihat hubungan dan pertalian berbagaimacam bantuan negara industri pada negara-negara yang sedang membangun dari sudut ini pula. **Akhirnya negara negara Industri toch menuju pada titik "Trade"** dan bukan "AID". Pembayar pembayar pajak beberapa negara industri, sering mengeritik Pemerintahnya, perihal kebijaksanaan, bantuan pada negara negara berkembang. Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka sering para kritikus ekonomi negara negara berkembang, dalam kritik yang pedas menyatakan, bahwa perkembangan dan kemajuan ekonomi disuatu negara kecil, indentiek de-

ngan kemajuan perusahaan internasional dan multinasional di negara itu, tetapi tidak sejalan dengan kemajuan pengusaha pribumi dan rakyat di negara itu sendiri.

Memang jika semua aktivitas dan kreativitas dalam bidang ekonomi itu sepenuhnya diserahkan pada perusahaan besar-besar, internasional dengan berbagai cabang cabangnya, maka **pertumbuhan ekonomi akan cukup tinggi**, tetapi **perataan akan merupakan suatu impina belaka**. Itulah sebabnya mengapa dalam pelita yang akan datang, kita harus menyiapkan pemain-pemain ekonomi yang betul-betul mempunyai **cita-cita luhur, keimanan, kesadaran kebangsaan dan mental** yang **kuat**, disamping kwalitas dalam pemikiran pemikiran secara akademis. Masyarakat dapat mengerti perlu adanya tahap tahap dalam usaha mencapai tujuan bangsa, dan memang seorang panglima dan ahli perang, umumnya berpendapat, bahwa untuk mencapai kemenangan akhir, maka direbut terlebih dahulu berbagai bukit dan kubu-kubu pertahanan musuh, dan dikuasai titik-titik strategis dan bilamana itu semua tercapai, maka jalan menuju kemenangan terbuka luas. Dan panglima yang cerdas tentu saja ingin mencapai kemenangan itu dengan pengorbanan pengorbanan yang sekecil mungkin. Tetapi korban dan pengorbanan tidak pernah dapat dihindarkan seluruhnya dalam tiap perjoangan, begitu pula berbagai resiko-resikonya.

Begitu pula halnya dalam melaksanakan pembangunan yang menggunakan jalan dan pilihan menuju dari satu ke lain sasaran, menurut urutan kepentingan dan waktu yang direncanakan, yaitu Stabilitas nasional pada Pelita ke I terlebih dahulu kemudian pertumbuhan ekonomi yang didukung sepenuhnya oleh stabilitas keamanan itu sendiri, mau tak mau menimbulkan effek-effek sampingan dan mungkin luka-luka kecil pada bagian-bagian yang lemah atau pada bagian-bagian yang lain yang untuk sementara dalam tahap Pelita I dan II itu terpaksa ditinggalkan. Akibat sampingan dan luka-luka kecil itu yang diketahui, justru disebabkan, karena bobotnya sasaran-sasarannya diwaktu yang lalu, terlalu ketat tekanannya pada dua unsur tersebut dan betapa kecilnyapun hendaknya di inventarisir, dan kemudian diobati, hingga sembuh, dan dijaga jangan sampai menjadi inpeksi yang berbahaya bagi seluruh tubuh. Alasan-alasan praktisnya dalam menanggulangi effek-effek sampingan adalah karena diantara sasaran yang tidak sempat tertangani secara intensif dan luas, adalah soal **berbagai pemerataan**, yang justeru sekarang menjadi atau dijadikan sasaran utama, dalam Repelita III, untuk memenuh tuntutan dan kebutuhan jaman, yang senantiasa menjadi universil. Perataan dan Pemerataan, secara politis, sosial dan kemanusiaan kini dikumandangkan Pidato Presiden Suharto di depan DPR tanggal 8 Januari yang lalu, sebagai pengantar RAPBN 1979/1980, tepat pula kalau disebut pengantar PELITA III, tersimpul di dalam-dasar-dasar yang penting, disamping memuat pula pengakuan, bahwa dana guna pembangunan, **dibayangi oleh situasi ekonomi dan perdagangan dunia yang tidak menentu** (labil).

Harga minyak masih **"membeku"**, deposit menurun dan oleh karena sedari dulu hingga kini **"income utama"** Indonesia, adalah dari hasil minyak, sekarang harus dicari di luar minyak. Presiden Suharto menganjurkan penghematan-penghematan dan hidup sederhana. **"Arah pembangunan"**, yang dikemukakan Presiden Suharto itu, yang dikenal dengan julukan : **Delapan Jalur Pemerataan** yakni :

1. Pemerataan kebutuhan pokok rakyat.
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan
4. Pemerataan kesempatan kerja
5. Pemerataan berusaha
6. Pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya menyangkut generasi muda dan peranan wanita.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah Tanah Air.
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Presiden Suharto menandaskan pula, bahwa **masyarakat adil dan makmur**, berdasarkan Pancasila, diharapkan **tercapai setelah Repelita VI**. Bilamana para cerdik pandai dan pelaksana dapat mengembalikan persoalan-persoalan yang ruwet pada adanya tahap-tahap dalam pembangunan, maka masyarakat luas sering menitik beratkan persoalannya pada faktor waktu dalam hal mencapai sesuatu hasil yang dapat terasa sebagai kemajuan atau perbaikan. Masyarakat ingin hasil tercapai dengan lebih cepat, dan jalannya menuju ke hasil itu sendiri, tidak boleh terlalu jauh dari gambaran babak akhir dari perjoangan.

Adanya kenyataan, masih atau makin lebarnya jarak pemisah antara kaya dan miskin, antar pribumi, non pribumi dan asing dan antar berbagai golongan bangsa sendiri antar kota dan desa dan lain sebagainya, yang timbul dalam atau karena pembangunan, dirasakan sebagai suatu hal yang bertentangan dengan usaha pembangunan itu sendiri dan juga sebagai hambatan atau aral yang melintang dalam perjalanan mencapai masyarakat yang adil dan makmur itu. Para ahli tertentu dapat melihat keadaan itu dari segi dan waktu/tahap pembangunan yang sedang berlaku dan berjalan, yaitu dalam tahap, dimana dikehendaki **pertumbuhan ekonomi yang tinggi** dan dimana **theori market forces** dan **strategi fund raising** dan segala macam teori yang baru-baru, sebagai **applied science, sedang berkembang**, sehingga pertumbuhan materiëel yang **tidak seimbang** itu, dianggap sebagai hal yang tidak **membahayakan**, bahkan menunjang pertumbuhan ekonomi secara **"market ekonomy**, dus menunjang pembangunan.

Dalam menangani alam pikiran di atas, kami mempunyai penuh kepercayaan dan keyakinan, setidak-tidaknya keyakinan kami **tidak** akan begitu meleset, bahwa para pembesar dan petugas dalam pemerintahan, secara jujur mempunyai pendapat, baik (pernah) di ucapkan, maupun di dalam hatinya, bahwa sifat sampingan yang **dinilai negatip**, adalah antara lain sikap-sikap **mental** yang **mementingkan materialisme, egoisme** dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan perjuangan Bangsa Indonesia. **Ego centrisme** dapat mendorong orang untuk pembentukan kekuasaan lingkungan (machtsvorming) ekonomi tersendiri, dan merangsang **soloactivitas** yang tinggi pada golongan tertentu disatu fihak, tetapi dilain pihak menimbulkan kelesuan dan sikap mental yang apatis terhadap aspirasi baik dari Bangsa dan Negara.

Dalam pada itu, secara jujur, hendaknya disadari, bahwa dalam memasuki Pelita III ini, sesungguhnya stabilitas yang sempurna dan mantep belum tercapai sepenuhnya, begitu pula halnya dengan keadaan ekonomi, khususnya ekonomi sosial Bangsa kita, sehingga dalam peraktek ketinggalan stabilitas dan pertumbuh-

an itu, tetap akan merupakan."tagihan" yang berbunga atas bunga" disamping sasaran-sasaran yang lebih berat, dalam penunaian tugas-tugas Bangsa, yaitu sasaran pemerataan.

Hemat kami, sesungguhnya dalam pemikiran dan strategy Pembangunan, kami lebih condong, bilamana dasar TRILOGI yang dikemukakan oleh Presiden Suharto, diterapkan dari permulaan Pembangunan, mengingat bahwa tiap Pembangaunan itu memang secara minimal harus memenuhi persyaratan TRILOGI yang seimbang. Bilamana equilibrium atau keseimbangan di antara ketiga unsur TRILOGI itu hilang, atau salah satu menguasai yang lain, maka akan timbul hal-hal yang effek-effeknya tidak akan terhenti pada satu titik saja.

Kami masih yakin akan kebenaran dasar pemikiran klasik dalam hal pembangunan ini, yaitu bahwa :

PEMBANGUNAN harus serasi dengan aspirasi sosial masyarakat (social gewenst)

PEMBANGUNAN harus dapat dipertanggung jawabkan secara politik (Politk (Politik verantwooru)

PEMBANGUNAN harus dapat menguntungkan ekonomi/kesejahteraan rakyat banyak (Ekonomis uitvoerbaar/feasible)

Diantara persyaratan minimalnya, dalam Stabilitas, hemat kami adanya **Human dan natural resources dalam proporsi yang wajar**, dan adanya **Pemerintahan yang berwibawa dan jujur/adil**. Kami sadar, bahwa dengan majunya dan berkembangnya berbagai pemikiran dan pengetahuan modern, berkembang pula dan meningkat pula keinginan dan persyaratan bagi Bangsa, yang ingin dinyatakan maju, tetapi yang terpenting bagi masyarakat, adalah tercapai dan terasanya hasilnya secara nyata, daripada menuju berbagai keinginan yang untuk sementara, bersifat mercu suar, **tetapi pada waktunya akan dapat dicapai pula, setelah langkah-langkah awal dapat berhasil dilalui Bangsa dengan selamat**. Dan usaha pembangunan menurut **versi klassik** tersebut di atas, **belum** dapat dinyatakan berhasil, jika pembangunan itu sendiri, **tidak** menghasilkan bertumbuhnya atau menaikan **daya beli rakyat**, banyak, dan bilamana masih adanya dan terus bertumbuhnya angka penganggur-an di luar proporsi yang dapat dipertanggung jawabkan secara sosial. Dalam Pembangunan dari oleh dan untuk Bangsa sendiri, maka tehnologi yang hendaknya diterapkan, adalah teknologi yang mulai dikenal dengan sebutan **"Teknologi tepat guna"**, yaitu dari awal tahap pembangunan itu sendiri. Namun demikian, selama kita masih berani mengaku dan belajar dari kelemahan dan kesalahan kita di waktu yang lalu, maka penetrapan "Teknologi tepat guna" itu, tidak terlambat, hanva realisasinya akan lebih berat dan kompleks daripada bila dilaksanakan dari semula.

Dengan pembangunan Pelita I dan II yang diakui menomer duakan berbagai kepentingan, maka salah satu akibat yang **terasa kini** dan mungkin di waktu yang mendatang, adalah **mahalnya dan sukarnya mendapat kritik yang jujur dan pengawasan masyarakat yang serius dan bermutu**, sedangkan perencana yang baik dan pelaksana yang cerdas dan berakal memerlukan kritik dan kontrol yang berguna secara terus menerus, sebab **seorang ekonoom yang baik harus dapat memelihara** equilibrium dalam suasana dan cuaca yang berlaku dan berobah-obah. Dan fungsi negara, menurut para teknokrat adalah, justru merupakan perencana dan, pelaksana (digaris terdepan), untuk mana, ia harus pandai menangkap isyarat keinginan serta cita-cita yang hidup masyarakat.

cita-cita yang hidup dalam masyarakat.

Bilamana kami diatas mengemukakan hal-hal yang bersifat umum, walaupun dilihat dari perencanaannya, bahwa untuk Pelita III :

a. Induk rencananya tersedia
b. Keuangannya tersedia
c. Aparaturnya tersedia.

toh masih timbul pertanyaan : "Sampai seberapa jauh Pelita III itu dapat memberi harapan pada Masyarakat banyak?" Dalam hal ini, kami secara umum pula, ingin mengemukakan, bahwa dengan ditempatkannya unsur Pemerataan yang sama tingginya dengan unsur Stabilitas dan unsur Pertumbuhan, maka bilamana pelaksanaannya dijiwai hati yang bersih, maka, Insya Allah pembangunan dapat berjalan dengan perasaan lebih aman dan tenteram bagi rakyat yang ingin membangun rumah tangganya sendiri dengan niat yang baik dan dengan amal saleh.

Untuk itu maka para pemuka Islam, hendaknya turut dalam ihtiar mengusahakan mempertinggi daya kreativitas, mengarahkan dan membimbing serta pula turut menciptakan iklim yang mendorong umat Islam yang berbakat dan berkemauan, untuk menjadi subyek yang hidup dan bukan semata-mata menjadi obyek dalam kegiatan pembangunan pada Pelita III dan berikutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala usaha baik ummatnya, dan dijauhkan kita sekalian dari sikap dan usaha yang tak berguna dan membawa siksa. A m i n.

KERJA SAMA TEHNIK DAN INDUSTRI DIANTARA NEGARA-NEGARA ISLAM

Dalam bulan Februari ini di Lahore (Pakistan) akan dilaksanakan suatu konperensi tingkat tinggi menteri-menteri untuk membicarakan tentang sua - tu sistem kerja sama antara negara-negara Islam dibidang tehnik dan industri.

Direncanakan konperensi tersebut akan diikuti oleh sejumlah 42 negara Islam yang berlangsung selama 4 hari dan akan dibuka sendiri oleh Presiden Pakistan Muhammad Ziaul Haq.

Dalam suatu sidang komisi ekonomi pertama dikalangan anggota-anggota Konperensi Islam bulan Januari 1977 telah diterima suatu usul bagi penyusunan bentuk-bentuk konkrit kerja sama dikalangan negara-negara Islam.

Dalam sidang kedua di Mekkah komisi telah melakukan peninjauan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dan mengeluarkan rekomendasi untuk mencapai kemajuan lebih lanjut.

Konperensi di Lahore nanti selain akan dihadiri oleh negara-negara Islam juga akan turut serta organisasi-organisasi dan badan-badan khusus yang bertalian dengan pembangunan negara Islam seperti misalnya Bank Pembangunan Islam, Liga Arab, Dana Kuwait bagi pembangunan ekonomi Arab, organisasi Persatuan Afrika, Kamar Dagang dan Industri Islam dan Komisi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan.

Pembangunan
MASYARAKAT DESA
SEBAGAI UNSUR KETAHANAN NASIONAL

Oleh Letjen TNI Pur. Soedirman

I. Pembukaan/Pengantar.

1. Penyajian subyek di atas berdasarkan suatu pemikiran dasar bahwa : Bangsa Indonesia yang telah berjuang, merebut kemerdekaan dan mempertahankannya, dituntut agar secara konsekwen mengisi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia dengan Pembangunan Nasional, seperti yang dinyatakan di dalam Pembukaan UUD '45, serta batang tubuh UUD '45 itu. Pembangunan Negara tidak mungkin dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, apabila tidak ada stabilitas Nasional yang mantap dan dinamis; dan stabilitas Nasional yang demikian baru bisa dikerjakan apabila telah tersusun dengan baik Ketahanan/Keamanan Nasional. Tetapi sebaliknya Negara tidak mungkin hanya tenggelam di dalam masalah Ketahanan/Keamanan Nasional, tanpa memperhatikan kepada pembangunan Nasional. Disinilah perlunya SENI KENEGARAWANAN, sehingga mampu memperpadukan secara serasi, antara tuntutan Ketahanan/Keamanan Nasional dengan Pembangunan Nasional.
2. Berbicara tentang perlunya Pembangunan Nasional yang memadai sebagai sendi Ketahanan/Keamanan Nasional, tidak mungkin Pembangunan tersebut disulap, tetapi memerlukan ambegparama-arta secara tepat, hal mana yang memerlukan suatu seni tersendiri. Karena lebih dari 80% rakyat Indonesia bermukim di pedesaan, maka demi suksesnya pembangunan yang merata, pembangunan harus mengutamakan pembangunan pedesaan, yang telah ditetapkan dengan suatu sistim, yaitu sistim Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), sehingga akhirnya akan terdapat ribuan jumlah UDKP di seluruh tanah air.
3. Berpangkal tolak kepada pemikiran, bahwa di dalam membangun ribuan UDKP tersebut, memerlukan suatu ambeg paramarta juga, yaitu membuat proyek-proyek Perintis UDKP yang dibangun secara wutuh dan lengkap menurut konsepsi Pemerintah; proyek UDKP tersebut akan mempunyai fungsi berganda. Di dalam mengikuti perkembangan pembangunan Nasional kita ini, saya berkeyakinan bahwa disinilah letak problema utama, mengapa sampai memasuki Pelita III ini belum nampak adanya program yang berupa proyek-proyek Perintis UDKP. Di sinilah yang menjadi inti harapan dari naskah ini, agar masalah proyek perintis UDKP dijadikan salah satu topic.

*) Disampaikan pada Panel Diskusi tentang Pembangunan masyarakat Desa yang diselenggarakan MUI pada tanggal 20 – 21 Januari 1979.

II. Warga Negara dengan pembelaan Negara.

4. UUD '45 bab XII pasal 30 (1) menegaskan :
"Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara". Pasal ini sudah jelas, sehingga tidak memerlukan lagi penjelasan, "demikianlah bunyi penjelasan di dalam UUD '45". Oleh karena itu setiap Warga Negara Indonesia, dituntut turut berusaha mengatur pembelaan Negara, sehingga terwujudlah Ketahanan/Keamanan Nasional.
5. Lemhanas telah merumuskan bahwa :
Agar Ketahanan/Keamanan Nasional dapat terjamin, maka diperlukan adanya DAYA TAHAN MASYARAKAT. Sedang daya tahan masyarakat itu bersumber dari unsur-unsur POTENSI MASYARAKAT yang menyebabkan masyarakat dapat BERTAHAN, dapat KUAT MENDERITA dan dapat MEMPUNYAI KEULETAN. Kesemuanya itu bersumber kepada :
   a. Unsur alamiyah, yang disebut TRI GATRA, yaitu : (1) letak geografi Negara (2) keadaan dan kekayaan alam (3) kemampuan penduduk.
   b. Aspek sosial, yang disebut PANCA GATRA, yaitu : (1) ideologi (2) politik (3) ekonomi (4) sosial budaya/ agama (5) militer/hankam

Gabungan dari kedua unsur tersebut, TRI GATRA dan PANCA GATRA.

III. Masalah pendidikan dengan Pertahanan Nasional.

6. Apabila TRI GATRA, tersebut ditrapkan di dalam Negara dan Bangsa Indonesia, kita dapat menilai bahwa :
   a. letak geografi Negara Indonesia, sangat strategis, yakni diantara dua Benua dan Samudra, merupakan pusat pertemuan antar bangsa sedunia.
   b. keadaan alam yang sukar dicari bandingannya, oleh Multatuli digambarkan sebagai "pending zamrud yang membujur sepanjang khatulistiwa". alamnya yang kaya raya, mempunyai daya penarik, bagi bangsa-bangsa di dunia, modal yang besar bagi kepariwisataan.

Kedua gatra tersebut dapat merupakan potensi yang positip bagi kejayaan Bangsa dan Negara, tetapi juga dapat membawa akibat yang sebaliknya. Itu semua akan sangat tergantung kepada pembinaan dan pengembangan Bangsa Indonesia itu sendiri, yang tersebut di dalam GATRA KETIGA : KEMAMPUAN PENDUDUK.

Dan, bagaimana nilai kemampuan penduduk tersebut sangat tergantung kepada PENDIDIKAN yang mereka peroleh, baik pendidikan dengan jalur FORMAL maupun yang dengan jalur NONFORMAL/Luar sekolah dan luar keluarga.

Pendidikan, yang di dalam Pembukaan UUD '45 ditegaskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa dan di dalam pasal 31 (1) juga disebutkan : "Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran", karena pendidikan berazaskan seumur hidup, maka setiap orang tua/keluarga dan masyarakat juga turut bertanggung jawab terhadap suksesnya pendidikan.

7. Apabila dihubungkan dengan Ketahanan Nasional, mengingat rumus yang terkandung di dalam unsur-unsur Panca Gatra, maka pendidikan Nasional harus dapat mendidik manusia seutuhnya, meliputi aspek-aspek sosial: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya/agama dan militer/hankam, kesemuanya itu bersumber kepada UUD '45 dan Pancasila. Oleh sebab itu didalam GBHN menegaskan pula bahwa : "dalam rangka melaksanakan pendidikan Nasional, perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat. Di bidang Pertahanan/Keamanan Nasional GBHN menjelaskan : "Pembangunan pertahanan keamanan nasional secara keseluruhan harus dikaitkan pembangunan dalam bidang kesejahteraaan sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang integral daripada pembangunan Nasional".
8. Di dalam memasuki Pelita ke III, yang diawali dengan Tap No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Pemerintah telah berketetapan pula agar Tap No. II tersebut benar-benar menjadi kenyataan, tidak hanya merupakan huruf-huruf yang mati. Sebab itu sejak dari pagi-pagi Pemerintah telah memulai dengan mengadakan penataran bagi Pejabat-Pejabat Negara, sampai ke daerah-daerah secara berkesinambungan, dengan biaya yang cukup besar tentunya. Dengan penataran-penataran tersebut, dengan metoda yang beraneka ragam, diharapkan agar beliau-beliau itu yakin benar, betapa "mutlaknya" Pancasila sebagai dasar Negara. Dan yang penting pula harus berusaha agar tidak ada tangan-tangan kotor yang ingin merubahnya apabila menggantinya dengan falsafah atau dasar Negara yang lain.
9. Untuk tugas yang terakhir itu, yang menjadi permasalahannya, ialah : "Bagaimana cara/metode yang dipakainya, di dalam mendistribusikan apa yang beliau terima selama penataran P4 kepada masyarakat ramai, yang pendidikannya masih rendah, bahkan banyak yang masih buta huruf, kepada mereka yang tingkatan kesejahteraan hidupnya masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Tentunya, metoda yang dipakainya tidak lagi seperti yang dipergunakan di dalam penataran, dengan ceramah, dengan diskusi dan sebagainya. Bagi masyarakat yang masih demikian tingkatan pendidikan dan tingkatan ekonominya, TIDAK/BELUM MEMERLUKAN teori-teori tentang falsafah kenegaraan atau dasar Negaranya. Bagi mereka yang penting bagaimana dapat hidup yang memadai, cukup sandang, pangan dan papan, sehat badannya. Metoda dalam menjual P4 kepada mereka hanya : Bagaimana PENGAMALAN Pancasila di dalam GBHN. Apabila di dalam jangka waktu yang relatip singkat, Pemerintah Orde Baru belum dapat mengamalkan itu semua, kita harus berani menghadapi resikonya, yaitu : Rakyat yang bodoh dan miskin tersebut mudah

terpancing oleh unsur-unsur ekstrim, seperti yang sering kita sinyalir.

10. Pemerintah sendiri telah menginsyafi hal ini, karenanya Pembangunan pedesaan akan lebih memperoleh perhatian : "Perhatian sebesar-besarnya perlu diberikan kepada pembangunan pedesaan TERUTAMA MELALUI PENINGKATAN PRAKARSA dan SWADAYA MASYARAKAT DESA serta MEMANFAATKAN SECARA MAKSIMAL DANA-DANA YANG LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DIPERUNTUKKAN BAGI PEMBANGUNAN PEDESAAN".

    Catatan :
    Kalimat yang ditulis dengan huruf-huruf besar akan memperoleh pembahasan yang khusus.

IV. Pembangunan Desa sebagai sendi Pertahanan Nasional

11. Di dalam GBHN yang telah disebut pada angka 7 di atas, menerangkan : "Pembangunan Pertahanan/Keamanan Nasional secara keseluruhan harus dikaitkan dengan pembangunan dalam bidang kesejahteraan sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang integral daripada pembangunan Nasional". Rumus tersebut tidak lagi dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan : "Sampai berapa jauh kemampuan Bangsa Indonesia, merealisir pembangunan tersebut secara merata, adil dan makmur, sehingga terwujud cita-cita Revolusi '45". Karena kemampuan Nasional yang terbatas, maka pembangunan Nasional kita selalu berdasarkan kepada pemilihan prioritas/ambeg paramaarta, dan di dalam Pelita III pembangunan akan lebih memberikan perhatian kepada pembangunan pedesaan.
12. Apabila kita memperhatikan secara seksama, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembangunan pedesaan itu masih nampak sangat tersendat-sendat. Dari beberapa seminar, lokakarya, musyawarah kerja atau dalam diskusi-diskusi yang lainnya, diketemukan adanya faktor-faktor penghambat, diantara lain :
    a. (1). Adanya kenyataan seperti sekarang, terlalu banyak lembaga/badan pemerintah atau masyarakat yang tugasnya sama atau hampir bersamaan, tidak serasi dan selaras usahanya, dengan berbagai sistim dan menurut aspek tertentu serta dengan pengorganisasiannya sendiri-sendiri, maka menjadi bersifat lebih menghambat dari pada mempercepat proses pembangunan masyarakat desa, dan terciptanya tujuan pembangunan umumnya.

        Maka mengingat fungsi tersebut di atas, pembangunan masyarakat desa sebagai suatu metoda pembangunan, berdasarkan ilmiyah dan dibuktikan kebenarannya dalam pentrapan/pelaksanaan UDKP yang diarahkan sebagai usaha penertiban tata laksana pembangunan pada unit Pemerintah yang terendah (Desa) yang menjadi satu tata laksana pembangunan dengan sistim yang baik di bawah kepala Daerah, Camat dan Kepala Desa sesuai dengan tingkatannya. Dengan demikian akan dapat dicapai hasil yang besar dan nyata. (S.K. Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 1969).

(2). Di dalam sinyalement tersebut nampak jelas, perlunya ada "Kiss" dari semua instansi Pemerintah serta masyarakat yang bergerak di dalam pembangunan pedesaan. Pemerintah telah memberikan jawabnya, yaitu perlunya ada sistim UDKP, yang dengan UDKP itu diharapkan mempunyai fungsi yang berganda, yaitu : (1) sebagai proyek riset. (2) sebagai training centre (bagi petugas pembangunan, Kader pedesaan dan lain sebaginya). (3). sebagai daerah percontohan (4) sebagai penertiban sistim pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa.

b. (1). Pemerintah mempunyai peranggapan bahwa potensi dan swadaya di pedesaan dapat diharapkan cukup mampu membangun Desanya-pembangunan yang wutuh dengan bantuan-bantuan Pemerintah seperti telah diberikan (lihat angka : 10).
Peranggapan tersebut SANGAT BERKELEBIHAN, melihat pendidikan mereka.

(2). Otak mereka tidak sampai untuk memikirkan masalah-masalah hidup dan kehidupan ini, tidak mungkin dapat merumuskan apa yang menjadi cita-cita hidup ini, tidak tahu apa itu idealisme. Apabila tahu, tidak sampai akalnya memikirkan bagaimana cara-cara untuk mencapainya. Biasanya mereka menjadi orang yang menyerah kepada keadaan, menyerah kepada takdir/fatalisme, tidak mempunyai semangat ihtiar. Hanya, apabila mereka ketemu dengan orang-orang yang menjalankan gerakan-gerakan subversi, mereka merupakan tanah yang subur. Mereka mudah dibakar, termakan untuk menerima hasutan bahwa sumber kesulitan, kemiskinan, tidak adanya keadilan sosial dan sebagainya adalah : dasar negara, yaitu Pancasila. Disinilah mereka dengan mudah diajak mengadakan pemberontakan atau yang semacam itu. Dan tidak saja pertahanan Negara yang goyah-goyah, tetapi dasar Negara kita : Pancasila-pun dapat terancam. Masyarakat pedesaan yang masih demikian tingkatannya, mudah dibawa oleh pemimpin-pemimpinnya, dengan pengertian yang positip maupun yang negatip baik pemimpin formal maupun yang informal. Berdasarkan analisa tersebut, maka pembangunan pedesaan memerlukan Pimpinan dari luar, yang berupa dana dan daya. Begitulah salah satu inti uraian Sdr. Does Sampurna MD MPH, sekretaris Executip Proyek Pedesaan U.I. di dalam naskahnya tentang : Universitas Indonesia, proyek pedesaan - yang diistilahkan "rural community development".

V. Pembangunan pedesaan harus ditopang dengan suatu pendidikan "Kedesaan".

13. Pada bagian akhir dari pembukaan/pengantar naskah ini dinyatakan bahwa: masalah proyek perintis UDKP supaya dijalankan salah satu TOPIC. Pembangunan pedesaan tidak mungkin hanya diserahkan kepada potensi yang ada di tempat, tetapi harus bersumber/diimport dari luar, termasuk pelaksanaan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI dan Jawatan serta Dinas dimana proyek perintis tersebut diadakan secara INTERDISIPLINER, tidak boleh lagi secara sektoral.

14. Betapa liku-likunya pembangunan pedesaan, akan dikutip beberapa bagian dari uraian Sdr. Does Sampurno MD. MPH. di dalam naskahnya : "Pelaksanaan proyek pedesaan ini - proyek Universitas Indonesia - ditangani secara pusat dan DI KETUAI LANGSUNG REKTOR U.I.

Pembangunan masyarakat dapat diartikan sebagai :
- suatu proses perobahan dari kehidupan tradisional masyarakat pedesaan kearah kehidupan yang lebih progresip, yang penekanannya adalah perobahan sosial dan psychologis.
- suatu program untuk menyelesaikan suatu aktivitas yang berhubungan dengan kesejahteraan dari masyarakat pedesaan, yang penekanannya kepada aktivitas dibidang program pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya.
- suatu metoda dengan mana masyarakat dapat membantu dirinya sendiri dengan kapasitas dan sumber-sumber yang mereka miliki yang penekannya kepada tujuan akhir yang hendak kita capai.
- suatu gerakan kearah kemajuan dengan maksud-maksud tertentu, yang penekannya kepada idea yang mendasari gerakan itu sendiri.

15. Uluran tangan dari luar, tenaga dari Jawatan dan Dinas serta Perguruan Tinggi, akan dimulai dari pembuatan Pola pembangunan pedesaan/design, bagaimana pembangunan itu akan disusun, yang meliputi segala aspek kehidupan secara interdisipliner. Kemudian mengajak masyarakat setempat melalui pendidikan penyuluhan-terutama dalam pelaksanaan konsep pembangunan tersebut di dalam fase ini juga dapat disertakan Kader-kader pembangunan dalam tingkatan tertentu, dimana proyek tersebut dibuat. Dengan demikian maka jelaslah kiranya bahwa pembangunan pedesaan harus ditopang dengan suatu **pendidikan untuk pembangunan masyarakat desa**, yang dewasa ini diistilahkan : PENDIDIKAN KEDESAAN, yaitu : sistim pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan, ketrampilan, dan kesadaran bernegara bagi seluruh warga negara Indonesia, yang khususnya difokuskan pada desa, manusia dan lingkungan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Berdasarkan itu segala usaha pembangunan dan pendidikan kedesaan harus terjalin dalam hubungan yang saling menunjang. Pengertian kedesaan menunjukkan kepada sifat ekosistim, manusia dan lingkungannya, sedangkan pengertian pedesaan lebih menunjuk kepada lokasi (rumusan Lokakarya Nasional pendidikan untuk pembangunan Desa di Yogyakarta).

Pada akhir-akhir ini, terdengar suara-suara yang positip dari beberapa organisasi dan lembaga Pendidikan, perlunya ada Proyek-proyek perintis UDKP demi lebih terwujudnya pemerataan Pembangunan :

a. Majelis Ulama Indonesia di dalam Raker Nasionalnya pada tanggal 15 — 18 Oktober 1978 salah satu keputusannya menyatakan :
Menganjurkan kepada Pemerintah untuk membentuk Proyek PERINTIS

UDKP disetiap Propinsi dengan mengikut sertakan Generasi Muda, Mahasiswa dan unsur Perguruan Tinggi sebagai kader pembangunan.

b. Gerakan Pramuka di dalam Munasnya di Bukittinggi baru-baru ini juga membuat keputusan yang senada dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia. Bahkan telah menjadi Pendukung Pemerintah Kabupaten Tanggerang/Jawa Barat yang sedang membuat proyek perintis UDKP di Kecamatan Sepatan/ Tanggerang.

c. IKIP Bandung di dalam seminarnya : "Peranan Lembaga-lembaga Pendidikan dan Guru dalam Pembangunan masyarakat Desa pada tanggal 5 – 8 Desember 1974 di Bandung", salah satu keputusannya, menyatakan :
Oleh karena pembangunan suatu masyarakatsecara integralmenyangkut berbagai sektor kehidupan, maka pendekatannya bersifat interdisipliner, sehingga perlu ditangani oleh suatu team yang mewakili berbagai perguruan tinggi, sesuai dengan bidang disiplin yang diperlukan.

Sebagai Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga, yaitu " pengabdian masyarakat" IKIP mengusulkan dilaksanakannya suatu proyek perintis, yang disebut "Proyek Perintis Pendidikan Pembangunan Masyarakat Desa", disingkat P4MD yang sekaligus merupakan proyek percobaan dan proyek penelitian-penelitian sebagai suatu "Action Research Project". Proyek tersebut akan mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1). suatu usaha nyata bagi IKIP untuk secara langsung membangun masyarakat desa melalui pendidikan sebagai realisasi dharma "pengabdian masyarakat".
2). suatu usaha kerjasama antara berbagai perguruan tinggi untuk mengembangkan beberapa masyarakat desa;
3). sebagai suatu proyek "action research", yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pengembangan berbagai masyarakat desa lainnya, sehingga disini terjalin hubungan yang erat antara ilmu dan pembangunan (pengamalan ilmu);
4). sebagai wadah integrasi antara pendidikan, penelitian dan pembangunan.

BURUH-BURUH DAN PEGAWAI-PEGAWAI DI JERMAN MENDAPATKAN LIBUR HARI-HARI BESAR ISLAM

The Federal Association of German Employers (Perserikatan Pengusaha-Pengusaha Jerman) telah menyetujui untuk memberikan kelonggaran dan libur kepada buruh-buruh dan pegawai-pegawai Muslim untuk menunaikan ibadah agama mereka pada hari-hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Keputusan mengenai kelonggaran kerja untuk hari-hari besar Islam ini disiarkan oleh Islamic Cultural Centre, Cologne, Jerman Barat. Dalam siaran itu disebutkan bahwa Pengurus Perserikatan Pengusaha-pengusaha Jerman akan memberitahukan kepada anggota-anggotanya akan keputusan ini untuk dilaksanakan bila pegawai-pegawai dan buruh-buruh Muslim mereka meminta kelonggaran itu. Seperti diketahui banyak orang-orang Islam terutama dari Turki, Aljazair dan Pakistan yang bekerja sebagai buruh musiman di Jerman. (Dawn / INS).

DESA DAN KETAHANAN NASIONAL

Oleh KH.E.Z.Muttaqien

I. Indonesia Dan Ketahanan Nasional

Tanah Air kita terdiri dari ribuan pulau, dengan berbagai dialek bahasa,negara yang memiliki pantai yang terpanjang di dunia, lintasan dan persimpangan antar barat dan timur, diapit dua lautan terbesar di dunia, lautan Indonesia dan Pasifik.
Menjaga, memelihara dan membangun negara yang semacam ini memerlukan persyaratan yang lebih dari pada yang dimiliki negara-negara lain, yang telah lebih dahulu memiliki kemerdekaan, terdiri dari satu dialek bahasa dan istiadat, berada disatu daratan dan lain sebagainya.
Karena itulah pembangunan bangsa bertujuan membangun manusia seutuhnya, baik lahiriyah maupun bathiniyahnya.

Disamping kita menghadapi tantangan dari luar, yang secara nyata saat demi saat kita hadapi. Kemajuan front komunis yang agresif di kawasan Asia ini memberi pengaruh yang berarti terhadap perkembangan politik dan stabilitas disetiap negara Asia. Kita juga menghadapi masalah di dalam negeri yang masih dalam penyelesaian.

Angkatan Bersenjata kita telah menyimpulkan ada 5 faktor (1) yang mudah menjadi "pelatuk" untuk menimbulkan suasana tidak stabil.

Pertama : **Adanya berbenturan idiologi**
Kita menyaksikan suatu kenyataan akibat menganut multi party sistim, telah tumbuh beraneka ragam idiologi politik dari berbagai sumber yang mendasar, dengan perbedaan-perbedaan strategis dan taktik terus menerus kentara dalam kehidupan politik kita. Walau orde baru sudah 10 tahun berusaha menciptakan kesatuan lahiriyah dan bathiniyah, tetapi sampai hari ini kita masih melihat kebedaan-kebedaan itu tampak, baik dalam golongan karya maupun partai politik yang ada.

(1) Pangkowilhan II dalam buku Bangsa Bersenjata. Bangsa dan negara kita sedang berusaha keras untuk terciptanya idiologi bangsa yang satu, yang dari dasar dan sumber yang sama.

Walaupun hal ini masih memerlukan waktu yang lama, tetapi kita harus menyadari bahwa komunis merupakan ancaman yang paling besar untuk mempersulit terciptanya kalimat in sawaain (= titik persamaan)

Bahaya komunis lebih dari pada yang lainnya, karena menganut faham komunis tidak merasa perlu mengubah agama.

Kedua : **Pemerintahan yang lemah**

Pemerintahan memegang peranan yang terpenting dalam pembangunan. Karena itu hanya pemerintah yang kuat dan bersih yang mampu melaksanakan segala keputusan legislatip. Betapa baiknya keputusan legislatip yang ditulis dalam GBHN atau Pelita, bila tidak memiliki pemerintahan yang "Cakap kuat dan bersih" tujuan rakyat tidak akan tercapai pada saat yang diharapkan.

Ketiga : **Keadaan ekonomi dan sosial yang tidak baik**

Sebuah sabda Rasulullah yang mengatakan : hampir saja kefakiran dapat menimbulkan kekufuran. Sabda ini sesuai dengan kenyataan bahwa bangsa yang lapar atau bangsa yang memiliki klas yang bertentangan karena ekonomi, sangat mudah untuk diadu-dombakan dan dibawa kepada arus pemberontakan atau penentangan. Karena itu stabilitas nasional hanya dapat dicapai-tarap yang mendekati keadilan.

Keempat : **Perobahan sosial yang tidak tertampung dalam lembaga-lembaga pemerintahan.**

Perkembangan ilmu dan tekhnologi mutaakhir telah mempercepat kesadaran rakyat yang menimbulkan berbagai pandangan terhadap nilai-nilai yang hidup.

Kecepatan perobahan berpikir ini tidak tertampung oleh lembaga-lembaga perwakilan atau lembaga ke ormasan, yang mengakibatkan timbul rasa tidak puas.

Dinamika yang ada pada lembaga-lembaga perwakilan atau pemerintahan tidak lebih cepat dari pada pertumbuhan perobahan sosial. Akibatnya timlah letupan-letupan pada masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Kelima : **Faham agama yang sempit**

Masalah agama sangat mudah sekali untuk "menyalakan" sentimen, karena agama itu merupakan sikap pribadi yang timbul dari lubuk hati yang paling halus. Akan lebih berbahaya bila agama itu difahamkan secara sempit.

Karena itu diperlukan pendidikan agama yang baik dan dihindarkan tindakan-tindakan yang mudah menimbulkan gejolak dalam kehidupan ummat beragama.

Disamping lima faktor ini kami tambahkan beberapa faktor lainnya :

Keenam : **Mental adu domba yang diajarkan komunis**

Walaupun komunis telah tidak ada dan partai komunis dilarang, tetapi mental komunis masih banyak dimiliki manusia-manusia Indonesia. Tujuan menghalalkan segala cara, adalah sikap mental komunis yang banyak dilakukan

manusia zaman sekarang. Karena itu tindakan mengadu domba berbagai kekuatan, menimbulkan rasa curiga satu sama lain, sehingga berhasil menumbuhkan curiga antara muslim dan muslim lagi, adalah satu kegiatan yang dapat melemahkan stabilitas nasional.

Ketujuh : **Kelemahan kesadaran berpolitik dan bernegara**

Kita tidak dapat menjaga setiap rakyat dari berbagai pengaruh yang tumbuh di dunia ini, tetapi kita harus mengusahakan agar kalbu setiap warga negara menjadi benteng untuk pertahanan negara. Benteng pada kalbu rakyat itu dapat tumbuh bila rakyat memiliki kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang baik.

Inilah hal-hal yang sedang dihadapi negara kita pada saat ini. Banyak usaha telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan nasional, baik dibidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Usaha-usaha itu masih akan berkelanjutan dan generasi kini harus mampu mewariskan watak bangsa yang lebih baik dari pada dirinya sendiri.

II. Desa dan Ketahanan Nasional

Kesatuan lingkungan hidup dan budaya bangsa terletak di desa, yang jumlah desa di Indonesia beribu-ribu jumlahnya dan merupakan 81,2% dari seluruh penduduk Indonesia berada di desa.

Negara Republik Indonesia disusun dari berbagai tingkat pemerintahan dan desa merupakan unit pemerintahan terendah. Desa merupakan daerah yang dihuni 81,2 % penduduk Indonesia.

Di desa terletak sumber tenaga ekonomi dan tenaga manusia. Kegoyahan kehidupan di desa akan mudah menimbulkan urbanisasi yang sukar dielakannya.

Sebagai negara kepulauan dan memiliki pantai terpanjang yang tidak mungkin mengadakan penjagaan pantai yang merata dengan menggunakan tenaga tentara atau polisi reguler, tetapi harus dijaga oleh kekuatan rakyat yang berada di desa-desa.

Rakyat desa Indonesia harus memiliki ketahanan nasional yang tangguh, karena memiliki kesadaran : bernegara, berbangsa dan bercita-cita.

Bukan hanya kesadaran tersebut di atas, tetapi juga memiliki kemantapan idiologi, kemantapan ekonomi, sosial budaya dan agama, sehingga dari manapun subversi itu datang, dalam keadaan bagaimanapun mereka menyerang, rakyat selalu dalam keadaan siap siaga.

Usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan desa dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan mulai dari desa biasa sampai menjadi desa swakarya, swasembada, program UDKP sampai menjadi desa Pancasila merupakan usaha-usaha yang positip untuk memajukan desa. Kegiatan ini harus ditunjang dengan langkah-langkah lain yang lebih memasyarakatkan dan sifatnya nasional, agar usaha peningkatan desa dapat dicapai lebih cepat dan lebih merata.

Langkah lain yang harus dilakukan yang dapat menunjang program yang ada

ialah : Langkah itu ada dua bagian.

Yang pertama yang bersifat nasional yang berpengaruh terhadap desa, dan yang kedua sesuatu yang harus ditumbuhkan di desa.

III. Program Nasional yang menunjang Desa

Pertama : **Pendidikan Nasional yang berorientasi ke desa**

Sampai sekarang pendidikan masih berorientasi ke kota. Kesan masyarakat bahwa hanya di kota dapat dicapai kehidupan yang maju, kekayaan dan segala kebahagiaan. Karena itu sejak orang yang berpendidikan SD sampai Sarjana mentalnya tergantung di kota. Hal ini terjadi bukan hanya karena ekonomi kita masih berorientasi kekotaan, tetapi pendidikan kita ditingkat menengah ke atas tidak ada yang berpadu pengajaran dan pendidikannya untuk di abdikan di desa. Ilmu-ilmu yang diajarkan di Perguruan Tinggi masih berarahkah diferensiasi yang tajam antara satu disiplin dengan disiplin lainnya, tidak ada ilmu yang diajarkan berdasarkan **disiplin lingkungan** sehingga setiap pribadi memiliki berbagai hal untuk membangun masyarakat yang kecil seperti desa.

Ketika UNISBA mendirikan Fakultas Tekhnologi Pembangunan Desa timbul kesan bahwa cita-citanya cukup baik bahkan dipuji orang, tetapi untuk mengakui sebagai suatu kegiatan Perguruan Tinggi yang mengarah kepada degree banyak fihak yang tidak berani untuk mengakui, karena belum ada contohnya dalam lembaga Perguruan Tinggi yang tradisionil yang didirikan Pemerintah.

Tetapi sekarang setelah orang berusaha untuk mencarikan pendidikan tekhnologi yang tepat guna barulah diakui bahwa sistim yang kita pergunakan adalah sistim yang dicari untuk mencapai tekhnologi tepat guna yang berorientasi kepada pembangunan yang nyata.

Pada semua Fakultas dan jurusan pada Perguruan Tinggi disamping diajarkan ilmu yang berdasarkan disiplin yang tradisionil, harus pula diajarkan ilmu sosial yang dapat membawa perhatian kearah pembangunan desa.

Masuknya tenaga yang terdidik dalam kehidupan desa, benar-benar membawa arti yang sangat besar. Tenaga BUTSI dan KKN yang berada di desa dalam waktu yang terbatas dan dalam program yang masih sukarela telah meninggalkan kesan yang sangat berarti. Banyak proyek yang dimotivasi oleh para mahasiswa dikerjakan rakyat dengan penuh gairah yang pada waktu sebelumnya sangat sukar untuk menggerakkan rakyat mengerjakan itu.
Mahasiswa KKN yang hanya 3 bulan di desa yang tatkala pergi kedesa dimodali Perguruan Tingginya dengan mental kedesaan yang paripurna, mereka meninggalkan desa diantar rakyat dengan kerinduan, tidak sedikit yang diantar dengan cucuran air mata, sedangkan mahasiswanyapun tertambat hatinya dalam "mencintai Desa".

Dalam melaksanakan program UNESCO untuk melaksanakan perbaikan kampung di kota Bandung dapat dibedakan hasilnya yang digarap mahasiswa yang pendidikannya berorientasi kedesa dan yang berorientasi ke ilmu semata-mata.

Kedua : **Pendidikan Kewiraswastaan**

Sejak proklamasi kemerdekaan tanah air bahkan sejak sebelumnya kita telah bercita-cita akan mendidik bangsa menjadi bangsa yang berdikari, memiliki kepeloporan sanggup menciptakan lapangan/kreatip. Tetapi kenyatannya sampai 30 tahun kemudian pendidikan kita masih belum mencapai sasaran yang kita idam-idamkan sejak awalnya. Pemuda-pemuda mencari sekolah berdasarkan pemikiran lapangan kerja yang disediakan orang lain atau yang diadakan Pemerintah. Kalau mereka berdiri sendiri bukanlah karena dipanggil oleh idealisme yang tinggi, tetapi hanya dipaksa oleh keadaan yang tidak menguntungkan buat dirinya. Beberapa kasus kita pernah menyaksikan seorang sarjana yang telah bekerja di lapangan yang dibina sendiri sudah mendapat keuntungan yang lebih dari pada kalau ia bekerja pada Pemerintah tetapi ketika ada tawaran Pemerintah untuk menjadi pegawai negeri, ia tinggalkan pekerjaan itu dan kemudian ia bekerja pada pemerintah.

Untuk membangun desa diperlukan mereka yang memiliki jiwa kewiraswastaan, jiwa kepeloporan, karena di desa tidak ada yang disebut majikan, baik Pemerintah maupun swasta. Mereka harus menggali lapangan kerja itu, dan pekerjaan dikerjakan dengan semangat kegotong royongan.

Pesantren yang dibangun di desa dan melahirkan kiyai-kiyai yang menyebar di desa-desa. Mereka membangun sendiri, bekerja memimpin bangsa dalam kehidupan yang terendah.

Mereka adalah jumlah yang terbesar yang menjadi pemimpin-pemimpin informal di desa. Padahal Pesantrenpun tidak banyak memberi bekal kepemimpinannya, tetapi telah menghasilkan pemimpin-pemimpin yang dapat memberikan motivasi kepada rakyat untuk membangun dan menjaga negara ini. Pasti akan lebih banyak lagi hasilnya bila kepada para santri diberi bekal yang lebih banyak untuk membangun desa. 70% Pesantren sekarang menempuh sistim PGAA yang bermental Pegawai Negeri, akibatnya produksi Pesantren bertambah kurang. Karena itu kita perlu meninjau kembali langkah yang keliru ini.

Kewiraswastaan yang lahir dari Pesantren supaya dibangkitkan kembali.

Ketiga : **Pemantapan Kebudayaan Nasional**

Perkembangan tekhnologi mutaakhir telah sampai ke desa, walaupun tidak dalam jumlah yang seimbang. Radio dan Televisi, Film dan Majalah yang sampai kedesa membawa budaya luar yang belum dapat disimak rakyat, memberikan pengaruh yang negatip terhadap pertumbuhan kebudayaan nasional yang konstruktip. Budaya yang hanya mengagumi wanita, harus diganti dengan budaya yang dapat mengagumi alam, tumbuh-tumbuhan, binatang dan seantero makhluk Tuhan di bumi ini, sehingga bangsa kita berpadu dengan keindahan alam dan keagungan pencipta–Nya.

Bagaimana mungkin anak muda akan mencintai desa, di desa tidak ada alat-alat kosmetik, tidak ada kegarangan warna. Pemuda lebih tertarik kepada warna yang palsu dan direka, dari pada kepada warna yan asli dan alami.

Budaya bangsa harus mampu mengagumi ciptaannya sendiri yang asli yang dicipta dari kayu dan bambu, dari pada budaya tiruan yang dibuat dari plastik dan sebagainya.

Keempat : **Sosial ekonomi yang merakyat**

Masalah sosial ekonomi adalah masalah yang mudah untuk digunakan untuk mencapai isue politik. Sosial ekonomi yang berat ke atas, karena tidak seimbangnya produksi dan tidak seimbangnya import antara yang akan dipergunakan masyarakat menengah keatas dengan yang akan dipergunakan masyarakat bawahan, mudah menimbulkan kelainan-kelainan sikap. Gairah industri untuk memproduksi segala barang yang terbeli rakyat perlu dihidupkan. Pemimpin dan klas menengah digairahkan untuk dapat memakai produksi yang merakyat. Ketika kain batik dipopulerkan untuk dipakai sebagai pakaian resmi, ternyata pengaruhnya besar terhadap kehidupan sosial ekonomi dan ternyata memakai kain batikpun tidak kalah baiknya dengan memakai wool England. Pemasaran produksi pertanian dibimbing dengan baik sehingga keuntungannya benar-benar dirasakan oleh produsen pertanian, bukan dikeduk oleh distributor, bukan petani sama sekali. Biasakan rakyat memakai kendaraan bus yang termurah dari pada memakai sepeda motor yang membisingkan kota dan memadatkan jalan.
UUD '45 pasal 33 harus dapat terlihat selangkah demi selangkah dilaksanakan

Kelima : **Pendidikan Tekhnologi Pedesaan**
Disamping pendidikan nasional yang berorientasi kedesa, dirasakan perlu juga ada pendidikan tekhnologi yang khusus memberikan ilmu dan sikap yang multi disiplin yang didasarkan kepada lingkungan desa. Calon-calon pemimpin desa yang akan datang harus memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang segala aspek kemasyarakatan dan menemukan petunjuk-petunjuk tekhnologi. Umpamanya : Ia mengetahui berbagai bidang pertanian, kesehatan rakyat, ekonomi desa, dan berbagai-bagai lagi yang menyangkut ekonomi desa, dan pembangunan material maupun spiritual. Lembaga pendidikan yang dirintis UNISBA dengan Fakultas Tekhnologi Pembangunan Masyarakat, adalah dimaksudkan menyiapkan pemimpin-pemimpin desa masa datang, yang lebih terampil dan memiliki kemampuan ilmiyah yang patut.

III. Ketahanan Masyarakat Desa

Yang kami kemukakan di atas adalah faktor-faktor ketahanan desa yang harus ditumbuhkan di kota, Desa akan menerima input dari segala kegiatan dilima langkah tersebut di atas.

Sekarang tibalah saatnya kita meneliti apa saja yang harus kita bina di desa, agar rakyat desa dan masyarakat desa memiliki ketahanan masyarakat yang dapat diandalkan. Disamping langkah-langkah sektor pemerintah yang sekarang telah dimulai perlu masyarakat melakukan langkah-langkah diberbagai bidang, antara lain :

Pertama : **Pendidikan**
Lembaga pendidikan yang ada di desa ialah : Sekolah, madrasah, pesantren dan pengajian-pengajian.

Lembaga-lembaga ini memberikan pendidikan umum dan pendidikan agama yang merata, tetapi belum memiliki pendidikan keterampilan yang sejalan dengan perkembangan ekonomi desa.

Di sebuah desa yang banyak memiliki gunung kapur sebaiknya kepada anak-anak SD klas VI atau madrasah klas VI atau pesantren diberikan pula teknologi kapur dengan sistim managemen, dan pemasarannya, sehingga bila anak tersebut tidak melanjutkan sekolah ia telah memiliki ilmu dasar untuk bekerja dalam industri desa. Ia telah mempunyai dasar pengetahuan mengenai pengelolaan, pemasaran dan managemennya. Anak desa yang tidak melanjutkan sekolah setelah SD mencapai angka lebih dari 50%.

Pesantren harus kembali menjadi sentral kepemimpinan masyarakat desa, karena segala masalah yang tumbuh dimasyarakat selalu kembali ke pesantren. Kepada Kiai masyarakat bertanya : Bagaimana mengobati anak yang sakit, kapan sebaiknya menanam padi. Pantaslah memilih menantu anak sifulan, pertengkaran masalah rumah tangga, penyelesaian warisan, pertengkaran antar warga masyarakat, pilihan lurah mendatang, bahkan dikolam pesantren lah bibit ikan yang baik, pisang pesantrenlah yang dijadikan contoh oleh masyarakat. Jaman keemasan pesantren 40 tahun yang lalu harus dikembalikan dalam versi kemajuan teknologi kurun ini.

Kedua : **Pemahaman Agama**

Akhir-akhir ini mulai kelihatan ada kegiatan yang berusaha menghancurkan agama dengan jalan memasukan faham-faham baru yang bukan berasal faham dari agama itu, sehingga timbul pertentangan dan Ummat Islam sibuk meladeni pertentangan itu.

Lebih-lebih dari daerah yang muslimnya kuat, pertentangannyapun semakin menjadi.
Yang dipertentangkan biasanya masalah remeh-remeh, tetapi dengan masalah itu telah menghabiskan segenap energi dan waktu, sehingga ummat Islam tidak mempunyai kesempatan untuk membangun dan membenahi dirinya, agar dapat berpacu dengan ummat yang lain dalam menciptakan sesuatu yang baik untuk ummat manusia di dunia.

Tambah sederhana pemikirannya tentang agama, tambah mudah untuk dipengaruhi dibawa jalan yang keliru, lebih-lebih bila didasarkan kepada watak insani umumnya, suka kepada kelainan.

Karena itu perlu digalakkan kegiatan untuk meluruskan faham agama serta menghidupkan kaum muslimin untuk mengamalkan agama dibidang kemasyarakatan, agar tidak mudah terkicuh oleh kekuatan-kekuatan yang akan menimbulkan keadaan tidak stabil. Di Indonesia pada hakekatnya tidak ada kebedaan antara berbagai ormas yang ada, baik N.U. maupun Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad dan sebagainya. Semua berpola pikiran menurut pola Imam Syafi'i yang selalu hati-hati dalam menetapkan hukum, dan semuanya mengakui bahwa Al Qur'an dan As Sunnah sumber kaidah yang pertama dan utama. Kebedaannya hanyalah dalam sistim pengambilan hukum. Yang satu menggunakan sistim taraqqy, dari pendapat para Ulama lebih dahulu, terus

berkelanjutan sampai kepada Al Qur'an dan As Sunnah, sedangkan yang satu lagi menggunakan sistim tanazzul, mulai dari Qur'an dan Sunnah kemudian dicocokkan dengan yurisprudensi dengan pendapat para Ulama. Bukanlah mengetahui hadis shoheh itu berdasarkan penelitian Ulama terdahulu.

Bertolak dari pemikiran demikian, maka sebenarnya Ummat Islam Indonesia berasal dari satu sumber tiori berpikir dan karena itu amat mudah untuk bersatu membentengi kaum muslimin dari segala faham yang menyelewengkan ummatnya kepada sesuatu yang tidak dibenarkan agama.

Perpecahan yang ada hanyalah karena kehabisan kegiatan dan kegiatan yang ada hanya berputar-putar seperti yang menghasta kain, sehingga akhirnya energie dihadapkan ke dalam, ditambah lagi dengan bensin yang disemburkan mereka yang tidak menginginkan Ummat Islam bersatu.

Ketiga : **Kegiatan Sosial Ekonomis**

Bila diteliti dengan seksama oleh tenaga yang memiliki kemampuan ilmiyah, sangat banyak sekali potensi ekonomis di desa itu, baik potensi manusiawi maupun potensi alami, yang bila dilola oleh tenaga managemen yang mengerti akan tumbuh menjadi potensi yang riil yang menguntungkan kepada pembangunan desa. Koperasi yang seharusnya merupakan wadah yang sangat diharapkan kehadirannya oleh rakyat belum lagi memenuhi sasarannya, karena setiap pembelian, penjualan ataupun pinjaman belum lagi merupakan sesuatu keharusan yang menggembirakan. Masih merupakan sesuatu yang karena tidak ada alternatip lain. Karena itu memajukan sosial ekonomi masyarakat desa, bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga tugas masyarakat. Tugas ini dijalankan dengan memperbanyak pendidikan keterampilan dan berbagai ilmu pengetahuan terapan, terutama kepada generasi mudanya, agar selangkah masyarakat desa mampu merobah nasibnya sendiri.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang ada di desa bukan hanya mampu meminjamkan uang dengan jaminan yang telah meyakinkan, tetapi mampu memberi petunjuk jalan bagaimana sesuatu potensi ekonomi dapat diubah menjadi potensi riil yang hidup dan bermanfaat.

Surat kabar yang masuk desa disamping membawa berita yang umum mengenai pembangunan juga memberikan tuntunan praktis dengan ilmu pengetahuan terapan, dengan petunjuk pemasaran sesuatu barang. Sangat baik sekali bila Surat Kabar menjadi sumber informasi tentang kebutuhan dan kelebihan satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga dengan demikian para petani merasa dibantu untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan yang di hadapinya sehari-hari.

Keempat : **Kesadaran politik dan berideologi**

Benteng pertahanan berada dalam kalbu rakyat. Karena itu kalbu rakyat harus diperkuat dengan kesadaran beragama, berpolitik dan beridiologi. Kesadaran beragama ditumbuhkan dengan jalan memperbanyak pengajian-pengajian. Setiap mesjid harus mempunyai lingkungan kerja. Seluruh desa dibagi dalam daerah kegiatan kerja mesjid sehingga tidak ada RT/RW yang tidak dimasukkan dalam kegiatan kerja sesuatu mesjid. Kesadaran politik dan beride-

ologi dibina berdasarkan tingkat pendidikan rakyat. Siaran Pedesaan di RRI dan program SK masuk desa memberi bantuan yang besar sekali untuk secara berangsur dihadapkan dengan peragaan aplikasi politik. Di dalam memahamkan politik, rakyat bukan hanya diberikan pengetahuan politik secara suara tunggal, tetapi diberi kesempatan untuk membanding. Hanya pohon yang berdiri tegak di lapangan terbuka yang diuji dengan badai dan angin yang akar pancarnya akan menghijau kedalam dan daunnya rimbun keatas, tetapi bomsai yang ditanam ditengah rumah, jauh dari angin dan badai, sekali-sekali mendapat cahaya matahari, tidak akan memiliki kekuatan berdiri, keselamatannya akan bergantung kepada majikan yang memeliharanya.

Kesadaran idiologi sangat mudah ditanamkannya kepada rakyat, karena pada hakekatnya rakyat telah memiliki seluruh ma'na Pancasila, hanya tidak mengetahui nama dan rangkaiannya seperti yang dirangkaikan dalam kalimat kalimat Pancasila. Satu demi satu dari ma'na Pancasila telah dilaksanakan dalam kehidupan rakyat sehari-hari, hanya tidak ilmiyah, tidak mengetahui penamaan dalam bahasa UUD.

Kelima : **Pola Perencanaan Pembangunan Desa**

Perlu ada pola perencanaan, baik dalam bentuk Desa percobaan, Desa buatan ataupun dalam buku dan maket desa yang diidam-idamkan.
Amat banyak dibuat teori pembangunan desa, tetapi dibuatnya di belakang meja tidak disesuaikan dengan lapangan, baik secara kulturil ataupun secara materiil, akibatnya timbul kebedaan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Agar terhindar dari kebedaan setiap perencana harus terjun kepada kehidupan desa yang nyata. Sebagaimana kami uraikan di atas bahwa sebenarnya di desa itu banyak potensi yang tersembunyi tetapi kepemimpinan desa yang ada tidak dapat dibudayakan potensi itu. Untuk membudayakan potensi itu memerlukan tenaga-tenaga perancang yang terampil yang memahami lingkungan dengan baik dan tepat.

Keenam : **Menghidupkan Sejarah**
Sejarah adalah himpunan kejadian yang luar biasa pada masa silam. Kita perlu menghargai nilai-nilai sejarah yang silam. Menghargai tidak berarti menghidupkan sejarah yang silam, baik menghidupkan dalam nilai budaya maupun dalam nilai lainnya.

Untuk jamannya adalah baik dan mempunyai nilai yang luhur, tidak berarti untuk zaman sekarang ia tetap bernilai baik dan luhur, komponen yang menetapkan nilainya telah berbeda. Amat sering kita berusaha menghidupkan upacara-upacara atau seni budaya yang silam yang berbau agama Hindu atau animisme. Kita bukan harus menghidupkan peninggalan sejarah, tetapi kita harus membuat sejarah, harus menciptakan sejarah. Kita harus mampu mencipta kreasi baru berdasarkan lingkungan baru dengan modal kejiwaan yang ada. Kita harus mencipta sesuatu yang luar biasa tetapi baik dan bernilai.

IV. Peranan Majelis Ulama Dan Ummat Islam di Desa

Bahwa Ummat Islam harus mengambil peranan dalam pembangunan desa, tidak kita sangsikan lagi,, baik karena 80% desa itu penduduknya berisi 100%

bersambung hal. 50

UMMAT ISLAM DAN PEMBANGUNAN (REPELITA III)

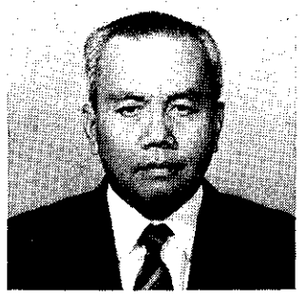

Oleh H. Amiruddin Siregar

KESADARAN bahwa membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, menjadi kewajiban bangsa dan rakyat Indonesia untuk melaksanakan cita-cita kemerdekaan; Rapat Kerja Nasional ke III Majelis Ulama Indonesia di Cipayung tanggal 15–18 Oktober 1978 telah mengambil keputusan mengenai pembangunan sebagai berikut :

1. Menyambut baik usaha Pemerintah cq Departemen Agama yang telah menerbitkan buku P–4 DAN AJARAN ISLAM, dan Majelis Ulama Indonesia bertekad untuk menyebar luaskan Pancasila/P4 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara kepada ummat, termasuk Undang-Undang Dasar 45.
2. Menyambut baik tekad dan usaha Pemerintah Orde Baru untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan demi menuju keadilan sosial, dan menyerukan agar para Ulama lebih meningkatkan perhatian dan keikutsertaan pada persoalan kesejahteraan rakyat serta pemerataan pembangunan tersebut, termasuk memelihara kelestarian lingkungan hidup.
3. Mengharapkan kepada Pemerintah agar Majelis Ulama diikut sertakan dalam perencanaan pembangunan di Pusat dan daerah, menyerukan agar para ulama lebih memperluas cakrawala pandangan pada masalah pembinaan wilayah sehingga terwujud keserasian, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.
4. Menganjurkan kepada Pemerintah untuk membentuk proyek perintis Unit Daerah Kerja Pembangunan di tiap Propinsi dengan mengikut sertakan Generasi Muda, Mahasiswa dan unsur Perguruan Tinggi sebagai kader pembangunan desa.
5. Menyerukan kepada masyarakat Islam di daerah yang berpenduduk padat untuk bersedia bertransmigrasi, menyerukan kepada ulama agar membantu masalah transmigrasi terutama dalam pembinaan manusia-nya dalam kehidup an beragama, menyerukan kepada Pemerintah agar masalah transmigrasi ini dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kesenjangan (gap) sosial budaya dan ekonomi antara para transmigran dengan penduduk setempat.

Putusan Majelis Ulama ini mendapatkan sambutan yang cukup simpati dari segala fihak, karena gambaran orang selama ini bahwa ulama hanya mengurusi masalah peribadatan belaka lantas menjadi berobah. Ulama menyadari benar bahwa pembangunan manusia itu adalah seutuhnya, rohani dan jasmani. Cukup banyak ajaran-ajaran dalam al Qur'anul Karim mengenai pembangunan. Dan seorang ulama sebenarnya telah bersatu dengan pembangunan itu terutama di desa-desa, dimana selain menjadi ulama ianya juga bertani berniaga dan lain-lain.

Seorang ulama memahami benar bahwa kesempurnaan hidup tergantung kepada penguasaan materi, dan penguasaan materi tentunya diperdapat dari usaha yang halal.

Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan mengenai pembangunan ini dengan memperhatikan petani kurma, serta para pedagang. Dari perhatiannya tentang petani kurma itulah akhirnya keluar hadits Nabi :

"antum 'alamu bi umuriddunyakum" "Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu"

Harus mencapai 6 sukses dalam Pelita III

Presiden Suharto pada hari Senin tanggal 19 Februari dihadapan seluruh Gubernur, Bupati, Walikota se Indonesia telah menekankan enam program pokok yang berpengaruh besar pada pelaksanaan strategi pembangunan Pelita III. Penegasan tersebut diberikan adalah untuk menyongsong pelaksanaan Pelita III yang akan bermula pada tanggal 1 April 1979 yang sudah diambang pintu. Enam masalah pokok tersebut adalah :

1. Mensukseskan produksi pangan khususnya beras, palawija, peternakan perikanan dan sebagainya. Pelaksanaan intensifikasi beras dan palawija dengan panca-usaha dan catur sarana harus ditingkatkan dan disempurnakan dalam sektor pertanian. Hambatan-hambatan yang mungkin terjadi seperti kelambatan tersedianya produksi, serangan hama harus diatasi.
2. Mensukseskan pelaksanaan program Inpres seperti Inpres Sekolah, kesehatan, penghijauan, pasar, Inpres Propinsi, Inpres Kabupaten dan Inpres Desa. Dalam tahun-tahun mendatang anggaran Inpres akan lebih besar jumlahnya.
3. Mensukseskan program koperasi (BUUD/KUD) yang harus terus dibina dan ditingkatkan peranannya dalam menumbuhkan swadaya masyarakat, khususnya dalam kehidupan ekonomi desa. Dalam Pelita III koperasi akan lebih banyak nampak berperan sebagai sokoguru ekonomi nasional.
4. Mensukseskan program kependudukan dengan Keluarga Berencana dan transmigrasi. Menurut Presiden Keluarga Berencana selama dua Repelita telah mampu menurunkan pertumbuhan penduduk. Sedang dalam Repelita II transmigrasi belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan pengalaman itu program transmigrasi dalam Pelita III harus lebih ditingkatkan.
5. Mensukseskan pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P-4) dalam rangka memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta pengabdian masyarakat pada pembangunan. Untuk pelaksanaan P-4 kini sedang dipersiapkan satu badan yang bertugas melaksanakan pembinaan pendidikan pelaksanaan P–4 di Pusat dan Daerah.
6. Mensukseskan pelaksanaan Kebijaksanaan 15 Nopember (Kenop 15) yang dimaksudkan untuk menata kembali sistim ekonomi Indonesia, meningkatkan produksi dalam negeri serta mendorong ekspor komoditi non minyak. Ditegaskan bahwa Kepala Daerah perlu mengambil langkah-langkah yang mendorong ekspor dengan meniadakan prosedur ekspor yang berbelit-belit.

Tujuan Repelita III dan Trilogi Pembangunan

Fokus yang diutamakan dalam Pelita III adalah perhatian terhadap kenyataan yang belum berhasil pada Pelita II seperti pemerataan pembangunan di daerah-daerah, posisi dari mereka yang golongan ekonomi lemah, pembinaan koperasi, peningkatan produksi pangan, transmigrasi, perumahan, fasilitas pendidikan, perawatan kesehatan dan berbagai masalah sosial.

Oleh karenanya tujuan Repelita III adalah :

1. MENINGKATKAN TARAF HIDUP, KECERDASAN D'AN KESEJAHTERAAN SELURUH RAKYAT YANG MAKIN MERATA DAN ADIL. serta
2. MELETAKKAN LANDASAN YANG KUAT UNTUK TAHAP PEMBANGUNAN BERIKUTNYA.

Dengan berpegang teguh kepada petunjuk GBHN, maka dalam pelaksanaan Repelita III dilanjutkan dengan berlandaskan kepada TRILOGI PEMBANGUNAN yang meliputi :

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Ketiga unsur Trilogi pembangunan tersebut saling kait berkait dan karena itu ketiga-tiganya harus dikembangkan secara serasi dan saling memperkuat.

Repelita III dengan 8 jalur pemerataan

Unsur pertama dari trilogi pembangunan adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Atas dasar pemerataan yang menuju terciptanya keadilan sosial tersebut, delapan jalur pemerataan akan dilaksanakan yaitu :

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan sandang dan perumahan. Hal ini dapat dicapai dengan usaha menyediakan 9 bahan pokok yang cukup, tersebar dan merata, dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak. Jalur ini erat kaitannya dengan masalah produksi pangan, distribusi, pengolaan dan penyimpanan hasil produksi pangan, keadaan gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan.
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan Dalam Repelita III kesempatan belajar pada SD dan Madrasah Ibtidaiyah akan ditambah mencapai lebih dari 2.2. juta (Pelita II; 23.9 juta) sehingga pada akhir pelita III akan dapat menampung seluruh usia belajar umur 7—12 tahun, yang nantinya diperkirakan 22.2 juta. Akan dilaksanakannya sistim "KEJAR" (Kerja sambil belajar) pendidikan luar sekolah, terutama terhadap 6 juta anak dan dewasa yang tidak dapat memanfaatkan sekolah. Untuk mempertinggi taraf kesehatan rakyat maka peningkatan kesehatan rakyat dan kecerdasannya melalui pelayanan kesehatan dan peningkatan gizi bagi masyarakat penghasilan rendah akan diprioritaskan. Tiap kecamatan berpenduduk diatas 30.000 atau yang daerahnya luas akan ada satu Puskesmas Pembantu ditiap Desa. Untuk keperluan tersebut dalam Pelita III akan dibangun 800 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang baru.
3. Pemerataan pembagian pendapatan. Akan diusahakannya mempertinggi peng-

hasilan kelompok-kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerataan pembagian bagi golongan sangat miskin antara lain berupa peningkatan program-program untuk para nelayan, pengrajin, petani penggarap yang tak punya tanah, petani pemilik tanah yang sangat kecil,buruhdan sebagainya. Atas dasar ini masalah pemilikan tanah pun harus disempurnakan (ditertibkan). Perluasan kesempatan kerja merupakan masalah yang penting untuk mengatasi masalah pengangguran. Pelita III mengusahakan akan menyerap 6.4 juta tenaga kerja.

4 Pemerataan kesempatan kerja. Disamping meningkatkan produksi nasional maka usaha pembangunan nasional harus mempercepat pula pertumbuhan lapangan kerja, karena pemberantasan pengangguran dengan memperluas kesempatan kerja merupakan sasaran penting bagi pembangunan nasional. Dengan perluasan kegiatan pembangunan dibidang ekonomi, diharapkan akan membuka kesempatan kerja bagi 6.4 juta tenaga kerja baru dalam Repelita III. Penyerapan tersebut antara lain dengan usaha Padat Karya

5. **Pemerataan Kesempatan berusaha.** Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pembangunan, maka perluasan dunia usaha swasta nasional mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Dalam hal ini ditingkatkan kerja sama yang serasi antara Pemerintah, perusahaan milik negara, dunia usaha swasta dan koperasi. Pemerintah menciptakan iklim yang sehat yang diperlukan untuk kelancaran usaha antara lain dengan jalan mengusahakan ketenteraman dan keamanan usaha, menyederhanakan prosedur perizinan dan sebagainya.
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Sejalan dengan kebijaksanaan pengembangan KEWIRASWASTAAN di kalangan generasi muda antara lain dibidang industri kecil, kerajinan rakyat dan jasa. Khususnya dibidang pertanian akan lebih didorong dan dirangsang agar pemuda lebih terlibat dengan berbagai kegiatan pembangunan di desa. Mengenai partisipasi wanita dalam pembangunan ditujukan terutama kepada kaum wanita yang belum pernah mendapat kesempatan menikmati pendidikan formal termasuk mereka yang putus sekolah dasar. Sasaran usaha ialah meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan dengan melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan terutama di daerah pedesaan, yang berupa pendidikan formal, keterampilan, dan kewiraswastaan. Peranan kaum wanita menjadi program dalam Pelita III yang harus lebih terjamin.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan keseluruh Tanah Air. Pelaksanaan nya ialah ditingkatkan pembangunan daerah dan pembangunan pedesaan yang lebih diarahkan kepada perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan pengembangan lingkungan pemukiman pedesaan dan perkotaan sehat, disamping peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam. Dalam hubungan ini daerah-daerah minus dan daerah-daerah yang padat penduduknya mendapat perhatian khusus.

   Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air mempunyai sasaran antara lain adalah lebih menyerasikan pembangunan sektoral dengan pembangunan daerah, sehingga keseluruhan pembangunan daerah

juga benar-benar merupakan satu kesatuan demi terbinanya Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Dalam hal ini pembinaan hukum agar mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkatan kemajuan pembangunan disegala bidang. Harus dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan. Sasarannya adalah proses penyelesaian perkara dipengadilan dengan secepat mungkin dan seadil-adilnya, sederhana, cepat dan jujur. Perlu diusahakan penyempurnaan peraturan-peraturan hukum dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan Termasuk usaha peningkatan alat dan tenaga penegak hukum.

Partisipasi Majelis Ulama dalam Pelita III

Majelis Ulama Indonesia sudah sejak semula memahami dengan sungguh-sungguh-tentang penting dan utamanya masalah pembangunan. Dalam rencana kegiatan nya selalu membicarakan masalah partisipasi ummat Islam dalam pembangunan Nasional.

Dengan selesainya Pemilihan Umum tahun 1978, terbentuknya MPR/DPR hasil Pemilu, adanya Tap MPR No. II dan IV (P–4 dan GBHN) Majelis Ulama Indonesia telah mempelajari rencana pembangunan selanjutnya yang tertuang da - lam Repelita III.

Pendirian Majelis Ulama Indonesia mengenai pembangunan nasional berencana telah dituangkan dalam keputusan-keputusan Rakernas III di Cipayung yang bertitik berat kepada : Penjabaran P–4, pelaksanaan GBHN dan Repelita III khu - susnya bidang kesejahteraan rakyat, masalah pendidikan nasional, pembinaan generasi muda, pembinaan dan pembangunan wilayah, stabilitas keamanan, pemberantasan penyelewengan, pembinaan mental agama, transmigrasi, kerukunan, dakwah, pembinaan remaja dan wanita, dan lain-lain.

Untuk memulai pelaksanaan dari keputusan-keputusan Rakernas III tersebut Majelis Ulama Indonesia tentu memerlukan program-program yang konsepsional dengan mengambil bidang-bidang dimana ulama bisa langsung memegang peranannya.

Majelis Ulama Indonesia telah mengadakan pembahasan-pembahasan secara meluas dan agak terperinci mengenai masalah-masalah :

a. transmigrasi
b. masalah pembangunan masyarakat desa
c. masalah pembinaan remaja Masjid
d. masalah hidup sederhana keluarga sehat sejahtera
e. masalah kehidupan sosial kemasyarakatan
f. masalah dakwah, dan
g. pendidikan nasional.

Semua hasil perumusan yang konsepsional akan didistribusikan kedaerah-daerah, dan orgnaisasi-organisasi Islam, dan sekaligus menyeru partisipasi ummat Islam mensukseskan Repelita III.

Dengan bismillahirrahmanirrahim kita laksanakan Pelita III itu pada 1 April 1979 yang akan datang.

KEMBALI KE DESA

Oleh Ir. M. Saleh Widodo
Pesantren Pertanian Darul Fallah Bogor

PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA dan Kembali ke Desa masing-masing merupakan tema diskusi panel dan judul kertas kerja sebagaimana telah dipilih oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Penulis menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pemilihan tema dan judul itu. Hal ini menunjukkan secara jujur akan pengakuan betapa penting masalah pedesaan dalam rangkan pembinaan ummat dan pembangunan bangsa. Dalam sejarah perjuangan ummat Islam di Indonesia, maka desa pernah menduduki tempat yang mulia. Setelah masa penjajahan berjalan dan proses industrialisasi yang disertai dengan proses urbanisasi semakin berkembang, mulailah orang menganggap desa kurang penting. Orang silau melihat kemajuan dikota-kota yang merupakan pusat kehidupan ekonomi, politik dan kebudayaan. Keadaan demikian makin bertambah lagi, setelah kita merebut kemerdekaan. Dalam negara yang masih muda, yang baru lepas dari belenggu penjajahan, mobilitas sosial bagi sebagian rakyat telah terjadi, yang berarti semakin ditinggalkannya pedesaan oleh warganya yang pintar-pintar dan yang sukses dalam kehidupan. Sehingga warisan zaman kolonial yang berupa keadaan yang dualistis baik ditinjau dari segi sosial maupun ekonomi (BOEKE), yang berarti kota maju dan desa tertinggal, terlihat semakin menyolok. Dalam hal ini mulailah orang menganalisa ujud stagnasi yang terjadi di desa dan mencari daya upaya bagaimana cara mengatasinya. Desa, terutama di pulau Jawa, dikatakan dalam keadaan beku pertaniannya, atau sedang dilanda involusi pertanian (GEERTZ). Keadaan ini dicirikan antara lain dengan pertambahan produksi pangan, terutama beras yang hanya cukup untuk dikonsumsi oleh pertambahan penduduk, sehingga menyebabkan desa tak berkembang. Dan ini berlangsung beratus tahun sejak selama dalam penjajahan sampai kita merdeka. Usaha-usaha sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, terutama pada satu dasa warsa lebih sedikit yang terakhir, untuk keluar dari kebekuan pertanian di pedesaan. Dengan diintroduksikannya bibit padi unggul dengan cara-cara bercocok tanam yang maju, telah berhasil menaikkan produksi padi dengan angka dua kali penambahan produksi semula, menjadi kira-kira 60% setahun.

Keberhasilan ini sering disebut dengan Revolusi Hijau. Namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam langkah ini, misalnya belum dinikmatinya akibat kenaikan produksi itu oleh petani yang tak bertanah, sedangkan jumlah kategori

*) Paper pada Panel Diskusi tentang Pembangunan Masyarakat Desa yang diselenggarakan MUI tanggal 20 – 21 Januari 1979.

yang terakhir ini sekitar 40% dari seluruh petani di pulau Jawa. Bahkan ada sinyalemen bersama dengan kemajuan produksi itu, telah terjadi hubungan sosial di desa yang bertambah longgar, yang merugikan kepentingan petani yang lemah, misalnya dengan tergesernya sesuatu yang sudah melembaga dalam budi daya padi yaitu sistim bawon yang dapat dinikmati orang banyak dengan sistim baru yaitu tebasan yang hanya dinikmati oleh orang sedikit. Gejala ini baru ditemukan di beberapa desa di Jawa Tengah. Dengan demikian soal perataan pendapatan memang semakin menjadi masalah, yang perlu segera dipecahkan. Tantangan ini semakin sulit dijawab berhubung telah menjadi longgarnya hubungan sosial antara warga desa "the haves" dengan "the have nots". Perobahan sosial yang sedang berlaku di desa perlu selalu kita perhatikan dan kita lakukan pengendaliannya yang berencana sesuai dengan kemampuan kita masing-masing secara sendiri-sendiri dan berorganisasi. Dalam keadaan demikian, keputusan Majelis Ulama Indonesia untuk membahas tema Pembangunan Masyarakat Desa memang sangat kena, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah apa yang akan diperbuat sebagai bukti partisipasi kita kepada pembinaan bangsa, terutama pembinaan ummat.

2. Setelah kita melihat keadaan desa secara sepintas lalu dengan memperhatikan kecenderungan-kecenderungan perkembangan masalah yang dihadapinya, marilah kita lihat potensi desa yang dapat kita kembangkan. Secara sosiologis dapat kita kemukakan ciri-ciri masyarakat desa, sebagai berikut :

1). mata pencaharian warga desa sebagian besar mengeksploitasi alam, terutama pertanian dan sedikit di bidang jasa.
2). angka kelahiran dan kematian tinggi.
3). hubungan sosial pada umumnya berjalan erat dan mendalam.
4). pelapisan masyarakat tidak seberapa kompleks.
5). differensiasi pekerjaan belum meluas.
6). pendidikan masih umum.
7). kehidupan beragama kuat, namun masih berdampingan dengan pemegang takhyul dan khurafat;
8). perubahan sosial lambat dan meliputi bidang yang terbatas.

Keputusan kembali ke desa berarti akan menghadapi masyarakat dengan ciri-ciri di atas, yang berbeda dengan masyarakat kota, yang sering memiliki ciri-ciri sebaliknya. Bagi yang akan kembali ke desa, perlu memiliki persiapan mental yang kuat, agar sebagai subyek pembangunan, dapat menyesuaikan diri dengan mudah, sehingga kehadirannya dapat diterima.

Perlu ditambahkan gambaran umum mengenai macam-macam desa di seluruh tanah air sebagaimana dihasilkan oleh suatu penelitian. Penelitian itu dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Departemen-departemen lainnya (tahun 1972). Diperoleh bahwa jumlah desa di Indonesia berjumlah 58.164 yang tersebar pada 3.251 kecamatan, 282 kabupaten dan 26 propinsi. Penelitian dengan teliti dilakukan pada 2000 desa atau 160 kecamatan pada 26 propinsi. Hasil penelitiannya menunjukkan desa-desa dibagi sebagai Desa Swadaya, Desa Swakarya, dan Desa Swasembada.

1). Desa Swadaya (Desa tradisionil)

Pada desa-desa yang tergolong swadaya, sifatnya masih tradisionil, adat istiadat masih mengikat. Keadaan ekonominya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer saja. Tingkat produktivitas masih rendah, sehingga keadaan ekonominya masih lemah. Penduduk yang menamatkan sekolah dasar kurang dari 30%. Pendapatan perkapita tiap tahun dibawah Rp.12.000,– Administrasi pemerintahan desa serta lembaga-lembaga desa lainnya sudah ada tetapi belum berkembang, serta keadaan prasarananya masih sangat terbatas, sehingga komunikasi dengan luar terbatas pula. Pada tahun 1974 jumlah Desa Swadaya 25.541 (44%).

2). Desa Swakarya (Desa peralihan)
Pengaruh luar mulai masuk, teknologi baru mulai dikenal, sehingga produktivitas lebih tinggi. Adat istiadat mulai longgar. Pendapatan perkapita tiap tahun rata-rata Rp.12.000,- Penduduk yang tamat Sekolah Dasar antara 30% sampai 60%. Administrasi pemerintahan dan lembaga-lembaga desa berkembang dan komunikasi dengan luar lebih baik. Pada tahun 1974 jumlah Desa Swakarya 30.878 (53%).

3). Desa Swasembada (Desa berkembang).
Pengaruh pembaharuan sudah mulai ada, sehingga adat istiadat tidak terlalu mengikat. Teknologi baru dalam lapangan pertanian sudah benar-benar dimanfaatkan sehingga produktivitas sudah tinggi. Pendapatan perkapita tiap tahun rata-rata Rp. 17.500,–

Penduduknya 60% sudah Sekolah Dasar. Pada umumnya pemerintahan dan lembaga desa lainnya sudah berfungsi baik. Keadaan prasarananya lebih baik, sehingga hubungan dengan kota-kota berjalan lancar. Pada tahun 1974 jumlah Desa Swasembada 1.745 (30%).

Pada umumnya desa-desa di Jawa dan Bali termasuk desa swakarya dan desa-desa di luar Jawa masih dalam taraf swadaya, bahkan dibeberapa daerah masih terdapat **Pra Desa**. Jumlah Pra Desa tercatat sebanyak 1.721. Pra Desa belum dapat dimasukkan dalam Desa karena administrasi pemerintahan desa dan batas-batas wilayah desa belum ada. Keadaan ekonomi rakyat masih sangat rendah. Penduduk pra desa belum menetap dan terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang terpencar dan terisolasi.

Untuk mempercepat proses pengembangan desa oleh Departemen Dalam Negeri telah ditetapkan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), dalam tingkat kecamatan dengan camat sebagai penanggung jawabnya. UDKP akan menghimpun partisipasi pembangunan dari dinas-dinas dan unsur swasta. Sebaiknya Majelis Ulama dapat memanfaatkan wadah UDKP ini untuk memasuki desa, sehingga terjadi koordinasi kerja antara semua potensi pembangunan. Mengingat Majelis Ulama lebih merupakan kekuatan moril yang bergerak dalam lingkungan ummat Islam, baik secara perseorangan, kelompok ataupun terorganisasi, maka peranannya perlulah dipilihkan yang dapat mengadakan perubahan yang mendasar.

4. Dalam masyarakat desa yang tradisionil maupun yang post-tradisionil, komunikasi berjalan sesuai dengan pola yang berlaku. Dalam jaringan komunikasi tradisionil orang menempatkan pemimpin, termasuk pemimpin agama sebagai "Bapak" yang diikuti oleh "Anak buah". Bapak yang diatas dan dipatuhi kata-kata nya oleh anak buah yang dibawah. Setiap hal yang baru misalnya innovasi, masuk

ke desa melewati "Bapak", dalam hal pembicaraan kita : ulama, dan yang terakhir ini menterjemahkan amanat yang berupa innovasi itu kepada masyarakat. Majelis Ulama setelah memperhatikan keadaan desa yang penuh dengan problematika itu, disarankan agar menentukan pula dalam skala prioritasnya pesan-pesan atau amanat yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Pesan atau amanat yang dimaksud ialah pembinaan tata-nilai Islam yang berguna untuk menghadapi tantangan zaman. Antara lain perlu ditanamkan agar umamt Islam senantiasa berpandangan sebagai berikut :

1). bahwa hidup ini baik dan perlu diperbaiki
2). orang perlu selalu menambah karya
3). bahwa alam dapat ditundukkan, dengan pertolongan Allah dan ikhtiar.
4). perlu memandang pada masa depan, berdasar keadaan masa kini dan yang lalu.
5). percaya kepada diri sendiri, dan melihat gotong-royong adalah hal yang baik.

Ulama yang memiliki pengaruh yang besar dikalangan masyarakat, apabila menyuarakan hal-hal yang mendasar sifatnya, yang berpangkal padakaedah-kaedah agama, akan mendapat tanggapan yang positif dari umamt Islam.

5. Lingkungan pengaruh ulama di desa adalah luas. Diantara lingkungan pengaruh itu, maka lingkungan pengaruh agama di desa menjadi tempat yang utama bagi ulama di desa untuk menyebarkan amanatnya. Dalam lingkungan pengaruh agama ini berhimpun kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga agama yang terdiri dari keluarga-keluarga pengajian, madrasah dan masjid. Kesemuanya itu dapat ditingkatkan peranannya, dengan pimpinan ulama, kearah pengamalan usaha-usaha perbaikan masyarakat desa. Sebagai contoh meluaskan cakrawala dakwah yang juga meliputi memasukkan pengertian perlunya menanam bibit unggul, agar hasil produksi pangan meningkat, sebagai materi dakwah sangat dianjurkan. Sebab bukankah kefakiran itu akan membawa kepada kekufuran, sebagaimana disebutkan dalam Hadith? Contoh lain, agar remaja di desa terbina rohani dan jasmaninya, dapatkah dimanfaatkan adanya masjid dimana-mana untuk mendirikan Remaja Islam Masjid (RISMA)? Apalagi setelah melewati usaha masyarakat yang berhasil, pembentukan RISMA telah diinstruksikan oleh Dirjen Bimas Islam, tinggallah Majelis Ulama bekerja sama dalam pembinaannya. Untuk meningkatkan peranan dan fungsi masjid, baik pula disebar luaskan beberapa percobaan yang telah berhasil untuk mengintegrasikan masjid dengan poliklinik, perpustakaan, bahkan kalau perlu kooperasi. Dalam hal yang terakhir itu, perlulah pengelolaan dilakukan dengan sebaik-baiknya, agar tidak timbul hal-hal yang negatif, yang dapat mengecewakan jamaah sendiri. Masih banyak tentunya hal-hal yang innovatif yang dapat mengoperasikan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat desa melalui pengembangan kelompok-kelompok sosial dan organisasi organisasi sosial yang ada di setiap desa. Kita perlukan pemikiran yang terus menerus dan terhimpunnya tenaga-tenaga yang semakin besar melalui pengorganisasian oleh Majelis Ulama.

Dengan demikian secara mutlak diperlukan partisipasi yang luas dari potensi

pemimpin-pemimpin formal dan pemimpin-pemimpin informal. Bekerja dengan mengelola perangkat teknologi lunak (soft-ware technology) yang meliputi mengelola unsur manusiawi misalnya pengorganisasian ummat, perluasan cakrawala dakwah, menyebar luaskan pengertian management dakwah, meningkatkan fungsi masjid yang terintegrasi dengan kehidupan ummat; menggali dan menyebarluaskan sistem nilai, dan norma sosial Islam ke tengah masyarakat sehingga dapat menciptakan Qorriyatun thoyyibah adalah tugas-tugas yang dapat diemban oleh Majelis Ulama secara meyakinkan. Sudah diperlukan adanya social-planners untuk mendampingi Majelis Ulama agar terjadi kesinambungan pekerjaan, sehingga dicapai proses perubahan sosial yang menguntungkan Islam, ditingkat pedesaan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama perguruan tingginya, dapat diajak bekerja sama dalam menyusun konsep-konsep pembangunan, termasuk perubahan sosial yang dikehendaki, serta melaksanakan konsep-konsep itu secara berencana di masyarakat pedesaan. Hal ini dapat diatur, karena ada kegiatan perguruan tinggi di bidang Penelitian dan bidang Pengabdian kepada Masyarakat. Kerjasama antara Majelis Ulama dengan organisasi-organisasi sosial dan pendidikan Islam yang sudah mempunyai sejarah perjuangan yang lama, dan pengaruhnya berakar dalam masyarakat pedesaan, akan memberikan jaminan yang semakin mantap akan berhasilnya pelaksanaan proses perubahan yang sesuai dengan rel Islam.

6. Setelah memperhatikan uraian tersebut di atas, kita dapat merumuskan hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan masyarakat desa sebagai berikut,:

1). Potensi yang ada pada Ummat Islam untuk melakukan pembangunanmasyarakat desa cukup besar, yang meliputi ajaran Islam yang sempurna, yang menjiwai nilai-nilai dan norma sosial kita; ummat yang banyak; lembaga-lembaga dan organisasi sosial Islam yang hidup sampai ke desa-desa, kesadaran pemimpin-pemimpin Islam bahwa desa merupakan garapan yang penting sudah semakin besar dan kegiatan dakwah yang hidup subur.
2). Kelemahan yang ada pada Ummat Islam untuk melakukan kerja memasuki desa adalah belum ada konsep yang operasionil mengenai pembangunan masyarakat desa, belum ada metoda yang cukup teruji; masih sedikitnya pemimpin Islam yang mempunyai pandangan luas yang terlibat benar-benar pada kerja pembangunan masyarakat desa, bimbingan yang tidak ada kepada innovater muslim yang bekerja pada tingkat "grass-root", dan koordinasi yang belum ada antara pelaksana-pelaksana terbawah.
3). Tantangan berupa masalah-masalah yang ada di pedesaan cukup banyak, berupa kemiskinan lahir dan bathin, produktivitas rendah, pendapatan rendah, penganggúran, penyakit dan kelalaian (buta huruf, khurafat).
4). Kesempatan luas ada di depan kita berupa kerja keras untuk mengatasi kelemahan (pada butir 2) diatas) dan tantangan atau masalah (pada butir 3) diatas).

Akhirnya terpulanglah kepada kita bagaimana mengatasi kelemahan dan tantangan itu. Semoga dengan senantiasa bermohon kepada petunjuk-Nya, kita dapat selangkah demi selangkah mencapai yang kita cita-citakan, yakni terbentuknya masyarakat desa yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah.

PENDIDIKAN DAN KESEMPATAN KERJA

DI PEDESAAN

Oleh M. Dawam Rahardjo

TIGA SERANGKAI masalah yang kini terdapat di pedesaan Indonesia umumnya dan khususnya di Jawa adalah : kemiskinan absolut, kepincangan pendapatan dan pengangguran dalam tatanan ekonomi yang dualistis. Kemiskinan absolut diperlihatkan oleh terdapatnya sekitar 40 – 60% lapisan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan diukur dari tingkat pendapatan atau kemampuan belanjanya secara keseluruhan, dalam beras atau dalam 9 bahan-bahan kebutuhan pokoknya, atau diukur dengan konsumsi kalori maupun protein sehari-hari. Kepincangan pendapatan diperlihatkan oleh besarnya secara relatif pendapatan yang diterima lapisan-lapisan masyarakat yang paling atas, menengah dan bawah, misalnya, berapa prosen pendapatan yang diterima oleh 5 – 10% lapisan terkaya, 20 – 40% lapisan sedang serta 40–60% lapisan masyarakat yang termiskin atau 20–40 prosen lapisan yang teramat miskin. Sedangkan pengangguran dicerminkan oleh prosentase kelompok pengangguran atau pencari kerja dibanding dengan angkatan kerja, umpamanya 5% atau 10%. Di negara-negara yang belum maju seperti Indonesia perlu pula dilihat tingkat pengangguran tersembunyi atau berselubung atau setengah menganggur, yaitu diukur dari jam kerja kurang dari 35 jam per minggu, umpamanya saja diperkirakan sekitar 50% tenaga kerja di sektor pertanian mengalami keadaan setengah menganggur itu.

Kemiskinan dan kepincangan pendapatan ditentukan atau tergantung dari kesempatan kerja tersebut. Memang, kemampuan seseorang untuk berproduksi mempengaruhi juga tingkat pendapatan. Tapi seseorang itu miskin umumnya karena tidak bisa memperoleh pekerjaan yang layak atau setengah menganggur. Oleh sebab itu penciptaan yang layak dan lapangan kerja adalah cara yang paling langsung untuk mengatasi kemiskinan dan kepincangan pendapatan, disamping juga dengan usaha untuk meningkatkan produktivitas. Namun perlu diingat bahwa usaha peningkatan produktivitas, misalnya dengan modernisasi pertanian atau industri, seringkali mengakibatkan tersisihnya sebagian orang dari pekerjaan karena sistim produksi baru yang diterapkan bersifat menghemat ongkos dengan mengurangi tenaga buruh.

Adapun sebab-sebab utama dari timbulnya pengangguran adalah karena pertambahan penduduk yang amat cepat sehingga rasio antara jumlah penduduk dengan sumber-sumber ekonomi dan kesempatan ekonomi menjadi semakin kecil. Sebab kedua adalah kecilnya tingkat investasi karena masyarakat di pedesaan kurang mampu untuk menabung, atau kurang mempunyai hasrat untuk menabung, atau mereka sebenarnya juga menabung tapi bentuk tabungannya tidak memungkinkannya untuk diinvestasikan, atau lembaga-lembaga perbankan dan keuangan yang ada kurang mampu untuk memobilisasikan dana yang sebenarnya ada dalam masyarakat. Karena tingkat investasi yang kecil ini maka dengan sendirinya kegiatan produksi tidak bisa diperluas. Sebab yang lain adalah rendahnya mutu sumber daya manusia, baik dilihat dari pendidikan dasar yang mereka terima, dari segi keterampilan atau dari segi kewiraswastaan mereka yang cukup rendah. Karena tingkat pendidikan yang rendah, maka kesadaran mereka terhadap keadaan hidup dan potensi lingkungan juga tidak cukup peka dan oleh sebab itu mereka kurang memiliki hasrat untuk bekerja maupun berusaha untuk memanfaatkan potensi lingkungan guna memperbaiki serta meningkatkan taraf hidup mereka sendiri. Dengan perkataan lain, tingkat atau jenis pendidikan yang diterima tidak memberi dorongan atau tidak memberi kemampuan pada lapisan masyarakat yang terendah. untuk menciptakan kesempatan kerja bagi diri mereka sendiri.

Salah satu bentuk pengangguran yang akhir-akhir ini perlu mendapat perhatian berhubung dengan meningkatnya kegiatan pembangunan adalah apa yang disebut "pengangguran struktural". Diantara sebab-sebab yang menimbulkan jenis pengangguran ini adalah diperkenalkannya tekhnologi baru kedalam sistim produksi , seperti misalnya traktor untuk mengolah tanah, mesin huller untuk memproses padi menjadi beras, juga mesin-mesin modern yang menggantikan alat tenun tangan. Jenis-jenis tekhnologi tersebut di atas memang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan jumlah produksi nasional. Namun untuk mencapai tujuan produksi ini masyarakat harus membayar dengan timbulnya pengangguran. Dillema yang timbul adalah : apakah kita harus lebih mengutamakan kenaikan produksi ataukah memberi lapangan kerja kepada penduduk yang makin bertambah.

Masalah tersebut di atas tidak bisa hanya dilihat secara sepotong-sepotong. Dengan melihat pada kasus huller atau traktor kita tidak bisa lantas menarik kesimpulan bahwa modernisasi produksi atau menciptakan pengangguran. Dari pengalaman pembangunan yang dialami oleh negara-negara lain dapat diperoleh keterangan umpamanya bahwa tekhnologi bibit unggul, tekhnologi pupuk dan tekhnologi air, ternyata dapat menciptakan kesempatan kerja baru bagi penduduk pedesaan secara keseluruhan. Demikian pula dapat diperoleh keterangan bahwa dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka kemampuan berinvestasi juga makin besar. Selanjutnya investasi ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, baik dibidang industri, konstruksi, perdagangan serta jasa. Disini nampak bahwa pada saat saat permulaan pembangunan, lebih-lebih jika usaha pembangunan itu diprioritaskan atau dipusatkan pada suatu bidang-bidang tertentu saja, maka kenaikan produksi akan diikuti oleh pengangguran jika kesempatan kerja lain tidak bisa diciptakan. Oleh sebab itu maka pembangunan pedesaan melalui Revolusi Hijau perlu diikuti oleh perluasan kesempatan kerja, umpamanya melalui penciptaan industri-industri pengolahan bahan-bahan pertanian, atau industri yang menunjang pertanian. Pengangguran struktural pasti akan terjadi apabila produksi bibit unggul, ba-

*) Artikel ini adalah paper yang disampaikan dalam Diskusi panel tentang Pembangunan Masyarakat Desa yang diselenggarakan MUI tgl. 20 – 21 Januari 1979.

han-bahan kimia untuk pupuk dan insektisida dan alat-alat pertanian umpamanya, harus diimpor. Demikian pula jika hasil-hasil pertanian tidak bisa kita olah lebih lanjut tapi langsung kita ekspor.

Erat hubungannya dengan pengangguran struktural atau "pengangguran musiman" yang menyimpan gejala pengangguran tak kentara atau gejala setengah menganggur di pedesaan. Mereka itu tak bekerja oleh karena tak ada cukup kesempatan kerja sepanjang musim atau sepanjang tahun. Masalahnya adalah bahwa masyarakat pedesaan tidak mampu melihat adanya kesempatan kerja atau keperluan kegiatan produktif sesudah panen selesai, atau pada waktu menunggu masa panen atau juga sebelum masa tanam. Padahal kesempatan utuk bekerja produktif, baik dibidang industri maupun jasa, sebenarnya ada. Demikian pula terdapat kesempatan untuk bekerja yang cukup luas untuk meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan yang walaupun tidak memberikan tambahan pendapatan berupa uang tetapi dapat menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang langsung bisa dikonsumsi. Pengolahan tanah pekarangan umpamanya, bisa memberi tambahan hasil, termasuk bahan-bahan guna memperbaiki dan memperkuat daya kesehatan mereka. Para petani juga bisa melakukan upaya untuk mengurangi pengusutan produksi beras atau palawija yang diperkirakan bisa mencapai 40%.

Untuk sementara dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja perlu dilakukan dalam bentuk kegiatan yang serempak dan saling mengisi antara kegiatan-kegiatan yang tujuannya :

(a). Peningkatan produktivitas dan produksi guna menaikkan tingkat pendapatan masyarakat.
(b). Menganeka ragamkan kegiatan produktif di pedesaan di luar usaha bercocok tanam.
(c). Peningkatan kesejahteraaan dan mutu hidup dengan menganeka ragamkan dan menyempurnakan kebutuhan konsumsi.

Sudah barang tentu, disamping usaha yang bersifat menciptakan kesempatan kerja, upaya untuk mengendalikan laju pertambahan penduduk mutlak harus dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Sebab, upaya ini akan mengurangi beban untuk menyediakan lapangan kerja bagi pertambahan angkatan kerja.

Faktor pendidikan, baik dalam jumlah, mutu maupun jenisnya, sangat mempengaruhi daya tahan masyarakat dalam menghadapi persoalan-persoalan pengangguran dan kesempatan kerja karena sebab-sebab struktural dan musiman tersebut di atas. Apabila terjadi perubahan tekhnologi dalam sistim produksi, entah itu dibidang-bidang pertanian atau industri, maka yang akan jadi korban pertama adalah lapisan masyarakat yang berpendidikan rendah, baik dilihat dari segi pengetahuan atau kesadarannya maupun dari segi keterampilannya. Mereka ini memiliki kemampuan mobilitas yang rendah atau memiliki daya tahan yang lemah menghadapi tuntutan fungsi yang baru. Padahal modernisasi mutlak diperlukan dan perubahan tekhnologi adalah suatu keharusan. Sudah barang tentu, perubahan tekhnologi dan modernisasi perlu dikendalikan dan diarahkan. Perubahan tekhnologi dan modernisasi ini yang bisa menjurus kepada konsentrasi kesempatan kerja dan kekayaan harus dicegah. Dengan perkataan lain, suatu modus tekhnologi yang te-

pat perlu diketemukan guna menghindari timbulnya pengangguran yang meluas tapi harus tetap bisa meningkatkan produksi dan jumlah mutu dan aneka ragamnya.

Dengan melihat pentingnya faktor pendidikan maka perlu difikirkan bagaimana cara mengatasi dan menghadapi persoalan kesempatan kerja tersebut di atas melalui jalan pendidikan. Tujuan pendidikan disini adalah dalam rangka untuk mengatasi sumber daya manusia. Sudah barang tentu pendidikan bukan satu-satunya cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Investasi juga diperlukan. Bahkan perlu dipertemukan arah dari pendidikan dengan kebutuhan investasi, atau pendidikan harus bisa menunjang investasi. Disini kita melihat bahwa upaya pendidikan tidak selalu bisa mempengaruhi perluasan kesempatan kerja. Bahkan apabila arah pendidikan ini kurang cocok dengan kebutuhan, maka justru faktor pendidikan ini lebih menambah ketegaran mobilitas tenaga kerja. Orang yang dididik untuk menjadi pegawai umpamanya, akan sulit berhadapan dengan tantangan untuk menjadi pengusaha yang berdikari.

Berbagai aspek pendidikan yang perlu diperhatikan dalam kita memandang permasalahan kesempatan kerja antara lain adalah :

(a). Hasrat untuk meningkatkan mutu hidup keluarga dan masyarakat.
(b). Kesadaran akan hak-hak pribadi yang dijamin oleh Konstitusi untuk bisa memperoleh lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
(c). Kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh lingkungannya, baik lokal, regional, maupun nasional.
(d). Pengetahuan dasar yang perlu dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, seperti membaca, menulis, berhitung, kesehatan, kewarganegaraan dan sebagainya.
(e). Keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk bekerja, tidak saja keterampilan dalam memelihara kesehatan, mengelola air, mengawetkan makanan, menyediakan jasa bagi masyarakat dan sebagainya.
(f). Kebutuhan minimum yang dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat hidup di atas kaki sendiri, atau dengan istilah yang lazim, kemampuan kewiraswastaan.
(g). Kesadaran dan sikap kependudukan yang melahirkan cara hidup yang memperhatikan kesejahteraaan keluarga.

Apabila kita menyadari pentingnya peranan pendidikan dalam rangka menghadapi masalah kesempatan kerja di pedesaan, maka sebagai konsekwensinya, harus ada kesediaan untuk mengarahkan investasi pada pengembangan sumber daya manusia. Investasi semacam ini bisa menghasilkan manfaat yang berlipat ganda. Dari sudut pandangan Muslim, maka kita harus bisa menafkahkan harta benda yang sudah ada pada kita pada jalan Allah. Dalam Islam kita mengenal konsep zakat, sodaqoh, wakaf dan infaq yang intisarinya adalah konsep transfer kekayaan. Transfer ini diperlukan agar kekayaan tidak hanya beredar pada sekelompok kecil masyarakat saja. Juga Islam berangggapan bahwa sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang atau suatu lembaga, terdapat hak orang miskin. Oleh sebab itulah kelebihan harta harus dinafkahkan bagi orang miskin. Inilah jalan yang dikehendaki oleh Allah. Dan apabila kita membelanjakan harta kita di jalan Allah, maka hasilnya akan berlipat ganda. Lukisan tentang disajikan salah satu tentang ayat Al – Qur'an :

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menimbulkan tujuh butir; pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan manfaat bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunianya) dan lagi Maha Mengetahui".
(Al Baqoroh, surat 1 : 26).

Transfer kekayaan bisa berujud modal uang, tapi bisa pula ditanamkan dibidang pendidikan. Transfer ini tidak hanya secara harfiah datang dari seseorang keorang lain, melainkan bisa pula diorganisasikan sedemikian rupa sehingga terjadi pemindahan kekayaan dari kelompok kaya ke kelompok miskin, atau dari kota yang lebih maju ke daerah pedesaan yang lebih terbelakang. Oleh karena itu perlu ada organisasi yang menghimpun kekuatan kelompok masyarakat yang lebih mampu di bidang pendidikan kepada mereka yang rendah atau tak memiliki pendidikan yang layak.

Lembaga-lembaga pendidikan yang mendasarkan dirinya pada ajaran Islam perlu melakukan peninjauan terhadap peranannya. Dengan perkataan lain, perlu dipikirkan kembali tujuan, orientasi, bentuk dan pendekatan pendidikan yang tepat untuk membangun masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan, dimana 80% penduduk Indonesia tinggal di dalamnya.

sambungan hal. 35

muslim, atau dipanggil oleh tugas-tugas nasional yang wajib disokong dan dibantu kaum muslimin dan pemimpin pemimpinnya.

Majelis Ulama sebagai satu-satunya lembaga kemasyarakatan yang dapat mempadukan segenap potensi kaum muslimin baik yang ada dalam berbagai kekuatan politik dan propesi, mempunyai tanggung jawab yang terdepan untuk mengantarkan dan membimbing berbagai pemikiran untuk membangun desa. Perayaan-perayaan keadaan yang lingkungan rakyat secara spontan dan mereka dari kota sampai ke desa adalah forum yang dapat dipergunakan untuk mengkomunikasikan ide. Majelis Ulama harus mampu membimbing segenap potensi kaum muslimin yang bergabung dalam lembaga, ormas, pesantren ataupun lembaga politik, menjadi potensi yang hidup dan bergairah untuk mempertinggi lanjutannya pembangunan desa dan memantapkan ketahanan masyarakat desa. Mesjid sebagai eselon yang terendah dari alat kepemimpinan Majelis Ulama, harus dihidupkan dan diberi isi. Majelis Ulama harus mampu mengkomunikasikan segenap potensi Ummat di desa dan dikota agar tidak terjadi duplikasi ataupun kelangkaan dalam penggarapan.
Sekarang ini kita melihat adanya duplikasi dalam satu bidang, akibat kerja musiman tidak programatis dan tidak berorientasi kepada perencana dan sistim yang dianut. Tetapi kita saksikan juga kelangkaan, tidak ada yang menggarap dan menghadapi, sehingga terjadi kegersangan pada suatu lingkungan hidup. Peta ummat Islam perlu disusun sebaik-baiknya, agar kita mampu membaca keadaan diri secara ilmiyah dan imaniyah.

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

GENERASI MUDA INDONESIA

DALAM 5 TAHUN MENDATANG

Oleh M. Zamroni

Penulis adalah salah seorang anggota Pengurus Majelis Ulama Indonesia, yang turut diundang dalam Lokakarya Pembinaan dan pengembangan Generasi Muda yang diselenggarakan oleh Menmud Urusan Pemuda, pada tanggal 2 s/d 7 Oktober 1978 di Jakarta. Ia juga dipilih oleh peserta Lokakarya sebagai salah seorang dari 5 orang Panitya Perumus yang bersama Menmud Urusan Pemuda menyempurnakan hasil Lokakarya. (Redaksi).

DIMANA MANA dibagian dunia ini, setiap Bangsa mempunyai cukup perhatian terhadap Generasi Muda, karena mereka kelak akan menjadi warga Negara Bangsa yang harus mengatur sendiri kehidupan berbangsa dan bernegara, atau biasa disebut sebagai Generasi Penerus Bangsa. Karena itu segala ikhtiar yang dilakukan oleh suatu Bangsa pada saat sekarang dalam kehidupan bernegara, yang merupakan warna/corak perkembangan budaya Bangsa itu dan bagaimana pengaruhnya terhadap Generasi Mudanya, akan memberi petunjuk bagaimana keadaan Bangsa itu dimasa depannya.

Bangsa Indonesia, melalui Sidang Umum MPR bulan Maret 1978, telah menetapkan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang merupakan realitas yang mesti kita pikul bersama, Pemerintah dan masyarakat. Diantaranya, dalam Ketetapan No. IV/MPR/1978 ada memuat permasalahan Generasi Muda, yang segera sebagai follow upnya, Presiden Mandataris Pelaksana GBHN, telah mengangkat Menmud Urusan Pemuda. Sesuai dengan pernyataannya, Menmud segera melakukan dialoog dengan semua organisasi Pemuda/Mahasiswa (extra dan intra kampus) yang mempunyai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, melalui sebuah Lokakarya Nasional Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda, yang juga mengundang tokoh-tokoh Pendidikan, wakil wakil Fraksi di dalam DPR RI yang muda, Perguruan Tinggi beberapa Departemen dan Lembaga Keagamaan, termasuk Majelis Ulama Indonesia.

Sudah barang tentu dialoog tersebut bukannya tanpa ide. Ide Pemerintah dalam hal ini Menmud Urusan Pemuda, yang bersumber dari GBHN yang umum itu, dicoba untuk dilemparkan ketengah masyarakat melalui Lokakarya Nasional tersebut meskipun umumnya telah dipahami bahwa pada akhirnya yang menyusun konsep adalah Pemerintah. Untuk dapat menjalankan secara operasional kon-

sep tersebut, Menteri P dan K telah mengeluarkan surat Keputusan No. 0323/U/1978, tertanggal 28 Oktober 1978, sebagai landasan hukum.

Latar Belakang

Meskipun telah disebutkan terdahulu, bahwa konsep Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda bersumber dari keputusan Bangsa melalui Sidang Umum MPR 1978, namun sebagaimana telah disebutkan dimuka bahwa keseluruhan kegiatan Nasional itulah sebenarnya yang membina budaya Bangsa termasuk Generasi Mudanya. Karena itu mutlak perlu diketahui strategi Perjuangan Nasional saat ini yakni Pembangunan Nasional dalam era Orde Baru dan proses kelahirannya.

Seperti kita ketahui Masa Depan, corak budaya Bangsa kita khususnya kebudayaan politiknya, tergantung apa yang kita kerjakan sekarang dan keadaan sekarang adalah produk dari Masa lalu. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa sampai saat ini kita sudah melalui tiga phase kebudayaan politik :

1— dari tahun 1950 hingga tahun 1959, yang biasa disebut periode Demokrasi Liberal.
2— dari tahun 1959 sampai tahun 1966, periode Demokrasi Terpimpin.
3— dari tahun 1967 hingga sekarang, disebut Demokrasi Pancasila.

Dari cara periodisasi seperti tersebut menunjukkan bahwa dalam menilai perkembangan budaya Bangsa kita khususnya budaya politik, masalah demokrasi merupakan ukuran.

Periode Demokrasi Liberal

Dengan UUD Sementara, Lembaga Legislatiflah yang menentukan segala sesuatunya. Kekuatan sosial Politik yang jumlahnya tidak sedikit, merupakan kelanjutan dari kekuatan efektif pada masa revolusi Kemerdekaan, baik secara kelompok, maupun tokoh tokoh perorangan yang kemudian membentuk Partai. Sudah barang tentu peranan ideologi, nasionalisme, sangat menonjol selama revolusi kemerdekaan, yang bersumber dari konsep Islam/Ummat Islam, Nasionalisme/kaum Marhaen, komunisme/kaum komunis dan Kristen (Protestan dan Katholik). Dari tokoh tokoh Pejuang lahir partai berdasarkan titik berat interest tertentu. Kemiskinan pengalaman praktek, menyebabkan labilitas Pemerintahan, yang berarti lemahnya Perencanaan Nasional/strategi Perjuangan Nasional. Termasuk didalamnya kelemahan perhatian yang merata keseluruh daerah Indonesia.

Sementara itu TNI yang mengambil bagian dalam penyelesaian Revolusi Kemerdekaan tidak diikut sertakan peranannya dalam politik.

Kerawanan dan kelemahan kondisi tersebut yang juga dialami oleh TNI dan Pemimpin Pemimpin di daerah, melahirkan gerakan sparatisme (Pemberontakan di daerah daerah). Disamping itu, konflik dalam Lembaga Konstituante, juga mengarah kepada penyelesaiian yang tidak dewasa.

Namun demikian, ada hal patut yang kita syukuri, karena kepemimpinan Bung Karno almarhum, sebagai solidarity maker, sehingga perasaan ke Indonesian dapat terbina dengan baik. Suatu hal yang tak mudah bagi suatu Bangsa yang besar jumlah penduduknya, banyak kepulauannya serta segi segi heterogenitas lainnya. Sedangkan Bangsa lain yang lebih mudah kondisinya, mengalami kesulitan-kesulitan yang belum terpecahkan dalam menemukan identitas Bangsanya.

Dalam suasana seperti itu, keadaan Generasi Muda terhanyut dalam kebuda-

yaan politik tersebut secara total, bahkan kurang menonjol/terlihat peranannya. Hanya saja dari kalangan intra kampus, ada gejolak yang memilih kegiatan yang elite sifatnya, antara lain Emil Salim sebagai salah seorang tokohnya.

Periode Demokrasi Liberal diakhiri dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dengan kembali ke UUD 1945, dengan Piagam Jakarta menjadi rangkaian kesatuan dan menjiwai UUD 1945. Konstituante dibubarkan. Demikian pula DPR hasil Pemilu 1955. (Phase ini bisa dikatakan Pembinaan Ke—Indonesiaan).

Periode Demokrasi Terpimpin

Periode ini dimulai dengan pembentukan DPR GR dan MPRS oleh Presiden dimana diikut sertakan golongan fungsional, seperti seniman, Pemuda, termasuk TNI. Dalam periode ini pokok kegiatan diarahkan kepada penyatuan dan pemupukan kekuatan politik nasonal, dalam rangka pembentukan kekuatan politik dunia ketiga (yang sedang berkembang, istilah sekarang). Hal ini didasarkan atas keyakinan bahwa kita tidak mungkin membangun Bangsa menurut kehendak kita sendiri selama Negara berkembang, secara langsung atau tak langsung harus menetapkan pilihan bloknya, Barat atau Timur (Kapitalistik atau komunistik), Namun karena tuntutan dunia ketiga umumnya adalah sosialisme berarti anti Kapitalisme, maka hal ini dimanfaatkan oleh Negara Negara Komunis.

Penyatuan kekuatan politik Nasional, didasari atas kenyataan ideologi, dengan rumusan Nasionalisme (Nas), Agama (a), Komunisme (kom), sehingga disebutkan persatuan Nasakom.

Untuk menciptakan ini, dengan UUD 1945 yang menempatkan Pemerintah dalam posisi yang stabil, ditambah pengaruh yang kuat dari pribadi almarhum Bung Karno, memberi kesempatan bagi Pemerintah untuk menyusun kekuatan efektif jauh diatas Legislatif, MPRS, yang sebenarnya sebagai Pemegang Kedaulatan Rakyat, suatu kekuatan tertinggi di negara RI. Dengan dalih Indonesia tidak menganut aliran Montesqiu, maka Demokrasi ala Indonesia disusun dengan penafsiran "khusus" terhadap UUD 1945, yang memberi kekuasaan terkumpul ditangan Kepala Pemerintahan/Mandataris. Maka terjadilah penyelewengan dalam pelaksanaan UUD 1945, yang dimulai dari "pemaksaan" tafsirnya.

Dalam periode ini organisasi Pemuda/Mahasiswa, baik yang secara formal independent maupun yang menjadi ormasnya Partai politik, tidak berdaya menghadapi ancaman Pemerintah terhadap apa yang populair waktu itu, yaitu cap kontra revolusi.

Sehingga organisasi kemahasiswaan/kepemudaan, secara praktis sama dengan keadaan Partai Politik. Kalau diantara Parpol didirikan Front Nasional, maka dikalangan kepemudaan dibentuk Front Pemuda, sedangkan Mahasiswa memiliki dua federasi :

1— PPMI, gabungan organisasi mahasiswa Extra kampus
2— MMI, gabungan mahasiswa intra kampus (Dewan Dewan Mahasiswa)

Penyatuan dalam bentuk Nasakom, melahirkan perlombaan bergantung kepada Presiden, pemegang kekuasaan, dalam rangka persaingan kekuatan antar kekuatan Nas, a dan Kom. Dan berhubung Partai Komunis mempunyai hubungan dengan Partai Komunis Internasional, maka, seperti disebutkan terdahulu, Negara Negara Komunis memanfaatkan situasi anti Kapitalisme, maka suatu Negara Ko-

munis telah membantu PKI sehingga punya cukup kesiapan untuk mengambil alih Pemerintahan sesuai dengan aiaran "Revolusioner" yang ideologi Komunis.

Periode Demokrasi Terpimpin mulai hancur pengaruhnya sejak pemberontakan G 30 S PKI, tahun 1965, yang menyebabkan Partai Partai Politik bergabung melawan PKI. Selanjutnya keadaan ini mendorong Mahasiswa Indonesia untuk bangkit, tidak hanya menuntut bubarnya PKI, seperti Parpol, tetapi juga politik ekonomi dan perombakan aparatur Negara. Seperti diketahui, KAMI melahirkan 3 tuntutan Rakyat (TRITURA), yaitu :

1— bubarkan PKI
2— turunkan harga
3— bersihkan Kabinet

ABRI yang menjadi korban pembantaian G 30 S PKI, sudah sejak lama dianggap sebagai hambatan yang serius bagi perkembangan PKI. Sudah barang tentu ABRI tidak tinggal diam, apalagi mendapat dukungan dari Parpol dan mahasiswa. Adapun organisasi organisasi Pemuda, memang memulai gerakan mereka pada tanggal 8 Januari 1966 menyangkut soal ekonomi, namun Mahasiswa kemudian mengambil alih seterusnya.

Mahasiswa yang mulai demonstrasinya sejak Desember 1965, telah terlebih dulu menyatukan dirinya dalam suatu federasi yang disebut KAMI, pada tanggal 25 Oktober 1965. Sistim politik Nasakom mulai ditantang sejak 10 Januari 1966, ketika situasi ekonomi Indonesia sangat merosot. Demonstrasi yang berjalan selama 4 bulan non stop (terus menerus) dengan dibantu oleh Unsur Unsur ABRI dan Exponen Pimpinan Parpol, menyebabkan Pemerintah hancurnya wibawa Pimpinan Pemerintah saat itu dan terjadilah peristiwa bersejarah pada tanggal 11 Maret 1966. Peristiwa tersebut memberi peluang tambahan setelah melalui keadaan darurat, peranan ABRI bertambah dan Partai Partai oplitik menjadi merosot.

Periode Demokrasi Pancasila

Dilihat dari prakteknya, Demokrasi Pancasila bertujuan pokok merombak sistim/struktur politik yang ada agar dapat menunjang perubahan strategi Perjuang an Nasional, dari perjuangan internasional menyusun kekuatan politik Dunia Ketiga, berdasarkan kekuatan politik nasional, menjadi membangun kekuatan ekonomi nasional, untuk membangun bidang-bidang kehidupan lainnya. Peranan ideologi harus dieliminir dan diganti dengan orientasi kepada program.

Perombakan dimulai dengan refreshing DPRGR agar kekuatan yang hendak mendorong perombakan itu dapat bekerja liwat keputusan keputusan Lembaga resmi Demokrasi secara konstitusional. Sekber Golkar dirombak dengan menghapuskan Kino-Kino sehingga integrasi dapat dilakukan secara ketat. Sementara itu Organisasi Organisasi Mahasiswa tidak henti hentinya secara independent melakukan kegiatan yang coraknya hampir sama dengan dasar kegiatan tahun 1966, tetapi intra Universiter mencoba mencari bentuk kegiatan kedalam kampus (back to campus).

Melalui DPR GR yang telah "disegarkan", UU Pemilu dibuat dalam rangka perobahan perimbangan kekuatan politik yang ada. Berbarengan dengan itu, Pegawai Negeri dipersiapkan menjadi kekuatan efektif dalam politik.

Pada saat Pemilu 1971 dilaksanakan, Mahasiswa dalam kampus umumnya

menyokong pembaharuan struktur politik, sedangkan Mahasiswa Extra Universiter dan Organisasi Pemuda sebagian besar menyokong Partai Partai, meskipun dengan koreksi yang mereka lakukan terhadap cara cara kaderisasi Partai. Dengan peranan yang menonjol dari Aparat Pemerintah, perimbangan kekuatan politik betul-betul berubah setelah Pemilu 1971.

Untuk jangka yang agak lama, ketercengangan organisasi organisasi yang efektif sebelumnya menyebabkan situasi agak lengang kecuali Partai Partai yang mengurusi akibat akibat Pemilu.

Forum kebersamaan antar organisasi organisasi kepemudaan/kemahasiswaan vacum untuk beberapa lama, sampai ketika terbentuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), setelah melalui proses permusyawaratan berbulan bulan, antar utusan Pejabat Pemerintah dengan Organisasi Organisasi Kemahasiswaan/ Kepemudaan.

Beberapa saat setelah itu terbentuklah forum antar organisasi Mahasiswa Extra Universiter, yang mereka sebut Kelompok Cipayung.

Pembentukan KNPI didaerah daerah oleh Instansi Pemerintah menyebabkan sumber pertentangan dan kecurigaan. Namun toh akhirnya termasuk salah satu bagian dari keputusan Sidang Umum MPR tahun 1978.

Iklim yang diharapkan dalam Repelita III

Dasar kebijakan Pemerintah dalam melakukan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Indonesia adalah hampir bersamaan dengan apa yang telah dilakukan terhadap Partai Partai politik yaitu penciptaan jalur jalur Pembinaan dan Pengembangan serta membentuk Koordinator Pembinaan secara interdepartemental dan Badan Pengendali kegiatan Kepemudaan. Diharapkan akan terjadi perombakan struktur yang bisa mendorong perubahan orientasi. Inti jalur-jalur yang dimaksud adalah :

1— Jalur pelajar melalui Ikosis (Ikatan Organisasi Siswa Intra Sekolah sebagai satu satunya jalur Pembinaan Pelajar dalam sekolah) Diluar sekolah (sebagai konsekwensi lain dari nama Ikosis yang intra sekolah) maka diluar sekolah organisasi Pelajar dimasukkan jalur Pembinaan Pemuda.
2— Jalur Kepemudaan, organisasi fungsional seperti Pramuka, KNPI, Olah raga dan organisasi Kepemudaan lainnya.
3— Kemahasiswaan hanya dalam kampus saja, sedangkan Mahasiswa diluar Kampus dimasukkan jalur Kepemudaan.

Perkiraan situasi kepemudaan yang akan datang masih akan merupakan kesulitan, karena Organisasi Mahasiswa Extra Universiter tidak mau disebut dalam kategori Organisasi Pemuda. Terlepas dari kesulitan kesulitan di atas, sebenarnya perlu diperhatikan oleh Organisasi Kemahasiswaan/Kepemudaan Indonesia, bagaimana bisa kegiatan organisasi organisasi tersebut dapat langsung ada kaitannya dengan pelaksanaan dari Undang Undang dasar 1945, sehingga cita cita kita dengan jelas dapat kita dekati dari waktu kewaktu dan dengan demikian diharapkan ada perubahan kwalitatif sejak Repelita III.

Dipihak Pemerintah diharapkan kesadarannya bahwa Pembinaan Generasi Muda tidak mungkin secara terpisah dilakukan, tetapi keseluruhan kegiatan Nasional adalah langsung atau tidak langusng merupakan Pengembangan Kulturil secara nasional khususnya budaya politik yang Pemerintah berada ditempat yang domi-

nan. Jadi wajah yang ditampakkan oleh kegiatan Pembangunan secara keseluruhan itulah yang amat mempengaruhi perkembangan budaya Bangsa, termasuk di dalamnya adalah Generasi Muda Indonesia.

Yang terpenting sebenarnya adalah sarana apa saja yang dapat disediakan oleh Pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh Generasi Muda Indonesia berdasarkan kondisi umum kelompok riil Generasi Muda. Dengan harapan akan dapat meningkatkan kemampuan dan karakter Generasi Muda Indonesia.

Sebagai contoh dapat kita perhatikan misalnya kelompok Mahasiswa Indonesia. Mereka mempelajari Ilmu Pengetahuan yang bersumber dari leteratur Barat. Ilmu Pengetahuan yang mereka peroleh, pasti turut mewarnai idealisme mereka, yang secara tabiiyah setiap orang muda memiliki idealisme yang kuat. Pandangan mereka pasti berbeda dengan praktisi di negara kita, yang lebih mendasarkan pandangan mereka berdasarkan kondisi riil, baik kondisi riil yang bersifat yuridis formal maupun kondisi riil peranan yang menentukan dalam interaksi dan hasil-hasil nya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Umpama saja mengenai pandangan terhadap Demokrasi Pancasila, yang bentuk praktisnya masih didalam proses pertumbuhan (meskipun di dalam UUD 1945 sudah cukup jelas).

Secara umum sebenarnya Pemerintah perlu merubah pola kebijaksanaan penyebaran informasi, khususnya informasi tentang Pembangunan Nasional dan kaitannya dengan perkembangan dunia sekitar kita. Dapat dikemukakan disini antara lain :

1– pola siaran TVRI dan RRI mengenai suatu Pembangunan suatu proyek fisik. Tidaklah penting upacara peresmian dengan resepsinya yang ditonton oleh rakyat, tetapi maknanya dalam konteks tujuan Pembangunan Nasional dan artinya bagi kepentingan masyarakat luas. Apalagi kalau yang diresmikan itu usaha swasta yang diresmikan oleh Pejabat, rasanya kurang perlu dicover. Mungkin dapat juga diperlihatkan dalam gambar hal-hal yang menambah pengetahuan, misalnya proses produksinya dengan sedikit keterangan detail.
2– Menerangkan kemajuan pembangunan Kodya Bogor misalnya, tidak perlu gedung-gedung seluruhnya dicover, tetapi arti kemajuan itu bagi masyarakat yang ingin mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Repelita, itulah yang penting. Kalau perlu diperlihatkan proses membuat jalan dengan berbagai kwalitas yang dikehendaki, berikut biayanya.
3– Penting untuk disiarkan misalnya kehidupan di daerah transmigrasi yang diharapkan dapat mendorong gairah untuk bertransmigrasi spontan.
4– Diawal tahun anggaran, misalnya ada siaran tentang proses perencanaan Pembangunan dan gambaran tentang kegiatan BAPENAS dan sebagainya.
5– Siaran Kepemudaan diarahkan kepada peningkatan skill dan ilmu pengetahuan serta kepeloporan/kreatifitas.
6– Acara tahun baru, selain acara hiburan bagi masyarakat, juga data-data kemajuan kwalitatif dan kwantitatif Pembangunan, dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh sebagian besar Rakyat.

Tentunya masih dapat dikemukakan contoh-contoh lainnya dalam rangka pemasyarakatan program-program Pembangunan dan maknanya.

Demikianlah beberapa catatan tentang iklim dan perkembangan Generasi Muda Indonesia yang diharapkan akan semakin baik dimasa mendatang.

SURAT MUI KEPADA MENTERI P DAN K

No. : B–138/MUI/II/1979

Lamp. –

Hal : Pokok-pokok Pikiran tentang Pembaharuan sistim Pendidikan.

Jakarta, 16 Rabiul Awal 1399 H
13 Pebruari 1979 M

Kepada Yth.
Sdr. Menteri P dan K R.I.,
di – Jakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Bismillahirrahmanirrahim,

Untuk memenuhi ajakan Saudara Menteri, melalui Prof. Dr. Slamet Imam Santoso, Ketua I Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional yang disampaikan langsung dalam Rapat Kerja Nasional ke III Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 15 – 18 Oktober 1978 di Cipayung, Bogor; dan terdorong oleh hasrat untuk memajukan pendidikan bangsa demi terlaksananya peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, budi pekerti, dan kepribadian bangsa, khususnya bagi generasi muda, Majelis Ulama Indonesia memahamkan, bahwa rencana Pemerintah untuk memperbaharui Sistim Pendidikan Nasional itu adalah dalam rangka pelaksanaan konstitusionil Undang-Undang Dasar melalui suatu undang-undang organik.

Majelis Ulama Indonesia, memberikan makna, bahwa setiap rencana yang meliputi Bidang Pendidikan dalam arti luas, adalah sama dengan merencanakan manusia Indonesia yang akan datang, yang beragama, yang sebagian terbesar adalah pemeluk agama Islam. Oleh karenanya sejak selesainya Rakernas III Majelis Ulama Cipayung tersebut Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia telah menghimbau para Ulama untuk menyumbangkan pikiran mereka, serta mengadakan beberapa pertemuan, tukar fikiran dengan Ormas-Ormas Islam Tingkat Pusat.

Demikianlah bersama ini dengan hormat disampaikan pokok-pokok pikiran Majelis Ulama Indonesia tentang Pembaharuan Pendidikan Nasional yang sedang dikerjakan dibawah Departemen Saudara.

Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi manusia untuk meningkatkan harkat dan martabatnya baik sebagai individu, kelompok maupun sebagai kesatuan bangsa. Karena sifatnya yang menyeluruh, suatu pranata pendidikan harus menjabarkan sistim nilai dan norma kedalam sekurang-kurangnya empat kawasan kwalitatif yang merupakan sasaran pendidikan yaitu kawasan kecerdasan, kawasan sikap, kawas-

an prilaku dan kawasan akhlak secara terpadu, untuk membentuk kesadaran dan kemampuan manusia melaksanakan tanggung jawabnya kepada :

i) Tuhan Yang Maha Esa
ii) Manusia sebagai pribadi
iii) Masyarakat dan
iv) Alam lingkungan

Pendidikan berjalan secara berkesinambungan, sejak manusia lahir sampai dia dimasukkan keliang lahat, (uthlubulilma minal mahdi ilal lahdi = life long education), diselenggarakan di rumah tangga, sekolah, lapangan kerja dan masyarakat. Karena itu seluruh usaha pendidikan itu seyogyanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, keluarga dan masyarakat.

2. Bertitik tolak dari pikiran dasar tersebut diatas, suatu pembaharuan sistim pendidikan nasional, programnya, hendaknya diarahkan kepada suatu usaha untuk :
   i) Meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka meningkatkan harkat martabat bangsa melalui peningkatan kwalitas individu yang menjadi sasaran pendidikan.
   ii) Menyiapkan tenaga-tenaga pembangunan yang cerdas, trampil, berwatak : jujur, berdisiplin, memiliki rasa kebangsaan, harga diri dan sadar akan kedudukannya sebagai makhluk Allah serta taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
   iii) Memberi kepada setiap warganegara baik laki-laki maupun wanita untuk memperoleh "pengajaran" yang menghajatkan keterpaduan antara nilai-nilai dengan kepribadian yang bersumber pada ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa yang diproyeksikan dari sistim nilai kemanusiaan secara transcedental maupun norma-norma mondial-materi ra empiris.
3. Sistim Pendidikan Nasional adalah suatu pranata sosial yang merupakan lebih lah satu dari sejumlah pranata-sosial lainnya yang saling kait berkedudukan nyam dan terpadu satu dengan yang lain, sehingga secara mak penyelesaian tentang masalah sistim pendidikan tidak dapat dilakan Majelis Ulapenyelesaian masalah pranata sosial lainnya. Oleh karena itu kan disusul dengan pembaharuan haruslah mencerminkan : menyatakan teri-
   i) Penyesuaian dan penjabaran perundang-undangan Nega
   ii) Aspirasi rakyat
   iii) Kemungkinan ekonomik
   iv) Kewajaran tehnik dan
   v) Kebenaran hukum.

Selain daripada itu pembaharuan tersebut haruslah merupakan du inter-departemental, khususnya dalam usaha :
i) Melaksanakan penilaian secara menyeluruh
ii) Mengidentifikasi dan merumuskan masalah
iii) Mencari pilihan
iv) Merumuskan strategi perencanaan, dan
v) Menetapkan bagan dan jadwal waktu pelaksa

ngat kondisi objektif baik intern maupun ekstern.

Mengingat pula keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, mekanisma pengumpulan data, kemajemukan kriteria baik yang bersifat deskriptif empiris maupun yang bersifat normatif-preskriptif, dan sebagainya, maka suatu usaha pembaharuan pendidikan tidak dapat hanya didorong oleh kebutuhan akan sesuatu perundang-undangan, akan tetapi juga harus dilandaskan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang pada gilirannya akan menjadi sasaran dari pendidikan itu sendiri.

4. Sistim Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, budi pekerti, kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan, hendaknya memelihara, mengembangkan dan menggali nilai-nilai serta sekaligus merupakan lembaga yang menunjang pelaksanaan nilai-nilai tersebut dalam rangka melaksanakan:

i) Rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rakhmat dan anugerah-Nya kepada bangsa Indonesia berupa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu adalah wajar menurut fitrah dan dharmanya, Negara menjamin dan menyusun suatu sistim pendidikan yang membantu pengembangan semangat dan kreativitas warganegaranya untuk merealisasikan lembaga-lembaga keagamaan, pendidikan agama dan peribadatan sebagai konsekwensi dari dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan kebebasan beribadah menurut agamanya masing-masing.
Kewajiban yang diatur oleh norma-norma yang diakui oleh hukum dan perdang-undangan serta hak serta kebebasan warganegara.
wajiban untuk bersama-sama mempertahankan dan membela negara, mekatkan kemakmuran dan kesejahteraan umum serta melindungi segenap a, memelihara fakir miskin, meningkatkan ekonomi yang berazaskan argaan untuk mencapai keadilan sosial yang merata dalam masyarakat memelihara kerukunan dan perdamaian dunia, menggali dan mendan sumber-sumber alam yang merupakan anugerah Tuhan Yang Mauk dimanfaatkan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia lahir bathin, hal-hal yang bersifat dasar yang telah diuraikan di atas, ada bebesus yang kiranya perlu segera pula mendapat perhatian Saudara, pendidikan hendaknya dapat diperjuangkan sehingga menseperti pernah diisyaratkan oleh TAP MPRS No. XXVII/ sehingga penambahan gedung-gedung sekolah dapat segera tuk mencegah anak didik terpaksa sekolah pada waktu e hari itu dapat mereka pergunakan untuk menyalurkan ejahteraan mereka, misalnya menambah ketrampilan, bagainya.
manan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha laknya pendidikan agama menjadi sejenis mata pelaendidikan akhlak (budi pekerti) merupakan bagian

PELABUHAN
PERUSAHAAN MUAT BONGKAR
Jl. Kapuk Muara Baru
Jakarta Utara
Telp. 6603333
Telex 46333 PELABU IA
Cable PELABUHAN
Bongkar-muat untuk pek
kian memburuk
2.000 juta Real
gai akibat kemacet

Keadaan demi
kan untuk bantu bon
menunggu giliran telah
sejam. Pada tahun 198
lah 17.2 juta ton per tah
mencapai 7 juta ton per ta
menjadi 45 buah. Demiki
yang baru pada bulan Oktol

daripadanya. Jenis mata pelajaran tersebut tetap menjadi tanggung jawab Departemen Agama.

iii) Liburan Puasa Ramadhan, hendaknya diteruskan, untuk memberi kesempatan yang sebaik-baiknya kepada anak didik, para guru yang beragama Islam melaksanakan kewajibannya beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempergunakan hari libur tersebut khusus pembinaan mental agama Islam dimesjid-mesjid, dalam suasana yang khusus agamis.

iv) Menumbuhkan manusia pembangunan yang dapat membangun diri sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

v) Hendaknya jalur madrasah dengan penyempurnaannya, dimasukkan kedalam pola nasional pendidikan Indonesia, dan derajatnya disamakan dengan sekolah umum sesuai dengan jenjang tingkatnya. Sebab madrasah menghasilkan tenaga profesional khusus yang diperlukan untuk membentuk keseimbangan sikap bangsa antara ukhrawi dan duniawi. Disamping itu, dunia madrasah dan pesantren merupakan daya tampung yang cukup besar bagi pendidikan anak-anak Indonesia.

vi) Berhubung dianutnya prinsip life long education (yang sejalan dengan ajaran Islam), hendaknya Pemerintah merangsang dan membantu berdirinya lembaga-lembaga pendidikan non formal, termasuk taman kanak-kanak, kursus-kursus ketrampilan, pengajian dan lain-lain. Akan tetapi tidak berarti bahwa lembaga lembaga pendidikan non formal itu untuk seluruhnya di negerikan.

vii) Pembinaan kebudayaan nasional hendaknya tidak hanya digali dari kebudayaan daerah, melainkan memperhatikan pula akan prinsip-prinsip ajaran agama.

viii) Pendidikan kewanitaan, hendaknya lebih jelas termasuk dalam program pembaharuan tersebut.

ix) Sekolah-sekolah swasta (GBHN. 2. Pendidikan 2e) hendaknya lebih mendapatkan stimulasi dari Pemerintah dan memperoleh kedudukan hukum yang lebih terjamin.

Demikianlah pokok-pokok saran dan harapan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, yang insya Allah pokok-pokok Pikiran tersebut akan disusul dengan rumusan kongkrit tentang pembaharuan pendidikan. Kami menyatakan terima kasih atas keterbukaan Saudara.

Atas perhatian Saudara terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Wabillahit taufiq wal hidayah.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,

PROF.DR. HAMKA.

Sekretaris,

H. AMIR UDDIN SIREGAR.

JEDDAH SELAYANG PANDANG

Versi ringkas

Walaupun Jeddah mungkin juga didirikan oleh orang-orang Persia, legenda meriwayatkan bahwa dalam perjalanannya dari Mekkah ke Afrika di tepati Laut Merah, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk meletakkan dasar-dasar sebuah kota di tempat dimana Beliau menunggu perahu layar. Kota itu kemudian dinamakan Jeddah.

Cerita-cerita lain mengatakan bahwa Hawa telah datang dari Jeddah, dan bertemu dengan Nabi Adam a.s di Arafat. Sejarahwan-sejarahwan sepanjang masa telah menguta-rakan ukuran-ukuran yang pasti dari kuburannya yang terletak tidak jauh dari Jeddah, dan yang tampak berwarna putih dan yang jelas dapat terlihat dari jarak jauh-hingga kuburan itu di bumi-ratakan pada tahun 1928.

Sebagai tempat pemukiman pantai, kota ini beriwayat dari zaman sebelum Islam. Tapi berdirinya ia sebagai pelabuhan untuk Kota Suci Mekkah, dan sebagai pusat perdagangan, bermula pada tahun 646. Sejak zaman itu, nasib Jeddah naik dan turun akibat pengaruh-pengaruh internasional. Orang-orang Mesir, Venesia, Portugal, Ottoman, Mameluk, Wahhbi - mereka semua meninggalkan bekas di kota ini - ketika mereka singgah untuk mencari rempah-rempah, perdagangan, kekuasaan atau sebagai kaitan kepercayaan dalam agama, sampai akhirnya pada tahun 1932 Abdul Aziz al Saud memproklamirkan Kerajaan Arabia.

JEDDAH DEWASA INI: Jeddah dewasa ini meliputi daerah sekitar 350 km2 luasnya, dan jumlah penduduk diperkirakan 900.000 orang. Peranannya adalah sebagai pusat import dan penyaluran utama untuk daerah Saudi Arabia wilayah Barat, disamping memiliki kedudukan sebagai ibukota para diplomat dan pusat perdagangan di Kerajaan dan tentu juga sebagai pintu-gerbang ke Kota Suci Mekkah. Perkembangannya yang demikian cepat menjadi sebuah kota internasional, bukannya masalah-masalah: seperti antara lain - masalah kekurangan air, kekurangan industri lokal, pelabuhan laut dan lapangan terbang yang sulit menampung demikian banyaknya alat-alat transportasi yang datang dan pergi.

PELABUHAN LAUT : Tahun 1966 adalah saat yang kritis ketika pelabuhan ini harus bongkar-muat kargo yang mencapai rekor sebanyak 1.030.000 ton. Kemacetan yang serius untuk pekerjaan ini lalu menjadi pemandangan sehari-hari; dan keadaan kian lama kian memburuk. Diperkirakan bahwa Kerajaan mengalami kerugian-kerugian sebanyak 2.000 juta Real Saudi (=$ 615.384.615,– A.S) antara tahun-tahun 1965 dan 1976, sebagai akibat kemacetan di pelabuhan.

Keadaan demikian memburuk sehingga beberapa helikopter terpaksa harus dikerahkan untuk bantu bongkar-muat dari kapal-kapal yang sedang berlabuh. Kini, waktu untuk menunggu giliran telah dipersingkat dari beberapa bulan sebelumnya, menjadi kurang dari sejam. Pada tahun 1981, pelabuhan Jeddah akan memiliki fasilitas bongkar-muat sejumlah 17.2 juta ton per tahun (bandingkanlah dengan sekarang yang kemampuannya baru mencapai 7 juta ton per tahun); disamping mana jumlah dermaga akan ditambah dari 31 menjadi 45 buah. Demikian pula dengan dibukanya Pelabuhan Kontainer Islam Jeddah yang baru pada bulan Oktober 1978, Jeddah kini menempati urutan tempat diantara 20

(duapuluh) pelabuhan kontainer terbesar di dunia dengan kapasitas kemampuan mengurus 35.000 kapal kontainer setiap bulan.

LAPANGAN TERBANG : Dengan kian bertambahnya jemaah haji udara ke Jeddah setiap tahun, dan meningkatnya kepentingan kota sebagai pusat perdagangan internasional, maka lapangan terbang merupakan juga fasilitas kota yang seringkali meluap memikul beban terlalu berat.Sebagaimana halnya dengana pelabuhan laut, Pemerintah Saudi mengatasi masalah ini dengan management dinamis yang baru dan radikal dengan penanaman beberapa milyar dollar guna pembangunan fasilitas-fasilitas baru yang memadai.

Tahap pertama dari lapangan terbang yang baru akan diselesaikan dan mulai digunakan dalam tahun ini juga. Menurut rencana-rencana yang ada maka tidak mustahil ini akan merupakan terminal yang paling besar di dunia, yang mampu memberi akomodasi kepada lalu-lintas haji udara yang kian meningkat. Apabila rampung, lapangan terbang baru ini akan meliputi luas wilayah 105 km2, dan akan mampu mengurus 100 pesawat yang berangkat dan tiba setiap satu jam, dan 3.500 penumpang per jam.

Melihat akan kenyataan bahwa pada musim haji yang baru lalu, pada setiap menit ada pesawat yang mendarat atau berangkat, kiranya rencana pembangunan lapangan terbang Jeddah yang baru tidaklah berlebihan.

INDUSTRI : Sebagai pelabuhan laut dan lapangan terbang yang utama di Kerajaan, maka aktivitas ekonomi yang paling penting di Jeddah adalah perdagangan, impor ekspor, pelayanan urusan niaga dan keuangan. Kendatipun demikian, ia juga memiliki perindustrian yang berkembang pesat. Kota Jeddah juga melangkah maju kedepan untuk pembangunan industri-industri lokal oleh modal swasta dengan bantuan pemerintah.

Industri lain yang penting di Jeddah adalah rencana pembangunannya. Lebih dari 20 hotel internasional telah dibangun dan 7 buah lagi sedang dalam rancangan. Suatu crash-programme sedang disiapkan untuk membangun 32 gedung yang bertingkat 18 yang meliputi 1.936 unit rumah; dimana disamping itu pembangunan 18.000 unit rumah akan ditenderkan dan 22 jembatan seharga $ 769,– juta sedang dibangun.

Walaupun dengan aktivitas yang pesat ini, Jeddah masih dapat mempertahankan daya tarik masa silamnya. Hal ini sebagian besar adalah berkat Walikota sekarang, Sheikh Mohammad Said Hassan FARISI, yang telah memerintahkan pemugaran dan pemeliharaan rumah-rumah historis khas Jeddah yang mempunyai balkon.

PENGADAAN AIR : Yang sangat penting untuk menjaga kehidupan Jeddah sebagai pelabuhan (laut dan udara), pusat industri, pusat perdagangan dan keuangan adalah masalah suplai air. Sumber utama adalah dari paberik penawaran air laut yang tidak ada habis-habisnya; walau di samping ini lembah-lembah yang subur yang terletak dalam jarak radius 70 km. dari kota, diambil pula faedah air dari dalam tanahnya.

Paberik-paberik penawaran air laut yang ada kini memberikan dua jenis manfaat : yakni memprodusir daya listrik di samping air tawar untuk minum. Pada saat sekarang, sekitar 10 juta gallon air tawar setiap hari dihasilkan dari penawaran air laut ini; tapi dalam waktu 5 tahun lagi angka ini akan loncat menjadi 35 juta gallon setiap hari. Apabila keempat tahap dari paberik penawaran air laut ini selesai keseluruhannya (beberapa bagian sudah diselesaikan, dan beberapa bagian masih dalam konstruksi) - maka Jeddah akan

disuplai oleh paberik ini saja sebanyak 85 juta gallon air minum setiap hari.

SEMENTARA ini Jeddah adalah kota yang terus tumbuh. Sebuah kota yang tumbuh demikian pesatnya sehingga masalah-masalah yang dihadapinya mungkin adalah unik di dunia ini. Sebuah masterplan (rencana induk) reksasa untuk masa depan kota ini sedang disiapkan, dan sudah pasti akan menuju perubahan yang lebih besar.

Seorang sejarahwan pada tahun 1826 mungkin tidak akan dapat mengetahui bahwa kata-katanya menjadi kenyataan pada akhir abad ke–20 ketika ia menulis : "sesungguhnya, adalah suatu nasib yang tidak disangka-sangka bahwa Jeddah, dari sesuatu yang tidak berarti, telah menjadi kota yang jaya, kaya dan kota niaga yang masyhur".

MAJELIS ULAMA TK.I SUMATERA SELATAN MENGADAKAN KURSUS LATIHAN GENERASI MUDA ISLAM

Dalam bulan Februari ini, Majelis Ulama Tk. I Sumatera Selatan mengadakan kursus latihan pembinaan da'wah generasi muda Islam Sumatera Selatan yang diikuti oleh 60 peserta.

Kursus tersebut pada pokoknya bertujuan menciptakan kemampuan petugas Da'wah generasi muda Islam dalam rangka pembinaan generasi muda.

Dalam jangka pendek kursus dimaksud untuk meningkatkan sikap, pengetahuan dan keterampilan petugas da'wah generasi muda Islam sebagai suatu sistem pelayanan masyarakat yang meliputi :

- Agar para da'i generasi muda terpanggil untuk bertanggung jawab membantu, membimbing dan mengarahkan masyarakat terhadap tujuan dan cita-cita bangsa yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Palsafah Pancasila.
- Agar para da'i lebih memahami tentang potensi, kemampuan dan masalah yang dihadapi di dalam masyarakat.
- Agar para Da'i lebih memahami dan menguasai keterampilan yang diperlukan dalam memenuhi konsumsi yang diperlukan oleh masyarakat.

Peserta terdiri dari pemuda-pemuda, pelajar ataupun mahasiswa sekurang-kurangnya berpendidikan SLP dan berusia antara 15 dan 30 tahun.

Bertindak sebagai instruktur dalam latihan ini Majelis Ulama Indonesia dari Jakarta, Majelis Ulama Tk. I Sumatera Selatan, Kanwil Dep. Agama. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Pemda dari Pangkopkamtibda, Kepolisian disamping Tokoh-tokoh Angkatan Muda Islam sendiri.

Pelaksanaan latihan tersebut ditangani oleh panitia yang terdiri dari Ketua, A. Kadir Djusman BBA, Wk. Ketua Drs. Z.Arifin dan Syukri Ahkab, Sekretaris, Sukarman Lubay dan Darul Kutni Zen. Bendahara, A. Rosjidi Kamal dan Siti Khodijah dengan dibantu oelh beberapa anggota.

Forum Dialog

AL QUR'AN TIDAK MENGANDUNG KETENTUAN-KETENTUAN ILMIAH ???

Tulisan Yth. Sdr. Ir. Sahir Muhammad dalam Mimbar Ulama No. 27, sebagai sanggahan terhadap pengantar tema Mimbar Ulama 22, adalah sangat menarik. Saya sebagai Pimpinan Redaksi pada masa penerbitan itu merasa perlu memberi tanggapan. Perlu diingat bahwa segala tulisan di Mimbar Ulama tidak selalu sejalan dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia. Tetapi jika terdapat kekeliruan, maka ruju' pada yang hak adalah wajib hukumnya.

Mengenai "ketentuan ilmiyah" yang dikatakan sendiri oleh Yth. Sdr. Ir. Sahir, adalah kebenaran yang masih diragu-ragukan, sangat riskan untuk diikatkan kepada al Qur'an, karena ketentuan-ketentuan al Quran semuanya wajib diyakini. Disini kentara perbedaan antara ilmu dan aqidah. Kaum intellek condong untuk melakukan approach ilmiyah kepada al Quran, tetapi kemungkinan eksesnya adalah bahwa ke-sakral-an Quran sebagai kitab aqidah akan meredup karena tertimpah lapisan awan sekularisme. Ini terlihat pada buku-buku tentang Islam yang dikarang oleh Orientalisten.

Yth. Sdr. Ir. Sahir Muhammad memberi contoh dari surah al Ikhlas, al Baqarah 282 dan al Kahfi 25 untuk membuktikan adanya ketentuan ilmiyah dalam alquran. Dua contoh yang pertama adalah masing-masing tuntunan aqidah dan tuntunan syari'ah dalam lapangan muamalah dan sekali-kali bukan ketentuan ilmiyah. Sedang contoh ketiga nampaknya merupakan "Ketentuan Ilmiyah" Sekiranya memang relevan. Tetapi kalau kita membaca ayat berikut (Khahfi 26) nyatalah bahwa yang menjadi persoalan dalam ayat itu ialah lamanya ashabul kahfi tinggal dalam gua.

Ada orang-orang yang mengatakan bahwa kata ISLAM itu adalah akronim dari Isya, Subuh, Lohor, Ashar, dan Magrib. Nampaknya cocok, cuma tidak relevan. Saya tak berani mengatakan bahwa pendapat tentang "Ketentuan-ketentuan ilmiyah" di al kahfi 25 adalah sekadar terka-terkaan. Cuma saya ingin mengutip apa yang ditulis oleh Ulama Intellek A. Yusuf Ali dalam THE HOLY QURAN halaman 736 footing no. 2365 :

"But the nex verse (al Khahfi 26) points out that al these are more conjucture".

Bagi saya ayat al Khahfi 25 dapat dianggap suatu indikasi sejarah, untuk menyelidiki disaat mana dan pemerintahan siapa Ashabul Khahfi hidup. Atau menyelidiki sampai dimana maksimum ketahanan hidup seorang manusia di dunia ini.

Seperti apa yang ditulis Sdr. Ar. Shahab dalam Mimbar Ulama 21 yang bertumpu dalam tidur selama 300 tahun itu adalah sangat menarik. Apa yang ditulis Shahab adalah benar-benar baru (originil) belum terdapat pada tafsir-tafsir yang dicetak pada buku-buku kuning. Adapun perbandingan tahun syamsia – qomariah yang dikemukakan oleh Yth. Sdr. Ir. Sahir, sudah terdapat pada sebahagiaan tafsir-tafsir terdahulu.

Tentang hadist "Barang siapa dst", yang dianggap kartu merah atau kartu kuning, apa boleh buat karena itu hadist Shahih dan wajib disampaikan. Tentunya dengan hadis itu tidak di-

maksudkan untuk mencegah para akhli untuk mentafsirkan Quran dengan maksud menyelami isi dan makna al Quran, tetapi akan merupakan deterrent bagi mereka yang dengan niat jahat berusaha memutar balikkan, menyelewengkan, mengada-adakan kontradiksi-kontradiksi dengan tujuan menimbulkan keragu-raguan ummat terhadap kebenaran al Quran.

H. Musytari Yusuf LA

SURAT DARI AMERIKA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayahNya kepada kita bersama.

Kiriman Majallah Mimbar Ulama telah saya terima beberapa minggu yang lalu. Mohon maaf terlambat memberi kabar karena berbagai kesibukan menghadapi ujian semester dan kegiatan lainnya.

Mengenai perkembangan pembinaan ummat Islam di sana, mulai berjalan dilingkungan Universitas melalui Muslim Student Organization, Pusat MSA untuk Amerika Utara (USA dan Canada) yaitu di Indiana.

Disamping saya dipercayakan untuk menjadi Ketua Kelompok Mahasiswa Indonesia di UMass, juga sejak tanggal 19 Januari saya dipilih menjadi Sekretaris Jendral Islamic Society at UMass yang wilayahnya meliputi UMass di Boston, di Worchester dan di Amherst.

Organisasi ini didirikan atas kerjasama mahasiswa Islam dari berbagai negara dengan masyarakat Islam yang ada di Amherst. Organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran agama Islam, kegiatan sosial dan pendidikan Islam. Programnya antara lain pemeliharaan ibadat sholat pada pemeluknya, penyelenggaraan kegiatan hari-hari besar Islam, diskusi tentang Islam, pendidikan anak-anak, pengajian mingguan secara berkeliling di rumah anggota, pembacaan al Qur'an, kegiatan rekreasi, sport dan kesenian Islam. Dana organisasi didapat dari iuran anggota 1.00 dollar persemeester, donatur, dan bantuan Universitas. Malah pada perayaan Maulid Nabi (yang pertama kali diadakan di Amherst) diselenggarakan pada tanggal 8 Pebruari 1979 di Hotel Campus Center dengan acara antara lain ceramah tentang hikmah Maulid Nabi, pemutaran film Islam dan silaturahmi.

Islamic Society UMass dipimpin oleh Mohammad Noor Ahmad (President) mahasiswa tingkat doktor di Faculty of Agriculture, Mohammad Ala al Din (Amerika Serikat) sebagai Vice President, Djudju Sudjaha (Sekretary General) mahasiswa dari Indonesia, Abdullah Basabrain (Treasurer) mahasiswa tingkat doktor dari Saudi Arabia, dan Asistant for education adalah Don Carlos mahasiswa dari Cuba.

Sekian dahulu surat dari saya, insya Allah akan disambung lagi.

Amherst, 30 Januari 1979

Djudju Sudjana,
Cie, Hills South, UMass
Amherst, MA, 01003 USA

TEKNOLOGI TANPA JIWA TIDAKLAH MANUSIAWI

Oleh Ir. A.M. Luthfi

TUJUAN PEMBANGUNAN INDONESIA adalah manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Jadi manusia yang utuh dan seluruh anggauta masyarakat tanpa kecuali. Hal ini penting karena ini adalah azas dasar, yang akan menjadi ukuran kita didalam menilai tercapai atau tidaknya tujuan kita dan peralatan macam apa yang akan kita pakai untuk mencapai tujuan tersebut.

Sekali ini kita akan berbicara tentang peralatan yang harus kita pakai untuk mencapai tujuan pembangunan kita. Kita tidak berbicara tentang hasil kerja pembangunan selama ini, apakah manusia menjadi lebih utuh (materiil dan spirituil) atau seluruh masyarakat (urban – rural, kota – desa, pusat -- daerah) telah secara merata menikmati hasil pembanguann ini, ini masalah lain.

Tak syak lagi teknologi adalah salah satu peralatan yang penting kalau bukan terpenting di dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan ini. Secara klasik kita mengenal 4 (empat) faktor produksi yang merupakan suatu conditio cine quanon untuk berhasilnya suatu pembangunan :

- kekayaan alam,
- tenaga manusia,
- modal, dan
- ketrampilan.

Faktor keempat inilah : ketrampilan, yang menurut Dr. Habibie – kata bagusnya adalah teknologi, biasanya merupakan faktor yang langka (scarce), terutama pada negara-negara yang sedang berkembang. Kita tahu bahwa dibelahan bumi Amerika Utara, Eropa Barat dan Jepang, dimana terdapat negara-negara yang dikatakan negara maju, negara sudah berkembang (developed countries), atau negara kayu, dimana terdapat pula masyarakat yang mewah/makmur – affluent societies – adalah kebetulan bangsa-bangsa yang menguasasi dan mengembangkan teknologi. Kita tahu dari belahan bumi inilah justeru datang suara-suara yang sumbang terhadap peranan teknologi selama ini, yang notabene teknologi tersebut baru dikembangkan secara sadar pada abad ke 20 ini saja, bahkan kurang dari 50 tahun terakhir ini.

Pollusi ! Urbanisasi ! Slumps and Ghetto's! Multinational Corporation!

Selanjutnya disebelah sini. Pembabatan! Pukat harimau! dan sebagainya, dan sebagainya. Yang lebih bersungguh-sungguh lagi – Report of the Club of Rome – 'The Limit to the growth', yang serba suram. Dan akhirnya usaha-usaha untuk cari jalan keluar "Small is beautiful". Peng-lestarian alam lingkungan! Masyarakat harus lebih sadar akan lingkungan hidupnya dan keadaan ekologinya! dan sebagainya. Pemerintah-pemerintah yang maju di samping membentuk : Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Korsel; Singapura) atau Departemen Riset dan Teknologi (RI) sebagai imbangannya juga membentuk Departemen-departemen Pengawasan dan Lingkungan Hidup! (RI). Timbul keraguan sekurang-kurangnya pertanyaan, apakah teknologi telah melaksanakan misi-nya dengan baik selama ini?

Teknologi Per Definisi

Apakah misi teknologi per definisi? Mungkin sekali Teknologi telah menjalankan tugasnya sesuai definisi-nya dengan baik, bahkan boleh dibilang berhasil. Berhasil artinya sesuai tugasnya per definisi! Menentukan definisi teknologi-pun bukan suatu hal yang mudah, mungkin disini letak permasalahan: "Encyclopedia of Science and Technology (13–406) Mc Graw Hill – 1960" :

Technology : "Systematic knowledge and action, usually of industrial processes but applicable to any recurrent activity. Technology is closely related to science and to engineering".

"Encyclopedia Americana (26–357) – 1970" :

"Technology refers to ways of making or doing things. The term 'technology' is derived from the Greek 'techne', meaning 'art' or 'craft', but it is generally used in either of two more restricted sense, 'technology' refers only to the industrial processes that succeeded craft operation. In the broader sense in which the term is used in the present article, 'technology' refers to all processes dealing with materials. Technology always has to be learned, whether in the form of manual dexterity or as an applied science".

Yang jelas banyak terasa usaha untuk 'membatasi' dan 'mengarahkan' pengertian teknologi. Ini sama-sama kita rasakan, dalam tahun-tahun terakhir ini. Munculnya istilah-istilah ini menggambarkan hal tersebut. Mula-mula kita mendengar: Intermediate Technology (Teknologi Madya), untuk membedakannya dengan Advance Technology. Kemudian kita dengar Relevant Technology (Teknologi Relevan), seolah-olah untuk mengatakan bahwa baik Intermediate Technology maupun Advance Technology tidak selamanya relevan untuk sesuatu permasalahan, yang penting adalah yang relevan. Persoalannya menjadi-lebih meriah dengan diperkenalkannya istilah Teknologi Desa, atau Teknologi Pedesaan untuk membedakannya dengan Teknologi didaerah kota atau daerah industri. Dan akhirnya pada pertengahan 1977 istilah baru dimunculkan : Teknologi Tepat – Appropriate Technology, memang dirasakan pengertian tentang hal ini belum tepat-tepat juga adanya. Kembali kepada definisi teknologi, yang pada akhirnya dirasakan sebagai pengertian rata-rata adalah, yang dikemukakan oleh Deputy Ketua LIPI bidang Teknologi pada Seminar 50 tahun pendidikan tinggi teknik di Indonesia yang diselenggarakan di ITB Juli 1970.

Mula-mula dikatakannya :

Teknology adalah jembatan antara ilmu pengetahuan dan kebutuhan materiil manusia.
Kemudian disambungnya :
Teknologi adalah segala usaha dan daya upaya untuk mengubah kekayaan alam menjadi kebutuhan materiil manusia. Sekali lagi tujuannya adalah kebutuhan materiil manusia.

Bila ini definisi teknologi, maka kekayaan alam telah diubah menjadi sesuatu yang memenuhi materiil, bahkan dengan sangat berhasil.

- Energi yang dilepaskan oleh air-air terjun telah ditampung melalui generator pembangkit tenaga listrik, menciptakan matahari buatan dimalam hari. Kebutuhan akan matahari dimalam hari adalah kebutuhan materiil manusia.Teknologi pembangkitan tenaga listrik sudah memenuhi tugasnya.
- Bukit-bukit kapur dan ladang-ladang tanah liat dan gips yang satu-satu sendirian tidak berbicara apa-apa akan kebutuhan materiil manusia, setelah suatu proses pembakaran dengan suhu tertentu yang disebut proses klinkerisasi diubah menjadi semen (P.C), yang pada gilirannya setelah dicampur dengan pasir dan kerikil dan air adalah bahan utama manusia untuk mendirikan bangunan-bangunannya dan membangun kota tempat tinggalnya. Teknologi semen dan teknologi beton dalam hal inipun telah melaksanakan misinya.

Dan banyak contoh-contoh yang lain. Kalau tugas teknologi adalah untuk mengubah kekayaan alam menjadi kebutuhan materiil manusia sebenarnya teknologi sudah menjalankan tugasnya secara baik. Secara spektakular, telah begitu banyak kekayaan alam diubah memenuhi kebutuhan materiil manusia. Dalam 20 tahun ini insya Allah minyak bumi akan habis dari muka bumi. Dan Indonesia kalau kita ikuti kecenderungan pemakaian (konsumsi) minyak buminya, dalam waktu tidak lama akan jadi negara peng-import minyak !*)

Teknologi Tepat : Appropriate Technology

Bulan Juli 1977 selama lima hari kira-kira 400 orang ahli-ahli pikir dan orang-orang terkemuka dari negara-negara sekitar lautan Teduh yang tergabung di dalam 'Pacific Science Association' didalam kongres selang ketiganya mengadakan renungan dan penilaian kembali atas peranan teknologi selama ini. Thema Kongres adalah justeru : Appropride Technology (Teknologi Tepat). Disini dibahas disamping tentang pemilihan dari jenis teknologi yang tepat untuk kasan ini, yang

*) Ir. Slamet Bratanata bekas Menteri Pertambangan RI dalam bukunya : "Mengenai Beberapa Tantangan Kita", terbitan Lembaga Studi Pembangunan 1978, hal 57: Pada saat ini produksi minyak bumi Indonesia berkisar sekitar 700 juta barrel setahun. Angka itu pulalah yang diumumkan sebagai tambahan cadangan minyak bumi yang diketemukan setiap tahunnya berdasarkan pengalaman 5 tahun sampai 1976. Tingkat penambahan cadangan baru tadi merupakan maksimum menurut perkiraan berbagai ahli perminyakan. Maka menurut rumusan para ahli pula, tingkat produksipun mempunyai batas tertinggi pada 700 juta barrel setahun. Dari grafik diatas ternyata bahwa produksi maksimal minyak bumi Indonesia dan konsumsi minyak bumi didalam negeri kira-kira akan sama besarnya disekitar tahun 1992. Suatu hari disekitar tahun 1992, tidak akan ada ekspor minyak bumi lagi jika seluruh produksi minyak bumi sekedar cukup menutupi kebutuhan dalam negeri.

penting pula adalah pengertian yang tepat tentang konsepsi dan definisi teknologi itu sendiri**) Akan tetapi yang terlebih penting adalah memperoleh sikap yang tepat (Appropriate Attitude) dari para teknolog, para pembawa teknologi itu sendiri yang menggunakan alat teknologi untuk suatu tujuan tertentu. Sikap ini akan mewarnai seluruh tindakan teknologinya untuk mencapai tujuannya.Renungan di Bali ini diselenggarakan secara bersungguh-sungguh, tidak kurang dari dua orang Menteri (kalau ini bisa jadi ukuran) yang bertanggung jawab akan urusan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari negeri-negeri yang sadar betul akan peranan negaranya, adalah peserta yang aktif dalam kongres ini.***). Dr. E.F. Schumacher pengarang 'Small is beautiful' kini bersama-sama dengan kelompoknya dari Inggris yang penuh keyakinan kini mengatakan bukan 'Small is beautiful' tapi lebih konkrit 'Small is possible' Penulis menjadi pendengar yang baik dari hampir seluruh pembahasan dan dialog-dialog yang terjadi mencatat ungkapan yang disampaikan penuh keyakinan dan semangat : Teknologi harus lebih adil! Teknologi harus lebih demokratis! Teknologi harus lebih berorientasi kepada rakyat terbanyak! Hasil samping dari 'big scale industries' kadang-kadang adalah unemployment alias pengangguran, justeru ditempat-tempat yang punya kesulitan menciptakan kesempatan kerja bagi warganegaranya! Teknologi yang semula disangka adalah netral – netralnya sebuah pisau – yang ditangan seorang pembunuh menjadi alat kejahatan dan ditangan seorang ahli bedah menjadi alat kemanusiaan, kini rupanya kenetralannya kurang dipercaya. Teknologi telah berubah menjadi sebuah pedang yang terlebih sering digunakan sebagai alat pembunuh, bahkan beberapa kalangan telah menganggapnya sebagai pedang Democles yang tidak terkendali dan bahkan mendatangkan bencana. Yang perlu diciptakan adalah kenetralan dari sebuah pacul --- Jadi dapat kita catat kecenderungan-kecenderungan sebagai berikut:

Pertama: adanya keraguan akan peranan teknologi untuk manusia dan kemanusiaan selama ini dan adanya keinginan untuk me-reevaluir pengertian/konsepsi/definisi teknologi sendiri.

Kedua: adanya 'tuntutan' agar teknologi tidak berlaku netral akan tetapi memihak terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang abadi yaitu : nilai-nilai : keadilan, demokrasi, mencintai sesama, melindungi yang lemah, tidak berlebih-lebihan, tidak rakus, tidak boros dan berorientasi kepada kepentingan dan kelangsungan generasi-generasi mendatang. Ternyata nilai-nilai yang tersebut diatas, adalah hal-hal yang non materiil, yang spirituil sifatnya dan tentu saja tidak bisa diukur dengan GNP.

Ketiga: dirasakan perlunya sikap hormat dan tertib" menghadapi kekayaan alam, entah sumber-sumber alam yang dapat diperbaharui (renewable) apalagi terhadap sumber yang tak dapat diperbaharui (non renewable). Sikap

**) Satu diantara 5 sub adalah membahas : definition, criteria (social, economic, technical), resources (human, natural, financial) and its selection methods and measure of appropriateness.

***) H.E. DR. HYUNG SUP CHOI, Minister of Science and Technology, Republic of Korea, presenting paper : "The Rule of Various Stages of Technology, relevant to Developing Countries" H.E. PROF. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO, Minister of State for Research, Republic of Indonesia, presenting paper: "Appropriate Technology".

yang diperlukan adalah sikap 'bersyukur' dan bukan sikap 'mumpung dan gegabah' terhadap kekayaan alam tersebut. Dengan demikian masalah kelestarian menjadi penting dalam setiap tindak teknologi.

Kiranya dapat dirasakan bahwa kecenderungan-kecenderungan yang ada ini adalah terutama bertujuan untuk pemantapan dari sikap-sikap dasar dari manusia pengemban teknologi sendiri didalam menghadapi/mengelola sumber kekayaan alamnya. Bila sikap dasar ini kita kaitkan dengan tujuan pembangunan Indonesia sendiri yang dirumuskan secara tepat yaitu :

Pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya,

Maka secara implisit manusia yang utuh ini mengandung pengertian keutuhan totalitas sebagai manusia yang lahir dan yang bathin, yang mempunyai kebutuhan materiil maupun tuntutan spirituil yang harus dipenuhi. Teknologi tidak bisa melepaskan diri bahkan sebagai penunjang utama dari pembangunan itu sendiri harus lah yang paling menghayati dan menjiwainya bila tidak akan terjadi kepincangan-dan kegoncangan. Dia tidak bisa hanya sebagai alat mengubah materiil saja. Harus lebih dari itu! Sedangkan tujuan yang kedua, masyarakat seluruhnya, secara im plisit mengandung pengertian : keadilan, pemerataan, orientasi kepada anggauta masyarakat terlemah dan rakyat terbanyak. Demikian pula untuk mencapai ini di perlukan partisipasi dan demokrasi. Teknologipun harus bersikap memihak terhadap nilai-nilai diatas. Dan tidak bisa netral lagi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang abadi tersebut, kalau tidak akan bermunculan Schumacher-Schumacher baru yang akan berteriak minta keadilan.

Dengan sikap dasar seperti diatas maka kita dapat mengerti dan menerima Laporan dari Ketua Organizing Commitee pada penutupan Kongres Selang Ketiga pada tanggal 22 Juli 1977, yang menyangkut Teknologi Tepat antara lain sebagai berikut :

1. Any technology adopted should be relevant to local, phisical, economic and social conditions.
2. A technology can only be considered "appropriate" if it lies within the level of the technical culture of the community concerned.
3. Any appropriate technology to be adopted should be labour intensive, fuel-saving* and whereever possible use as much local material and local know-how as possible.
4. While the introduction of any appropriate technology ashould bring about greater productivity of the existing labour, land or capital involved, at the same time it should also ensure a net increase in the income of the individuals concerned.
5. The economic consequences following the adoption of appropriate technology should not result in any incrreased inqquality in the distribution of income or wealth.
6. In the short run, the social consequences following the adoption of appropriate technology should be tolerable to those affected. In the long run, an attempt should be made to avoid destruction or distortion of national, cultural, religious or social values.

Kesimpulan: Sikap yang tepat, disamping pemilihan teknologi yang tepat.

Kiranya pemilihan jenis teknologi yang tepat adalah penting untuk suatu bangsa yang melakukan suatu pembangunan yang terarah seperti Indonesia ini (manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya). Akan tetapi yang paling penting adalah sikap yang tepat dari manusia dibelakang teknologi itu sendiri. Sebab walaupun bagaimana ampuhnya sebuah alat, dia adalah sekedar alat untuk mencapai tujuan. Alat tersebut bisa netral seperti sebuah pisau, atau berbahaya seperti sebuah pedang (Damocles!) atau berbakti seperti sebuah pacul, dia tetap alat. Sikap tidak bisa tidak akan lahir dari sistim nilai yang dimiliki oleh manusianya. Dan sumber dari sistim nilai yang terbesar dalam sejarah tidak lain adalah ajaran agama. Penulis yakin bahwa setiap agama mempunyai sistim nilai sendiri-sendiri dan dengan sendirinya mempunyai konsepsinya sendiri pula terhadap Teknology.

Kekayaan alam yang terdapat di dalam suatu negeri adalah karunia Tuhan yang dilimpahkan-Nya bagi sesuatu bangsa. Tidak semua negeri mendapatkan karunia Tuhan tersebut, apalagi yang berlimpah-limpah! Karena itu layaknya bagi suatu bangsa yang mendapat karunia ini, maka karunia ini hendaknya diterima dengan sikap bersyukur, artinya pengelolaan kekayaan alam memenuhi kebutuhan manusia, tidak bisa dilakukan secara semberono, rakus dan boros. Apapun yang di lakukan, tujuan akhir dari hidup ini adalah kesejahteraan dan kebahagiaan bathin. Karena itu dalam pemilihan jenis dan cara melaksanakan (teknologi) serta hasil/akibat dari tindakan itu sendiri tidaklah boleh bertentangan dengan keinginan dari yang memberi karunia. Nilai-nilainya harus diikuti, antara lain : Adil, Tidak merusak alam, Tidak berlebih-lebihan, Melindungi yang lemah, Sayang pada generasi-generasi yang akan datang, dan sebagainya.

Semua nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang diajarkan-Nya pada manusia. Ajaran-Nya ini hendaknya tetap dijadikan pedoman di dalam segala tindak teknologi kita. Sebagai seorang Muslim, penulis akan menggambarkan sistim skema di bawah-ini :

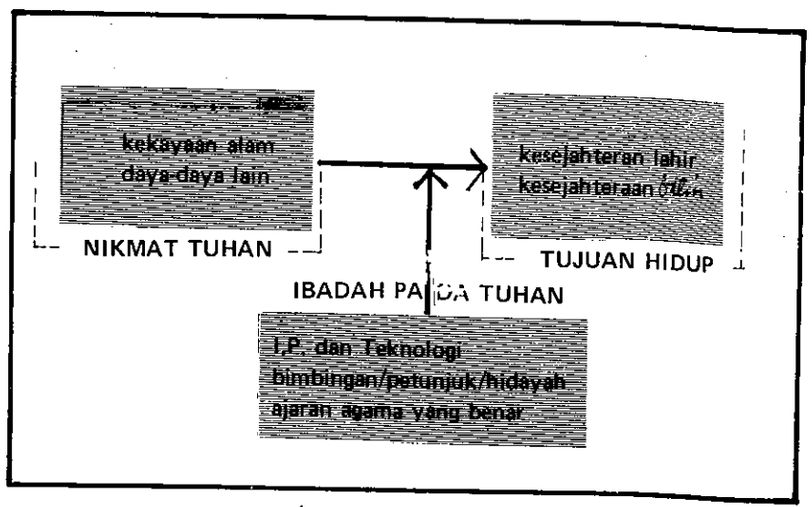

Pada akhirnya penulis ingin kutipkan pembicaraan Tuhan yang langsung tentang kekayaan alam dan teknologi kepada manusia di dalam Al Qur'an – surrah Luqman ayat 20 :

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى
الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ
مَنْ يُجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيْرٍ

'Tidakkah engkau perhatikan (hai manusia) bahwa telah Aku sediakan bagimu apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi. Dan telah Aku sempurnakan nikmatKu lahir dan bathin. Akan tetapi ada diantara manusia yang meng ingkarinya, karena tiadanya ILMU, tiadanya HIDAYAH, dan tiadanya KITAB YANG MEMBERIKAN JALAN YANG TERANG'.

REKONSTRUKSI PEMIKIRAN KEARAH PEMAHAMAN AJARAN AGAMA ISLAM

Oleh Drs. Muchlish Nuruddin
IAIN. Sunan Ampel Surabaya

PERKEMBANGAN ilmu pengetahuan dan teknologi modern dalam dekade terakhir ini telah banyak menampilkan wajah baru dalam tatanan sosial budaya masyarakat. Hasil dari kemajuan tersebut dapat dicatat antara lain, membebaskan manusia dari kerja berat karena sudah tersedianya alat-alat mekanis, mengangkat penderitaan phisik, arus komunikasi antar kota bahkan antar negara bertambah lancar dan cepat karena didukung oleh alat-alat transportasi yang serba modern danmewah, penyakit penyakit berat relatif dapat teratasi. Inilah manfaat dan hasil positif dari ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Tetapi dilain pihak timbul side effectnya, terjadi polusi di kota kota besar akibat jumlah kendaraan bermotor yang melimpah ruah dan industri industri besar mengepulkan asapnya, Press, Radio dan TV kadangkala mengekploitasikan sentimen sintimen manusia yang paling kasar, jumlah kolossal uang dipakai untuk membiayai peperangan peperangan yang sangat mengerikan dan dimana mana terdapat penyakit mental.

Dari gambaran di atas, manusia pada akhirnya ingin memiliki sesuatu yang dapat dijadikan pegangan atau setidak tidaknya dapat memberikan jawaban atas ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut sebagai upaya untuk memadukan kedamaian rohaniahnya. Dan sesuatu itu adalah agama, agama dalam pengertian yang benar. Dalam konteks ini (agama) dan setelah menelusuri kehidupan aspek sosial budaya masyarakat yang tengah hidup dan berkembang, tampaknya cukup rumit dan komplek seraya mengundang problema problema baru yang timbul. Sebab, setiap perkembangan sosial budaya yang baru senantiasa menghendaki adanya legalitas dengan norma-norma yang ada termasuk di dalamnya agama sebagai suatu kebutuhan instrinsik manusia. Dari kedua jurang yang berbeda ini manusia lantas tergoda dengan pertanyaan, sampai seberapa jauh relevansi suatu ajaran agama tertentu terhadap pergumulan pergumulan masalah sosial budaya yang sedang hidup dan berkembang ?

Karena perkembangan kehidupan dalam alam modern telah banyak mengalami pergeseran pergeseran yang cukup mendasar dan fundamentil, maka memaksa ummat beragama untuk memikirkan dan merumuskan kembali penerapan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari secara lebih nyata dan konkrit.

Tercatat dalam sejarah, dipertengahan abad yang silam muncul dua orang pembaharu dalam Islam (Jamaluddin al—Afghani dan Muhammad Abduh) telah

memunculkan suatu gerakan untuk kembali kepada Al–Qur'an dan Hadits (Sunnah) sebagai dasar dan sumber hukum agama. Agama menurut kedua pembaharu ini harus disegarkan dari kelesuannya seraya membuat perobahan mendasar dalam dirinya antara lain merombak struktur dasar pengambilan keputusan dalam soal-soal keagamaan. Agama harus dibebaskan dari kepatuhan buta terhadap hasil literature masa lalu dan seiring itu pula berarti membebaskan dari belenggu kebekuan hidup.

Namun demikian, jauh sebelum kedua pembaru itu hadir, telah muncul juga golongan-golongan besar dalam Islam katakanlah **Ahlussunnah Waljamaah** yang telah dituntut oleh sejarah dan zamannya dari keharusan melakukan rekonstruksi kembali atas penerapan peranan agama dalam kehidupan sehari hari kendatipun golongan ini telah memiliki pola dasar ajarannya yang utama dengan tiga sasaran pokok yaitu : dalam masalah hukum-hukum agama mereka menganut madzab Fiqhi Syafi'i (1), dalam masalah ke Tuhanan mereka menganut faham scholatisismenya Asy'ariyah dan Maturidiyah (2), dan dalam soal Thasawuf mereka mengangkat gerakan Thasawufnya Imam Al–Ghazali (3).

Selain mengembalikan sumber hukum agama kepada al–Qur'an dan Sunnah, gerakan Jamaluddin ini melakukan penyegaran dengan sasaran : memberikan tempat yang penting kepada akal untuk memahami kembali akan arti kehidupan (1) memberikan penghargaan kepada usaha manusia secara individu untuk menentukan nasibnya sendiri (2) dan memberikan arti penuh kepada ilmu pengetahuan dalam kehidupan (3). Manusia diberikan hak untuk memperbaiki hidupnya. Karena manusia telah diberikan hak untuk melakukan pemikiran kembali tentang arti agama dan dengan kepercayaan terhadap diri sendiri tersebut akhirnya manusia merencanakan dan melakukan usaha-usaha bersama untuk menata kehidupan dalam bermasyarakat yang hasilnya dapat disaksikan antara lain perbaikkan dibidang sosial budaya, kesehatan, pendidikan dan organisasi sosial dimana perinsip perinsip modern diterapkan (semisal Muhammadiyah).

Pada giliran berikutnya gerakan tersebut menimbulkan respons baru dalam bentuk gerakan kebangunan di kalangan pengikut madzab yang disponsori oleh N.U. dan Perti. Gerakan ini mencernakan perkembangan sosial budaya yang terjadi dengan tetap berpegang teguh pada pandangan hidup yang telah dimilikinya, halmana penghayatan dan pemahaman baru akan arti agama dalam kehidupan dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketiga ajaran utama nyata atau dengan kata lain pemahaman akan arti agama menghasilkan kerja secara lahiriyah dengan mengambil aspek di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan dengan tetap menjaga tata norma yang terdahulu.

Diawal tahun 1970 Drs. H. Nurcholis Madjid mengintrodusir suatu gerakan dengan idea **"secularisasi"**. Idea ini menuntut pemikiran kembali akan arti agama bagi kehidupan dan arti manusia dalam agama secara integral. Hal ini dimaksudkan agar tempat manusia dalam kehidupan harus dirumuskan kembali secara lebih mendasar dan keseluruhan pandangan agama harus didasarkan pada perumusan tersebut. Dapat difahami, bahwa munculnya gerakan tersebut karena sejarah semakin menuntut bahwa kebutuhan akan penafsiran kembali arti agama bagi kehidupan secara mendasar dan menyeluruh kian mendesak.

Menurut tokoh pembaharu ini, jika manusia dianggap memiliki kemerdekaan, maka konsekwensi logisnya adalah manusia harus diberikan hak untuk menentukan pandangannya sendiri dan merumuskan penafsiran pandangan mengenai agama. Hal ini tidak berarti harus cukup berbentuk rationalisasi semata mata. Manusia harus diberikan kebebasan untuk menetapkan cara-cara menyusun suatu ajaran agama yang ditopang oleh persepsi persepsi yang dimilikinya. Dengan demikian seperangkat peralatan yang ada pada manusia diarahkan untuk menggali dan mencari sesuatu yang tak kunjung selesai akan **arti agama bagi dirinya** dan **tempat dirinya dalam kehidupan**. Sampai sejauh ini perkembangan dari gerakan tersebut masih berjalan secara lamban karena memang gerakan itu belum sampai kepada suatu aksi dan masih terbatas pada pelemparan idea.

Barangkali mungkin yang akan terjadi semacam interaksi dan konfigurasi antara pandangan dari ketiga gerakan pembaharuan itu dan tentunya saling terjadi pengambilan antara satu gerakan kepada gerakan lainnya atas aspek-aspek yang positif dan dari sinilah akan tersusun dan terumuskan pandangan-pandangan baru tentang pemahaman ajaran agama bagi kehidupan masing-masing. Adalah naif sekali jika diharapkan terjadi semacam sintese antara ketiga pandangan tersebut, karena pandangan baru yang akan muncul nanti tentunya tak akan sama manifestasinya di kalangan masing-masing. Namun secara jujur harus diakui bahwa telah terjadi dialog dan interaksi menuju kepada kematangan pandangan masing-masing dan jika hal ini telah terjadi maka besarlah artinya bagi perkembangan kehidupan beragama di kalangan ummat Islam.

Berangkat dari pandangan di atas dapat dimengerti, bahwa memang belum tersusun suatu methode yang lengkap dan sistimatis tentang cara-cara penerapan ajaran agama dalam aspek kehidupan. Hal ini sedikit banyak berkaitan dengan sudut pandangan seseorang dalam memandang arti agama bagi kehidupan manusia. Namun harus diingat, bahwa agama merupakan suatu proses pemahaman manusia atas kebenaran mutlak yang diturunkan Tuhan melalui wahyu seraya penyesuaian tingkah laku manusia atas hasil pemahaman yang dilakukan itu.

Sejarah berjalan terus dan sejalan itu pula tuntutan akan adanya usaha untuk menyusun pola-pola penerapan ajaran agama dalam kehidupan yang lebih nyata kendatipun kurang sempurnanya. Menjadi kewajiban ummat beragama untuk memikirkan dan merumuskan pola penerapan ajaran agama seraya harus disadari bahwa dia bukan satu-satunya pola yang benar dan tepat, sehingga tidak ada hak untuk mengklaim bahwa kebenaran berada pada pihaknya semata, sebab suatu kebenaran hanya akan mampu menjangkau ruang lingkup dan kurun tertentu saja dan pada giliran berikutnya orang harus secara jujur dan terbuka untuk mau menerima hadirnya pola-pola baru yang datang dan berkembang kemudian.

Disadari bahwa bukan suatu hal yang mudah jika penyusunan suatu pola yang dapat diterima oleh berbagai kalangan, sebab seperti diketenahkan di atas bahwa proses interaksi antara ketiga gerakan pembaharuan pemikiran keagamaan belum final. Tetapi bertolak dari kerangka dasar semua pemikiran tersebut di atas dapat dirumuskan pedoman sebagai suatu langkah awal untuk menyusun pola-pola tersebut sekaligus merupakan sumbangan pikiran. Pedoman yang dimaksud ada-

lah : 1) menyediakan tempat yang cukup atas kebebasan manusia untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada Tuhan. Seorang muslim akan dihadapkan dengan alternatif pilihan, manakah yang akan diambilnya antara dua tuntutan yakni tuntutan kehidupan dengan ajaran formil agama dalam suatu perjuangan. Bila tidak diperoleh mekanisme kejiwaan yang memungkinkan manusia melakukan pilihan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya dihadapan Tuhan, maka akan timbul semacam penyesalan yang senantiasa emnggoda kehidupan. Masalahnya adalah bagaimana mengatur agar kebebasan individu tidak merusak kewajiban agama yang telah diterimanya. 2). memberikan arti dan ruang lingkup yang jelas antara ajaran agama yang harus diterima sebagai dogma dan ajaran ajaran mana yang memungkinkan untuk ditafsirkan secara kontemporer. Tanpa adanya batasan, manusia akan terjepit antara dua tembok, disatu pihak terdapat kecenderungan yang berlebih lebihan untuk merationalisasi semua ajaran agama termasuk yang seharusnya diterima sebagai dogma dan dipihak lain senantiasa timbul kecenderungan untuk mendogmatisiir semua ajaran agama sehingga menjadi norma-norma yang patent dan tak perlu ditinjau kembali. 3) menyusun struktur pemikiran keagamaan sesederhana mungkin sehingga mampu melayani kebutuhan yang serba seragam secara plastis. Hal ini tidak berarti hanya ada sebuah kerangka dasar, mungkin akan lebih dari satu. 4). Harus ditetapkan kearah mana persepsi persepsi yang dibuahkan oleh pandangan profesi seorang manusia beragama untuk turut mewarnai pola penghayatan agamanya. Penghayatan agama seseorang merupakan mekanisme yang memelihara keikut sertaan seseorang kepada kehidupan beragama dan penghayatan itu sedikit banyak tergantung kepada profesinya. Untuk itu harus didapatkan cara guna mengatur hubungan antara persepsi-persepsi profesionil dengan penghayatan agama. Tanpa ini akan kurang berarti dilakukan pemahaman atas kebenaran mutlak dan perwujudannya yang paling konkrit sebagai usaha manusia dalam melaksanakan perintah Tuhan. ***

PRESIDEN KONGRES ISLAM SE DUNIA HARGAI R.I

Presiden Kongres Islam sedunia Maarouf Dawalibi menilai, SK Menteri Agama No. 70 dan 77 yang kemudian dituangkan dalam suatu kebijaksanaan yang sangat positip dari pemerintah RI untuk menegakkan kerukunan beragama di Indonesia.

Hal itu dikemukakan Dawalibi kepada Antara dalam percakapan khusus di Islamabad baru-baru ini.

Menurutnya, Kongres Islam sedunia yang berpusat di Karachi bahkan seluruh dunia Islam sangat menghargai dan memujikan kebijaksanaan pemerintah RI tersebut dengan dikeluarkannya peraturan yang menyangkut soal penyebaran agama di Indonesia.

Dikatakannya, masalah agama adalah soal yang sangat peka dan bisa menimbulkan keresahan kalau tidak ditangani secara berhati-hati.

KAMI KEMBALI SEBAGAI MUHAJIRIN

Oleh K. Purwana

MAHA BENARLAH Allah dengan janjiNya : "Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah sesudah mereka teraniaya, akan Kami tempatkan mereka pada kedudukan yang baik di dunia, dan sesungguhnya balasan akhirat bagi mereka lebih besar kalau mereka mengetahui" (AQ. 16 : 41)

"Penjara", bagaimanapun bukanlah tempat yang ideal, dan pasti tidak enak didengar setiap kali orang menyebut-nyebutnya. "Lembaga Pemasyarakatan", "Pemukiman", dan lain sebagainya, adalah istilah-istilah yang telah orang coba barangkali untuk sekedar mengurangi sebutan yang kurang sedap itu.

Benarkah keadaannya begitu menyeramkan? Padahal bahwa Allah mempergilirkan hari-hari kejayaan dan kejatuhan diantara manusia sebagai ujian bagi keimanan seseorang, ada saja kemungkinan andapun, karena sesuatu sebab, harus masuk ketempat yang disebut "neraka dunia" itu. (Semoga Allah melindungi kita dari kemungkinan tersebut).

Berikut ini adalah penuturan dari seseorang yang pernah dan baru kembali dari tempat serupa itu, dan betapa ia telah merasakan bahwa sesungguhnya maha benarlah Allah yang telah menyatkan : "Janganlah kamu mengira bahwa sesuatu yang kamu sangka baik bagi kamu itu baik, dan jangan pula kamu menyangka bahwa sesuatu yang kamu kira buruk bagi kamu itu buruk".

Kebobolan ummat

Tiga belas tahun ditahan bukanlah waktu yang sedikit. Itu dialami oleh orang-orang yang dahulu disebut "kaum atheist" yang terlibat dalam peristiwa "G.s0 S PKI" golongan "B", dan yang secara berangsur-angsur telah dikembalikan ke masyarakat di bawah kebijaksanaan Pemerintah yang ber Pancasila. Tentu saja selama itu pula diberikan indoktrinasi-indoktrinasi Pancasila terhadap mrekea dengan segala pelaksanaannya, khususnya dibidang dakwah disamping belakangan, dalam rangka persiapan terjun kembali ke masyarakat, dikenalkan kepada GBHN dengan P4nya.

Bagiamanakah tanggapannya terhadap semua itu? Suatu psycho test pernah diadakan lebih dari satu kali. Sekalipun hasilnya belum pernah dipublisir, namun pada umumnya mereka tidak acuh terhadap permasalahan politik, karena sudah jera, dan mengambil kesimpulan bahwa seseorang cukuplah Pancasilais kalau sudah menjalankan ajaran-ajaran agama dengan baik.

Memang team-team dakwah secara teratur telah didatangkan ke tempat-tempat mereka, sejak mulai berada di penjara-penjara sampai ke tempat-tempat pemukimannya yang terakhir. Semua agama diwakili ; Islam, Katholik, Protestan, Budha, dan Hindu Bali. Semua datang dan bekerja di bawah naungan satu bendera: Panji-Panji Pancasila. Kesannya, semua sama menyampaikan : tak ada tempat dimana kerukunan beragama dan kehidupan beragama begitu tertib terlaksana seperti di tempat-tempat pemukiman para tahanan. Ketaatan menghadiri dan mengikuti dakwah-dakwah menjadi keharusan yang diawasi dengan ketat, sehingga hasilnya sangat efektif. Tak dapat disangkal bahwa dalam hal ini fihak Nasrani telah berhasil menarik "keuntungan" yang paling besar. Dengan bantuan materielnya yang nyata di atas lambang "kemanusiaan", mereka menggayut jemaah dan ummat yang berlipat ganda. Disinilah terletak ujian keimanan.

Sebagaimana mayoritasnya masyarakat luar adalah Islam, demikian juga "masyarakat dalam" dibalik terali mulanya. Tapi dengan membajirnya sumbangan-sumbangan materi dari fihak Nasrani di tengah-tengah penderitaan penjara yang mayoritas warganya Islam itu, tidak sedikit fihak Islam mengalami kebobolan.

Sekali Islam tetap Islam

Para Rohaniawan Islam (ROHIS) dengan dibantu oleh Uragam (Urusan Agama) yang ditunjuk dengan rekomendasinya, terdiri dari para warga ("warga" adalah istilah yang dipakai untuk menghaluskan sebutan "tahanan", dan Uragam adalah pembantu para Rohaniawan yang ada untuk semua agama), menghadapi gelombang yang merupakan tikaman terhadap tegaknya kehidupan beragama secara wajar dan murni itu dengan tenang, berpegang kepada kemurnian doktrin Islam : "Kebenaran itu adalah yang datang dari Tuhanmu, maka berimanlah siapa yang mau beriman dan kafirlah siapa yang mau kafir", "tidak ada paksaan dalam agama ".Maka berjalanlah keadaan itu sebagaimana mestinya. Mereka yang semula hanya mencari "keringanan" untuk meninggalkan agama asalnya, memasuki agama baru karena bantuan materi, tidaklah menjadi agamawan yang baik dalam agamanya yang baru sebagaimana mulanya dalam agama asalnya. Terjadilah kelucuan-kelucuan.

Dari testing yang diadakan oleh para Pendeta, kebanyakan dari jemaat yang sejak lahirnya beragama Islam dan dibesarkan di tengah lingkungan Islam itu, selalu memberikan jawaban-jawaban yang bernafaskan agama asalnya. Bagaimana tidak akan lucu : Seorang "Kristen", sudah dibaptis, lengkap dengan nama-nama nya yang baru : Antonius Muslim, Victor Muhammad, Thomas Muhammad Ali, dan lain-lain, setiap kali akan makan, minum, membaringkan tubuh untuk tidur, mengucapkan : "bismillahirrohmanirrohim". Dikala sakit, memohon kesembuhan, di atas kelambu tempat tidurnya tergantung salib dan rosari, diucapkannya istighfar dan tasbih. Dan pada puncaknya, ketika salah seorang dari mereka akan meninggal dunia, pada saat sakaratul maut diucapkannya dua kalimah syahadat, dan dikuburkan secara Nasrani.

Para Pendetanya menjadi pusing kalau mereka ditest dengan pertanyaan : Siapakah Tuhan itu? Dijawab : Dialah Pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, yang Maha Esa, tidak berketurunan dan tidak diperturunkan. Sedangkan pertanyaan : Siapakah Yesus Kristus? Dijawab : Putra Maryam yang diutus Tuhan untuk

menyampaikan risalahNya. Doktrin-doktrin Kristen membingungkan mereka yang terbiasa dengan ketauhidan.

Orang-orang awam yang perlu penyantunan

Suatu bukti telah menunjukkan : faktor kwantitatif bukanlah tanda kemenangan di atas kwalitas. Mereka yang berpindah agama dari Islam ke agama yang lain karena dorongan materi itu adalah orang-orang yang paling awam dari agama asalnya. Mereka lemah dalam pengetahuan, belum tau artinya ancaman bencana bagi yang menjual keimanan dengan harga yang sangat murah, bahkan tidak tau apa artinya beragama, belum merasakan agama itu sebagai kebutuhan, gambaran yang umum dari pemeluk-pemeluk agama pada umumnya. Daripada melambangkan suatu keyakinan, pengakuan memeluk suatu agama dari para pemeluk agama serupa itu, lebih banyak menunjukkan sifat bermain-main terhadap agama. Bahwa keadaan serupa ini masih banyak terdapat dikalangan masyarakat luas dari orang-orang yang megaku memeluk sesuatu agama tapi yang keluar dari sikap dan perbuatannya mencemooh bahkan kadang-kadang memusuhi agamanya sendiri, maka perlulah kita berfikir kembali untuk cepat-cepat membuat garis mati bahwa kita adalah orang-orang yang tulen beragama, dan mereka, yang dahulu cicap "atheist", itulah musuh, yang kita harus menutup pintu rapat-rapat bagi kepulangannya dan menutup telinga, mata, dan hati bagi ratapan penderitaannya.

Mereka kini secara berangsur-angsur telah kembali ke tengah-tengah kita, yang notabene adalah mayoritas berasal dari keluarga muslimin, dengan segala corak ragamnya. Islam adalah agama yang tidak hampa dari ajaran mengenai cara-cara menyantuni orang-orang tahanan, "bekas-bekas kafir", bahkan perlakuan yang lembut terhadap fihak yang jelas-jelas merupakan lawan.

Kaum Muhajirin

Suatu pemukul-rataan, meng "gebyog-uyah"kan persoalan dengan mengambil contoh satu dua kemudian menilai seluruhnya begitu, bukanlah ajaran Islam, agama suci yang mengutamakan kebijaksanaan, teliti dalam berfikir, dan adil dalam bertindak, serta menimbang suatu perkara bukan hanya dengan melihat akibatnya saja, melainkan dengan meneliti sebab-sebabnya.

Kalau terjadi perpindahan agama ke agama lain dalam tahanan dilingkungan saudara-saudara kita seagama, haruslah kita menitik beratkan perhatian kepada penyebabnya, apalagi kalau hal itu akan dijadikan bahan pelajaran bagi pengalaman selanjutnya. Kita melihat dari pengalaman ini yang jelas adalah keluar biasaan , mengingat bahwa perpindahan agama ini sangat menyolok : dari Islam, agama yang sangat logik, ke agama Nasrani, yang mengutamakan dogma, dalam jumlah yang besar (sedikitnya 30%) dan bersifat massal.

Bukan rahasia lagi, bahwa kita ummat Islam memang ketinggalan di bidang materi, lemah dalam menyantuni orang-orang yang berkepentingan kaum fakir, untuk dapat mengatasi peringatan Nabi bahwa kefakiran itu mendekatkan orang kepada kekafiran. Padahal kurang apa vitalitas dan potensi kita kalau kita ingat betapa modal yang dapat dihimpun dari zakat, yang dengan teratur ditaati ummat paling tidak dalam zakat fithrah; demikian pula paguyuban yang terhimpun dalam sistim sodeqoh; disamping media massa yang tiada bandingnya untuk menghim-

pun kebulatan fikiran lewat mimbar mesjid dan tabligh serta pengajian-pengajian, sehingga tanpa harus keluar-masuk rumah-rumah untuk membujuk orang agar mau memasuki agama, kita dapat mempertahankan ummat dari usaha-usaha pembelotan oleh fihak yang tidak menyukai Islam.

Demikianlah, maka di tengah-tengah penderitaan dalam tahanan, menghadapi gencarnya bujuk rayu yang menggoyahkan iman dalam bentuk sumbangan-sumbangan demi kemanusiaan itu, lahirlah orang-orang yang teruji keimanannya. Mereka terdiri dari orang-orang yang dapat menghayati hidup sebagai karunia Allah yang harus diisi dengan sesuatu yang sesuai dengan keridhoanNya. Penderitaan bukanlah halangan, melainkan sesuatu yang bernilai untuk digali hikmahnya. Mereka kebanyakan terdiri dari orang-orang yang terpelajar, sarjana-sarjana, dan juga orang-orang biasa, yang dengan logikanya yang terlatih baik mampu berfikir dan dengan mudah dapat meresapi ajaran-ajaran Tuhan yang mutlak kebenarannya, sesudah mengkaji Kitab SuciNya Yang Mulia: Al Qur'an, yang sebelum itu mereka abaikan. Pada umumnya mereka menjadi ahli-ahli berjamaah di mesjid yang mereka dirikan dengan tangan mereka sendiri, ahli-ahli tho'at yang tangguh, dan pembela-pembela agama yang gigih, yang dengan keyakinannya yang dilandasi dengan pengetahuan, dalam segala tantangan mampu berkata : aku adalah seorang Muslim ! Sebagian dari mereka sekarang sudah kembali kepangkuan kita sebagai Muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari satu keadaan lama yang mereka ketahui salah ke keadaan baru yang mereka yakini : benar. Mereka tiada mengeluh menghadapi kenyataan bahwa mereka jauh ketinggalan dibidang materi dari bekas teman-teman sejawatnya, karena mereka yakini betul bahwa janji Allah pasti benar, bahwa bagi orang-orang yang berhijrah dijalan Allah sesudah mereka teraniaya akan ditempatkanNya pada kedudukan yang baik di dunia, sedang balasan akhirat bagi mereka jauh lebih besar kalau mereka ketahui.

Dengan mengayunkan langkah dalam menempuh hidup baru yang selalu berorientasikan kepada ajaran-ajaran agama, mereka ketahui betul bahwa bukanlah caranya untuk memenangkan agama dengan jalan membagi-bagikan hadiah ala Sinter Klas, mendulang ummat dengan materi untuk membeli keyakinannya, dan berkampanye laksana burung-burung elang yang mencari bangkai di tengah-tengah penderitaan, melainkan sebagaimana diteladankan Nabi : mental dulu maka baru kesejahteraan fisik mengikuti. Kita, sebagai Anshor, para pengemban dan kaum penolong Agama Allah, pasti dengan segala keihlashan akan menerima mereka kembali selaku saudara kandung, untuk menyantuninya dibawah naungan iman Islam. Semoga demikian adanya. ***

R A L A T

Dalam Mimbar Ulama No. 27 halaman 56 baris ketiga dari bawah tertulis : Jelas pula sebagai termaktub dalam Al Qur'an. Mestinya Jelas pula sebagai termaktub dalam hadits.

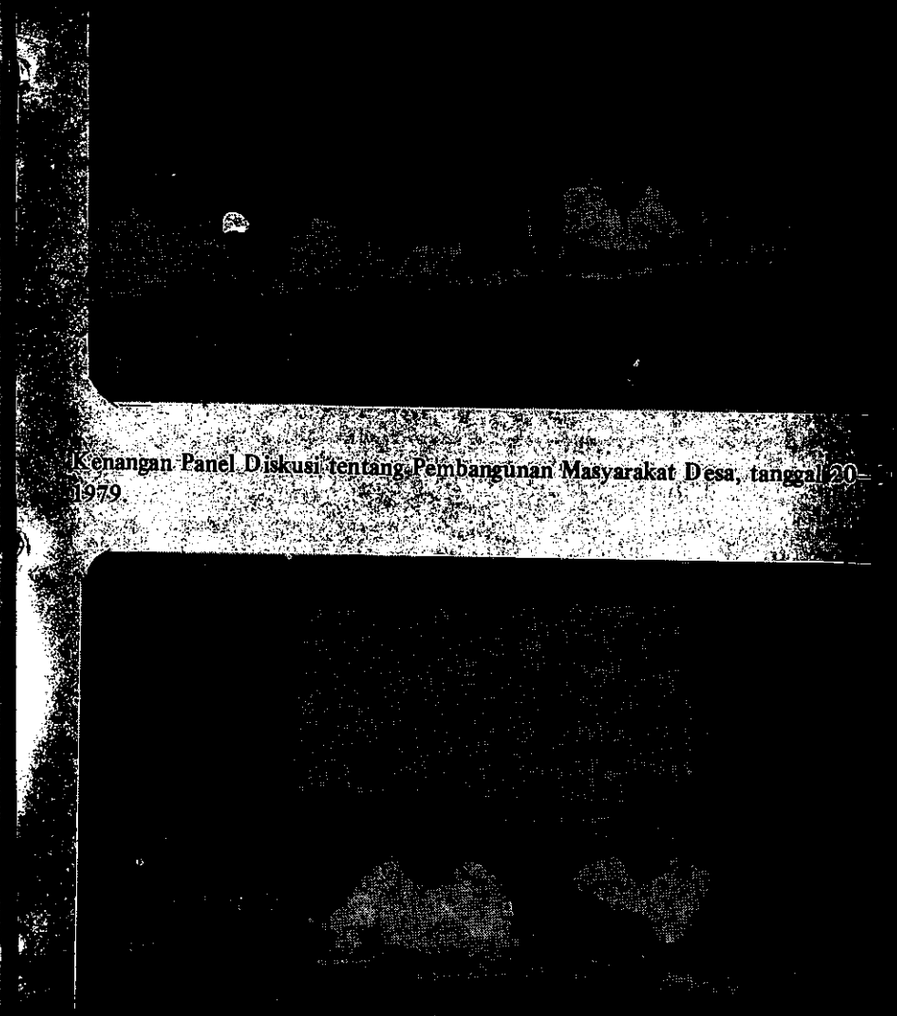

Kenangan Panel Diskusi tentang Pembangunan Masyarakat Desa, tanggal 20-
1979